





Kementerian Sosial RI

Jurnal

Penelitian Kesejahteraan Sosial

**Analisis Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Mengurangi Kerentanan
Masyarakat terhadap Rob di Bandarharjo Kota Semarang**
*Analysis of the Environmental Quality Improvement Program Implementation in Reducing
Community Vulnerability to Rob in Bandarharjo Semarang City*
(Rizqa Lily Nursholichah dan Wiwandari Handayani)

Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur

Implementasi Metode "TATAP" dalam Meningkatkan Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga
Implementation of the "TATAP" Method in Improving Knowledge of Financial Literacy of Housewives
(Uswatun Hasanah, Mirdat Silitonga, dan Tetti Manullang)

Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Rights to Vote for Persons with Mental Disabilities Viewed from the Human Rights Perspective (Tony Yuri Rahmanto)

Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims (Soetji Andari)

Poverty and Characteristics of Population Housing In Mamasa Regency 2018
Kemiskinan dan Karakteristik Perumahan Penduduk di Kabupaten Mamasa Tahun 2018
(Julian Emba Mangosa)

Pencapaian *Triple Bottom Line* pada Berdaya *Charity Store* sebagai Upaya *Sociopreneurship* *Triple Bottom Line Achievement at Berdaya Charity Store as A Sociopreneurship Endeavour* (Raidah Intizar Yusuf, dan Ernawati)

Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi
Masyarakat
(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)
*The Role and Strategy of Non-Governmental Organizations in Social Economic Empowerment of
the Community*
(*A Case Study in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia*)
(*Rudolf Ngulu, Yohannes M. Jamun, dan Heronimus F. Wejana*)

Pengaruh Terapi Bermain terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita SLB Negeri Selong
(Muhammad Satriadi Muratama dan Farida Aqus Setiawati)

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Terbit tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember

diterbitkan

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
(SK Kuasa Pengguna Anggaran B2P3KS Yogyakarta Nomor: 09 Tahun 2019)
Keputusan Kepala Bidang Dokumentasi PDII LIPI No. 12.360/JI.3.02/SK.ISSN/2001
PDII LIPI SK. No. 0005.25280430/JI.3/SK.ISSN/2016

Visi

Penelitian sebagai landasan ilmiah pembangunan kesejahteraan sosial

Misi

Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial
Apresiasi kerjasama antarlembaga dan komunitas ilmiah
Kontribusi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

Penanggung Jawab: Kepala B2P3KS Yogyakarta

Reviewer

Prof. Dr. Phil Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial) Universitas Gadjah Mada
Drs. Latiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D (Kesejahteraan Sosial) UIN Sunan Kalijaga
Dr. Harmonia Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi) Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag. (Teknologi Kesejahteraan Sosial, IAIN Palu)
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
Takenobu Aoki, Ph.D (Antropologi Sosial, Chiba University)

Editor in Chief

Dr. Istiana Hermawati, M.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Section Editor/Copy Editor

1. Dra. Elly Kuntjorowati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
2. Dra. Chatarina Rusmiyati, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
3. Dra. Trilaksmi Udiati (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
4. Dr. Soetji Andari, M.Si (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
5. Ratih Probosiwi, S.I.P, M.Sc (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS
6. A. Nururrochman Hidayatulloh, S.Sos (Kesejahteraan Sosial) B2P3KS

Layout Editor

Drs. Luswihadi

Sekretariat

Dra. Tetra Handayani
Dra. Sri Rahayu, M.Si

Jl. Kesejahteraan Sosial 1, Sonosewu, Yogyakarta
Tromol Pos 65 Kode Pos 55002, Telpon (0274) 377265 Fax. (0274) 373530
e-mail: jpkss.yogyakarta@kemsos.go.id
portal web: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=jpks>

Percetakan:
Ash-Shaff

Isi di luar tanggung jawab percetakan

**Ketentuan Penulisan Naskah
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS)**

Materi dan jenis tulisan:

1. Miniaturisasi dari hasil penelitian.
2. Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.
3. Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:

1. Bidang sosial, terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)
2. Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.
2. Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font) Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12) (c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.
3. Penyajian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
4. Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12). Pustaka acuan ditulis berdasarkan gaya penulisan APA (American Psychological Association) dengan pola: Nama Belakang Pengarang, Inisial (kecuali nama orang Indonesia), tahun penerbitan ditulis dalam kurung, Judul buku (Edisi jika edisinya lebih dari satu), tempat diterbitkan: Penerbit. Contoh: Norvig, Karen. (2013). An Introduction to Social Welfare. New York: Graw Hill.
5. Sistematika tulisan tersusun dalam: a. Judul (Indonesia dan Inggris); b. Nama penulis; c. Biodata penulis (nama lembaga, alamat lembaga dan Email); d. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia); e. Pendahuluan; f. Penggunaan Metode Penelitian; g. Hasil dan Pembahasan (ditulis dalam judul sesuai dengan topik dan lokasi penelitian); h. Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi (apabila diperlukan); i. Pustaka Acuan.

Panjang Tulisan:

1. Antara 10 sampai dengan 25 halaman (2.500 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk abstrak)
2. Diketik 1,5 spasi di atas kertas kuarto (A4)
3. Menggunakan tipe huruf (font) Times New Roman 14 untuk judul, Times New Roman 12 untuk batang tubuh tulisan, dan Times New Roman 10 untuk catatan kaki (foot note), sumber di bawah tabel, dan pustaka acuan.
4. Naskah dilampiri dengan disket atau CD (Soft Copy) dari tulisan bersangkutan.
5. Redaksi berhak mengubah naskah yang masuk untuk diterbitkan, tanpa mengubah esensi materi yang disampaikan, dan mengatur urutan pemuatan naskah menurut pertimbangan aktualitas serta kesesuaian naskah dengan misi penerbitan.
6. Naskah yang dimuat diberi imbalan, sedang yang tidak dapat dimuat dikirim kembali ke alamat penulis apabila disertai perangko secukupnya.

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 18 No 3 Desember 2019
ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528-0430

Daftar Isi

1. Analisis Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Mengurangi Kerentanan Masyarakat terhadap Rob di Bandarharjo Kota Semarang 195 - 208
Analysis of the Environmental Quality Improvement Program Implementation in Reducing Community Vulnerability to Rob in Bandarharjo Semarang City
Rizqa Lily Nursholichah dan Wiwandari Handayani
2. Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur 209 - 218
Public Perception Towards Disability Persons at Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Province
Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Hilda Manafe
3. Implementasi Metode “TATAP” dalam Meningkatkan Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga 219 - 228
Implementation of the “TATAP” Method in Improving Knowledge of Financial Literacy of Housewives
Uswatun Hasanah, Mirdat Silitonga, dan Tetti Manullang
4. Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia 229 - 244
Rights to Vote for Persons with Mental Disabilities Viewed from the Human Rights Perspective
Tony Yuri Rahmanto
5. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika 245 - 256
Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims
Soetji Andari
6. *Poverty and Characteristics of Population Housing In Mamasa Regency 2018* 257 - 266
Kemiskinan dan Karakteristik Perumahan Penduduk di Kabupaten Mamasa Tahun 2018
Julian Emba Mangosa

7. Pencapaian *Triple Bottom Line* pada Berdaya *Charity Store* sebagai Upaya *Sociopreneurship* 267 - 278
Triple Bottom Line Achievement at Berdaya Charity Store as A Sociopreneurship Endeavour
Raidah Intizar Yusuf, dan Ernawati
8. Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat 279 -288
(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)
The Role and Strategy of Non-Governmental Organizations in Social Economic Empowerment of the Community
(*A Case Study in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia*)
Rudolof Ngalu, Yohannes M. Jamun, dan Heronimus E. Wejang
9. Pengaruh Terapi Bermain terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita SLB Negeri Selong 289 - 296
The Effect of Play Therapy on the Level of Socialization of Children with Little Mental Retardation in SLB Negeri Selong
Muhammad Satriadi Muratama dan Farida Agus Setiawati

Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 18 No 3 Desember 2019 ini akan dibuka dengan artikel Rizqa Lily Nursholichah dan Wiwandari Handayani yang berjudul Analisis Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Mengurangi Kerentanan Masyarakat terhadap Rob di Bandarharjo Kota Semarang, *Analysis of the Environmental Quality Improvement Program Implementation in Reducing Community Vulnerability to Rob in Bandarharjo Semarang City*. Dilanjutkan dengan artikel kedua oleh Jefirstson Richset Riwukore, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Hilda Manafe dengan berjudul Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Public Perception Towards Disability Persons at Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Province*. Artikel ketiga adalah Uswatun Hasanah dan kawan-kawan yaitu berjudul Implementasi Metode “TATAP” dalam Meningkatkan Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga, *Implementation of the “TATAP” Method in Improving Knowledge of Financial Literacy of Housewives*. Artikel keempat oleh Tony Yuri Rahmanto yang berjudul Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Rights to Vote for Persons with Mental Disabilities Viewed from the Human Rights Perspective*. Artikel kelima yaitu oleh Soetji Andari yang mengupas tentang Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims*. Artikel keenam oleh Julian Emba Mangosa yaitu berjudul *Poverty and Characteristics of Population Housing In Mamasa Regency 2018*, Kemiskinan dan Karakteristik Perumahan Penduduk di Kabupaten Mamasa Tahun 2018. Artikel ketujuh oleh Raidah Intizar Yusuf, dan Ernawati yang mengambil tajuk Pencapaian *Triple Bottom Line* pada Berdaya *Charity Store* sebagai Upaya *Sociopreneurship, Triple Bottom Line Achievement at Berdaya Charity Store as A Sociopreneurship Endeavour*. Naskah berikutnya adalah oleh Rudolf Ngalu dan kawan-kawan yang mengambil judul artikel Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur), *The Role and Strategy of Non-Governmental Organizations in Social Economic Empowerment of the Community (A Case Study in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia)*. Ditutup dengan artikel kesembilan yaitu Muhammad Satriadi Muratama dan Farida Agus Setiawati dengan artikelnya berjudul Pengaruh Terapi Bermain terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita SLB Negeri Selong, *The Effect of Play Therapy on the Level of Socialization of Children with Little Mental Retardation in SLB Negeri Selong*.

dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451
E-ISSN 2528 - 0430

Vol 18 No 3 Desember 2019

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya.
Keywords are based from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost.

Rizqa Lily Nursholichah dan Wiwandari Handayani (Universitas Diponegoro, Semarang)
Analisis Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Mengurangi Kerentanan Masyarakat terhadap Rob di Bandarharjo Kota Semarang
Analysis of the Environmental Quality Improvement Program Implementation in Reducing Community Vulnerability to Rob in Bandarharjo Semarang City
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 195 - 208

Rob (the local term for tidal flooding) that struck the Bandarharjo Village of Semarang City caused losses to the physical, social and economic aspects of the community. The government had implemented a program that focused on improving environmental quality in the form of the Semarang River Polder System Development Program and the NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2) Program. Both of these programs were efforts made to overcome the problem of tidal floods and their impact on the environment. The purpose of this study was to assess the success of these programs in terms of their usefulness in reducing the vulnerability of the Bandarharjo Urban Village community to the tidal flood. This study used a scoring analysis technique by assessing the success of the program on the criteria of impact, sustainability, and responsiveness according to community perceptions. The results of the scoring analysis showed that the two programs were categorized as 'successful'. The River Polder System Development Program received a total score of 64.41 and the NUSP-2 Program received a total score of 63.39 from the highest total score of 90. Both the River Polder System Development Program and the NUSP-2 Program did not only provide considerable benefits for community, but it was also effective in

Rob (banjir karena air laut pasang) yang melanda Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang menimbulkan kerugian terhadap aspek fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan program yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan dalam bentuk Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Kedua program ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan Rob dan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menilai keberhasilan program-program tersebut dilihat dari kebermanfaatannya dalam mengurangi kerentanan masyarakat Kelurahan Bandarharjo terhadap Rob. Penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring dengan menilai keberhasilan program pada kriteria dampak, keberlanjutan, dan responsivitas menurut persepsi masyarakat. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori 'berhasil'. Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang mendapatkan skor total 64,41 dan Program NUSP-2 mendapatkan skor total 63,39 dari skor total tertinggi yaitu 90. Baik Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 tidak hanya memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, tetapi juga tepat

overcoming the problem of tidal flooding. However, in the assessment of sustainability criteria, the two programs were included in the 'less successful' category because the community's ability to manage the results of the program implementation independently was still lacking. The government needs to create advanced programs that are more creative so that the sustainability of the Semarang River Polder System Development Program and the NUSP-2 Program will be optimal.

Keywords: *environmental quality improvement program; community vulnerability; rob; Bandarharjo; Semarang*

dalam menanggulangi permasalahan Rob. Namun, pada penilaian kriteria keberlanjutan, kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori 'kurang berhasil' karena kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil pelaksanaan program secara swadaya masih kurang. Pemerintah perlu menciptakan program-program lanjutan yang lebih kreatif agar keberlanjutan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 optimal.

Keywords: *program perbaikan kualitas lingkungan; kerentanan masyarakat; rob; Bandarharjo; Semarang*

Jefirstson Richset Riwukore¹, Fellyanus Habaora², Yohanes Susanto³, dan Hilda Manafe⁴
(¹Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, ²Institut Pertanian Bogor, ³Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, ⁴Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta)

Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Public Perception Towards Disability Persons at Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Province

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 209 - 218

The public perception research on persons with disabilities was carried out in Kupang City, East Nusa Tenggara for 7 months, from June to December 2018. Determination of respondents' samples used a purposive sampling technique, as many as 51 people. The analysis used primary data and secondary data. Data were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively using a frequency distribution table. The results showed that public perceptions on persons with disabilities in Kupang City were: 1) People who experienced biomedical, social and bio-psychosocial discrimination and stereotyping; 2) The city government did not pay as much attention to persons with disabilities as the public assumption that public facilities, government policies and services had not been friendly to people with disabilities yet; (3) The existence of persons with disabilities needed to be protected. The

Penelitian persepsi publik terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan di Kota Kupang Nusa, Tenggara Timur selama 7 bulan, yakni mulai bulan Juni hingga Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik purposive sampling, sebanyak 51 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang adalah: 1) Orang yang mengalami diskriminasi dan stereotype secara biomedis, sosial, dan biopsikososial; 2) Pemerintah kota kurang memperhatikan penyandang disabilitas sebagaimana anggapan publik bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan pemerintah belum ramah bagi disabilitas; (3) Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi. Pemerintah

government needed to make friendly and inclusive policies for people with disabilities and to implement protection, empowerment of persons with disabilities and to fulfill their human rights as a commitment.

Keywords: *perception; disability; Kupang.*

perlu membuat kebijakan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas serta melaksanakan perlindungan, pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai sebuah komitmen.

Kata Kunci: *persepsi; disabilitas; Kota Kupang*

Uswatun Hasanah, Mirdat Silitonga, dan Tetti Manullang (Universitas Negeri Jakarta, Jakarta)

Implementasi Metode “TATAP” dalam Meningkatkan Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga

Implementation of the “TATAP” Method in Improving Knowledge of Financial Literacy of Housewives

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 219 - 228

Financial literacy knowledge is an important ability for every individual, especially housewives. This study aimed to analyze the differences in the basic ability of financial literacy of housewives before and after being given training with the TATAP method (Know to distinguish between needs and desires; Do not hesitate to invest; Beware or be alert when in debt; Smart to manage finances). This research used a quantitative approach with the experiments method. This study involved 30 housewives in Segaran Village, Batujaya District, Karawang Regency, Indonesia. Participants were selected using purposive sampling technique with the criteria of housewives who borrow money from “Emok Bank”. Data was collected by conducting interviews, analyzing descriptively and carrying out paired sample t-tests. The results showed a significant difference in the basic knowledge of financial literacy of housewives before and after being given training with the TATAP method. The better the financial literacy knowledge of housewives was, the better the ability to manage family finances would be and this would lead to increasing family welfare. Training with the TATAP method was effectively used to increase knowledge of housewives’ financial literacy. The local government should make such a family

Isi: Pengetahuan literasi keuangan merupakan kemampuan yang penting bagi setiap individu, khususnya ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perbedaan kemampuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan pelatihan dengan metode TATAP (Tahu mana kebutuhan dan keinginan; Tidak ragu berinvestasi; Awas saat berhutang; Pintar mengelola keuangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Penelitian ini melibatkan 30 ibu rumah tangga di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria ibu rumah tangga yang melakukan peminjaman uang dari “Bank Emok”. Data dikumpulkan melalui wawancara, dianalisis secara deskriptif dan *paired sample t-test*. Hasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan pelatihan dengan metode TATAP. Semakin baik pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga maka kemampuan pengelolaan keuangan keluarga akan semakin baik, dan akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Pelatihan dengan metode TATAP efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan literasi keuangan

financial education program that should be carried out periodically considering the fact of the low knowledge of financial literacy of housewives.

Keywords: *Emok Bank, financial literacy, housewives, TATAP method*

ibu rumah tangga. Pemerintah setempat sebaiknya membuat program edukasi keuangan keluarga yang dibuat secara berkala, mengingat rendahnya pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga.

Kata Kunci: *Bank Emok, literasi keuangan, ibu rumah tangga, metode TATAP*

Tony Yuri Rahmanto (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)
Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia
Rights to Vote for Persons with Mental Disabilities Viewed from the Human Rights Perspective
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 229 - 244

The political dynamics in Indonesia at the end of 2018 were warm again due to the issuance of the Circular Letter of the General Election Commission of the Republic of Indonesia which stated that people with mental disabilities had the right to vote so that they were able to be registered as voters. This seemed to lead to diverse opinions in which the government finally accommodated the rights of persons with mental disabilities but on the other hand, it raised concerns for people with mental disabilities whether to use their voting rights properly and correctly or not. The purpose of this paper was to provide a comprehensive understanding of persons with mental disabilities, to describe the legal basis related to the persons with mental disabilities and to describe the right to vote for the persons with mental disabilities in terms of a Human Rights perspective. This was a normative legal research with a qualitative approach that aimed to uncover facts and to present the circumstances, phenomena, and conditions factually that occurred based on literature studies. This writing described that persons with mental disabilities could actually be given the right to vote in elections because so far there was no prohibition for persons with mental disabilities to obtain their rights. Meanwhile, from the perspective of human rights, the granting of the right to vote for persons with disabilities was absolute

Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut rupanya menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun di sisi lain, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif mengenai penyandang disabilitas mental, mendeskripsikan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan mendeskripsikan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi berdasarkan studi kepustakaan. Penulisan ini mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas mental sejatinya tetap dapat diberikan hak pilih dalam pemilihan umum karena sejauh ini tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh haknya. Sementara dari

because they were also part of citizens who were given the right by the state to be able to participate in a democratic process procedurally.

Keywords: *right to vote, persons with mental disabilities, human rights*

perspektif HAM memandang bahwa pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah mutlak karena penyandang disabilitas mental juga merupakan bagian dari warga negara yang diberikan hak oleh negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara prosedural.

Kata Kunci: *hak pilih, penyandang disabilitas mental, hak asasi manusia*

Soetji Andari (B2P3KS Yogyakarta)

Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 245 - 256

This research was conducted at the foundation concerned with narcotics and illegal drugs, namely Laras Compulsory Reporting Recipient Institution (IPWL) and Sekata IPWL in Samarinda City, East Kalimantan. Data collection was carried out by interviewing 30 respondents who were residents of the two IPWLs. Data was obtained by observing, interviewing, studying documents, filling out questionnaires and Focus Group Discussion. From the results of the study, the implementation of social rehabilitation for narcotics and drug abuse victims, seen from the input component which consisted of handling procedures had a good category (97%), which in this case was supported by human resources who had adequate skills in implementing rehabilitation. This social rehabilitation services according to the understanding of residents in terms of context, namely the residents' understanding of the existence of IPWL had a good category of 87.00%. This social rehabilitation service according to the residents' understanding in terms of the input aspects related to the availability of facilities and infrastructure, human resources, and funds at IPWL was in the very good category that was equal to 97.00%. This social rehabilitation service according to residents' understanding in terms of the aspect of the social rehabilitation process was categorized as effective at

Penelitian ini dilakukan di yayasan peduli zat terlarang yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Laras dan IPWL Sekata di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara 30 responden yang merupakan residen dari kedua IPWL tersebut. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, pengisian kuesioner dan *Focussed Group Discussion*. Dari hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, dilihat dari komponen input terdiri dari prosedur penanganan memiliki kategori baik (97%), yang dalam hal ini karena didukung sumber daya manusia yang memiliki keterampilan memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek *context* yaitu pemahaman residen terhadap keberadaan IPWL memiliki kategori baik sebesar 87.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek input terkait ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, dan dana di IPWL berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 97.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek proses rehabilitasi sosialnya dikategorikan efektif yaitu sebesar 80.00%. Direkomendasikan kepada Dinas Sosial dan Badan Nasional

80.00%. It is recommended to the Social Service and Narcotics National Agency of Samarinda City to prevent residents from using narcotics and illegal drugs again after rehabilitation, so that families, communities and government need to grow the resident's entrepreneurial potential, in order to be able to be independent.

Keywords: *effectiveness; prevention; rehabilitation; narcotics and illegal drugs*

Julian Emba Mangosa' (Badan Pusat Statistik)

Kemiskinan dan Karakteristik Perumahan Penduduk di Kabupaten Mamasa Tahun 2018

Poverty and Characteristics of Population Housing in Mamasa Regency 2018

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 257 - 266

Trends in the poverty index in Mamasa District in the past few years showed a low decline and even tended to be stagnant. Housing condition was one of the poverty indicators. The interesting thing was that the poverty rate in Mamasa Regency was lower than the surrounding districts that had better quality housing. The purpose of this study was to get a picture of the characteristics of community housing and to get an idea whether there was a significant influence between housing conditions and the status of household poverty. The characteristics of the housing referred to in this study were the status of home ownership, floor area per capita, type of roof, walls and widest floor, access to clean water, toilet facilities, type of fuel used in households, and lighting sources. The method used was descriptive and inferential binary logistic regression. The descriptive analysis results showed that the characteristics of community housing in Mamasa Regency were at a low value. This was explained by the percentage of home ownership and its own Toilet and Washing facilities, the use of clean water for drinking, and the use of State Company Electricity as a lighting source which was at the lowest index in West Sulawesi. The results of the binary logistic regression inferential analysis showed that there was a significant influence

Narkotika Kota Samarinda untuk mencegah agar residen tidak menggunakan narkotika dan obat terlarang kembali pasca rehabilitasi, maka keluarga, masyarakat dan pemerintah perlu menumbuhkan potensi kewirausahaan residen, agar mampu mandiri.

Kata kunci: *efektifitas; pencegahan; rehabilitasi; narkotika dan obat terlarang*

Tren angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan yang rendah bahkan cenderung stagnan. Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator kemiskinan. Hal yang menarik adalah angka kemiskinan Kabupaten Mamasa lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya yang memiliki kualitas perumahan yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran karakteristik perumahan penduduk serta mendapatkan gambaran apakah ada pengaruh yang signifikan antara kondisi tempat tinggal dan status kemiskinan rumah tangga. Unsur karakteristik perumahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status kepemilikan rumah, luas lantai per kapita, jenis atap, dinding, dan lantai terluas, akses air bersih, fasilitas MCK, jenis bahan bakar yang digunakan dalam rumah tangga, serta sumber penerangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan inferensi regresi logistik biner. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa karakteristik perumahan penduduk di Kabupaten Mamasa berada pada nilai yang rendah. Hal ini dijelaskan dengan persentase kepemilikan rumah dan fasilitas MCK sendiri, penggunaan air bersih untuk minum, serta penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan yang berada pada nilai terendah di Sulawesi Barat. Hasil analisis inferensi

between the status of home ownership and the type of fuel used in households with the status of poverty. The government needs to work to improve the quality of life of the community, especially the fulfillment of access to clean water (through the expansion of Community-Based Drinking Water and Sanitation Programs or Pamsimas), lighting (electricity entering villages), and increasing community purchasing power (through targeted empowerment and social assistance programs). In addition, further analysis is needed regarding the characteristics of housing and poverty.

Keywords: poverty, housing, welfare

regresi logistik biner menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara status kepemilikan rumah dan jenis bahan bakar yang digunakan dalam rumah tangga dengan status kemiskinan rumah tangga. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama pemenuhan akses air bersih (melalui perluasan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas), penerangan (listrik masuk desa), serta peningkatan daya beli masyarakat (melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial tepat sasaran). Selain itu diperlukan analisis lebih lanjut terkait karakteristik perumahan dan kemiskinan.

Kata Kunci: kemiskinan, perumahan, kesejahteraan

Raidah Intizar Yusuf, dan Ernawati (Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan)
Pencapaian Triple Bottom Line pada Berdaya Charity Store sebagai Upaya Sociopreneurship
Triple Bottom Line Achievement at Berdaya Charity Store as A Sociopreneurship Endeavour
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 267 - 278

This research departed from the phenomenon of the rise of philanthropic activities that had a humanitarian social goal based on fundraising and the presence of sociopreneurship namely entrepreneurial activities that emphasized the resulted social impact. Berdaya Charity Store is unique because it emphasizes on three basic lines (Triple Bottom Line), namely financial, social, and environmental. This paper aimed to explore the Triple Bottom Line of Berdaya Charity Store. This research was conducted with a qualitative approach and data collecting techniques were participatory observation, interviews, documentations study and library research. During collecting data, efforts to reach the triple bottom line were carried out well. Berdaya Charity Store invited people to donate used goods to be sold in Berdaya store and most of the funds were used for social activities in the form of visits to orphanages and for training hard and soft skills for them. The researcher

Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya kegiatan filantropi yang memiliki tujuan sosial kemanusiaan berbasis penggalangan dana dan hadirnya *sociopreneurship* yakni kegiatan kewirausahaan yang menekankan pada *social impact*. Berdaya Charity Store menjadi unik karena penekanannya pada tiga lini dasar (*Triple Bottom Line*), yakni *financial, social, and environmental*. Tulisan ini bertujuan untuk menggali mengenai *Triple Bottom Line* dari Berdaya Charity Store. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatoris, wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka. Selama pengumpulan data, upaya untuk mencapai *triple bottom line* telah dijalankan dengan baik. Berdaya Charity Store mengajak masyarakat untuk mendonasikan barang bekas yang akan dijual di toko, dan sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan sosial berupa kunjungan ke panti asuhan

observed that even though the social mission was integrated with the revenue model, the overall and diversity of Income Charity Store income was still low, namely donations and sales. Some of forwarded recommendations are campaigning for social and environmental principles to the right targets, bringing in other financial resources, doing more event-based selling so that sales are not limited in the store, socializing more broadly the tagline “Used goods become a blessing for others” so that in the long run it could become a branding for the foundation, as well as developing individual competencies of Empowered Charity Store personnel involved in social empowerment.

Keywords: *sociopreneurship; used goods stores; social empowerment*

dan pelatihan *hard* dan *soft skill*. Peneliti mengamati bahwa sekalipun misi sosial terintegrasi dengan model pendapatan, keseluruhan dan keragaman pendapatan Berdaya *Charity Store* masih rendah, yakni donasi dan penjualan. Beberapa rekomendasi yang diajukan adalah mengampanyekan asas sosial dan lingkungan kepada target yang tepat; mendatangkan sumber-sumber financial yang lain; melakukan lebih banyak *event-based selling* sehingga penjualan tidak terbatas di toko; mensosialisasikan lebih luas tagline “Bekas jadi Berkah” sehingga dalam jangka panjang dapat menjadi *branding* yayasan; serta mengembangkan kompetensi individu dari Berdaya *Charity Store* yang terlibat dalam pemberdayaan sosial.

Kata kunci: *sociopreneurship; toko barang bekas; pemberdayaan sosial*

Rudolf Ngalu, Yohannes M. Jamun, dan Heronimus E. Wejang (Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng)

Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat

(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)

The Role and Strategy of Non-Governmental Organizations in Social Economic Empowerment of the Community

(A Case Study in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 279 - 288

This research was motivated by concerns about poverty which had become an acute problem in Manggarai Regency. Although various types of government social assistance programs continued to be rolled out and the development paradigm had shifted from a centralized to a decentralized system, poverty rates remained relatively high. In the midst of this condition, the presence of NGOs was an alternative option and hope. The main problem examined in this paper was how the role and strategy of NGOs in empowering the socio-economic community in Manggarai Regency. This paper was the result of research with a qualitative approach and case study method. Data collection was done through interviews and document

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan tentang kemiskinan yang telah menjadi masalah akut di Kabupaten Manggarai. Walaupun berbagai jenis program bantuan sosial pemerintah terus digulirkan dan paradigma pembangunan sudah bergeser dari sistem sentralistik ke desentralistik, angka kemiskinan relatif tetap tinggi. Di tengah kondisi ini, kehadiran LSM menjadi opsi dan harapan alternatif. Permasalahan utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran dan strategi LSM dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai. Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen.

studies. Data analysis used the Miles and Huberman model which consisted of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that NGOs working in Manggarai Regency had carried out the role of community empowerment in the socio-economic field. Strategies developed by NGOs included: (1) group-based approaches, (2) changes in ways of thinking, (3) participation and capacity building, (4) institutional strengthening for long-term independence. The challenges faced by NGOs in carrying out their roles were: (1) NGO personnel capacity was minimal, (2) NGO capacity was still lacking in determining target villages, (3) people's thinking was wrong and (4) partnerships with government, which were too bureaucratic.

Keywords: NGO; empowerment; community; Manggarai District

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM yang berkarya di Kabupaten Manggarai telah menjalankan peran pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Strategi yang dikembangkan oleh LSM meliputi (1) pendekatan berbasis kelompok, (2) pengubahan cara berpikir, (3) partisipasi dan peningkatan kapasitas, (4) penguatan kelembagaan demi kemandirian jangka panjang. Tantangan yang dihadapi LSM dalam menjalankan perannya adalah: (1) kapasitas personalia LSM yang minim, (2) kapasitas LSM masih kurang dalam menentukan desa sasaran, (3) cara berpikir masyarakat yang keliru, dan (4) kemitraan dengan pemerintah yang terlampaui birokratistik.

Kata Kunci: LSM; pemberdayaan; masyarakat; Kabupaten Manggarai

Muhammad Satriadi Muratama dan Farida Agus Setiawati (Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta)

Pengaruh Terapi Bermain terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita SLB Negeri Selong

The Effect of Play Therapy on the Level of Socialization of Children with Little Mental Retardation in SLB Negeri Selong

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 Desember 2019, hal 289 - 296

The purpose of this study was to determine the effect of play therapy on the level of socialization of children with little mental retardation. It was known that the level of socialization of children with Little Mental Retardation prior to being given play therapy, children found it difficult to carry out the process of socialization with friends and teachers at school, but after being given play therapy, children with Little Mental Retardation could do the socialization process in their learning environment at school. Normal birth and life are the desires of every individual and parent. This desire was only a dream for people with disabilities, because most of them were excluded from the

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan. Diketahui bahwa tingkat sosialisasi anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan sebelum diberikan terapi bermain, anak sulit dalam menjalankan proses sosialisasi bersama teman dan guru di sekolah, tetapi setelah diberikan terapi bermain, maka anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan dapat melakukan proses sosialisasi di lingkungan belajarnya di sekolah. Lahir dan hidup normal adalah keinginan setiap individu dan orangtua. Keinginan itu hanya merupakan impian bagi para penyandang cacat, sebab kebanyakan

learning environment. This research method was an experimental research through pre-experimental design which was formed a group of children with Little Mental Retardation to undergo pre-test-post-test procedures (one group of chosen children to undergo the pre-test-post-test procedures). The number of samples in this study were 40 students. The sampling technique was carried out randomly with a total sampling technique. Data collection techniques used in this study were conducted through two data sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained through the results of filling out the questionnaires (check list) conducted by researchers, while secondary data was obtained through the SLB Negeri Selong Timur Lombok Timur institution, which was in the form of a classification of children with Mental Retardation, the number, and a list of SLB Negeri Selong Negeri East Lombok SLB students. The results of Wilcoxon Signed Rank Test with an error level (α) = 0.05 obtained p = 0,000 ($p < \alpha$) so that it could be concluded that there was an effect of play therapy on the level of socialization of children with Little Mental Retardation in SLB Negeri Selong. The results of this study were recommended to the head of BLHP (Body of Life Environment and Research) who then the head of BLHP conveyed the copy of the recommendation to the headmaster of the Selong State SLB school in East Lombok Regency.

Keywords: *playtherapy; level of socialization; children with little mental retardation*

dari mereka dikucilkan dari lingkungan belajarnya. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperiment melalui desain pre-eksperimental yaitu dibentuk satu kelompok anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan untuk menjalani pre-test-post-test prosedur (one group of chosen children to undergo the pre-test-post-test procedures). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil pengisian kuesioner (*check list*) yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh melalui institusi SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur, yaitu berupa klasifikasi anak dengan Keterbelakangan Mental, jumlah, dan daftar nama siswa SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur. Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test dengan taraf kesalahan (α) = 0,05 diperoleh nilai p = 0,000 ($p < \alpha$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan di SLB Negeri Selong. Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada kepala BLHP (Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian) yang kemudian menyampaikan tembusan rekomendasi tersebut kepada kepala sekolah SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci: *terapi bermain; tingkat sosialisasi; anak tuna grahita ringan*

Analisis Keberhasilan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dalam Mengurangi Kerentanan Masyarakat terhadap Rob di Bandarharjo Kota Semarang

Analysis of the Environmental Quality Improvement Program Implementation in Reducing Community Vulnerability to Rob in Bandarharjo Semarang City

Rizqa Lily Nursholichah¹ dan Wiwandari Handayani²

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

E-mail: rizqalily@student.undip.ac.id, HP.081296956047

tanggal di terima 29 September 2019 tanggal di perbaiki 03 November 2019 tanggal di setujui 16 Desember 2019

Abstract

Rob (the local term for tidal flooding) that struck the Bandarharjo Village of Semarang City caused losses to the physical, social and economic aspects of the community. The government had implemented a program that focused on improving environmental quality in the form of the Semarang River Polder System Development Program and the NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2) Program. Both of these programs were efforts made to overcome the problem of tidal floods and their impact on the environment. The purpose of this study was to assess the success of these programs in terms of their usefulness in reducing the vulnerability of the Bandarharjo Urban Village community to the tidal flood. This study used a scoring analysis technique by assessing the success of the program on the criteria of impact, sustainability, and responsiveness according to community perceptions. The results of the scoring analysis showed that the two programs were categorized as 'successful'. The River Polder System Development Program received a total score of 64.41 and the NUSP-2 Program received a total score of 63.39 from the highest total score of 90. Both the River Polder System Development Program and the NUSP-2 Program did not only provide considerable benefits for community, but it was also effective in overcoming the problem of tidal flooding. However, in the assessment of sustainability criteria, the two programs were included in the 'less successful' category because the community's ability to manage the results of the program implementation independently was still lacking. The government needs to create advanced programs that are more creative so that the sustainability of the Semarang River Polder System Development Program and the NUSP-2 Program will be optimal.

Keywords: *environmental quality improvement program; community vulnerability; rob; Bandarharjo; Semarang*

Abstrak

Rob (banjir karena air laut pasang) yang melanda Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang menimbulkan kerugian terhadap aspek fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan program yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan dalam bentuk Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Kedua program ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan Rob dan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menilai keberhasilan program-program tersebut dilihat dari kebermanfaatannya dalam mengurangi kerentanan masyarakat Kelurahan Bandarharjo terhadap Rob. Penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring dengan menilai keberhasilan program pada kriteria dampak, keberlanjutan, dan responsivitas menurut persepsi masyarakat. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori 'berhasil'. Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang mendapatkan skor total 64,41 dan Program NUSP-2 mendapatkan skor total 63,39 dari skor total tertinggi yaitu 90. Baik Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 tidak hanya memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, tetapi juga tepat dalam menanggulangi permasalahan Rob. Namun, pada penilaian kriteria keberlanjutan, kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori 'kurang berhasil' karena kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil pelaksanaan program secara swadaya masih kurang. Pemerintah perlu menciptakan program-program lanjutan yang lebih kreatif agar keberlanjutan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 optimal.

Keywords: *program perbaikan kualitas lingkungan; kerentanan masyarakat; rob; Bandarharjo; Semarang*

A. Pendahuluan

Rob semakin sering melanda wilayah-wilayah pesisir akibat naiknya permukaan air laut secara global. Buchori et al. (2018) menjelaskan rob sebagai istilah yang lazim digunakan di wilayah pesisir utara Pulau Jawa untuk menyebut genangan dan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air laut. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan iklim yang menyebabkan mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan yang harus dihadapi oleh 70 persen wilayah pesisir di seluruh dunia (Wong et al., 2014). Di sisi lain, kota-kota metropolitan di Indonesia yang letaknya di pesisir juga mengalami penurunan tanah (*land subsidence*) akibat maksimalnya pemanfaatan lahan sebagai lahan terbangun. Penurunan permukaan tanah sebagai dampak dari tekanan urbanisasi dan kenaikan permukaan air laut sebagai dampak dari tekanan perubahan iklim membuat masyarakat di wilayah pesisir rentan terhadap rob.

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan kecenderungan suatu elemen untuk menderita kerugian atau resiko; tidak tangguh; keterbatasan dalam hal akses dan mobilisasi sumber daya komunitas atau sistem sosial dan lingkungan dalam menanggapi bahaya (Handayani et al., 2017; Birkmann et al., 2013). Kerentanan digambarkan melalui keterkaitan fungsi keterpaparan (*exposure*), sensitivitas (*sensitivity*), dan kapasitas adaptasi (*adaptive capacity*). Kerentanan masyarakat wilayah pesisir dapat dilihat dari seberapa sensitif masyarakat dalam menghadapi paparan atau bahaya yang salah satunya berupa rob dan seberapa mampu masyarakat melakukan adaptasi serta menanggulangi dampak yang merugikan. Kerentanan juga dapat dilihat melalui seberapa terpengaruhnya kehidupan mereka akibat adanya rob tersebut. Solomon et al. (2007) dalam Mussadun et al. (2016) menyatakan bahwa negara berkembang lebih rentan terhadap rob karena kapasitas adaptasi yang dimiliki lebih terbatas dibandingkan negara-negara maju.

Kota Semarang merupakan salah satu dari sekian banyak kota metropolitan di negara

berkembang yang terletak di wilayah pesisir yang rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi (Handayani et al., 2019). Rob seringkali melanda pesisir utara Kota Semarang, salah satu yang terpapar paling parah yaitu Kelurahan Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara (Ramadhany et al., 2012). Handoyo et al. (2016) menghitung bahwa 89,7 persen dari keseluruhan wilayah Kelurahan Bandarharjo tergenang rob (219,7 Ha). Penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang terjadi dengan laju penurunan sebesar 9-13 cm per tahun (Yuwono et al., 2013) di kelurahan ini juga memperparah kondisi rob. Data lainnya menunjukkan laju penurunan tanah terjadi sebesar 20 cm per tahun (Ariandini et al., 2016). Padatnya permukiman penduduk dan adanya beberapa industri di Kelurahan Bandarharjo membutuhkan konsumsi air tanah dalam jumlah yang besar. Tekanan urbanisasi ini mendorong masyarakat melakukan pemanfaatan sumber air tanah secara berlebihan hingga tanah terkonsolidasi.

Rob sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Kelurahan Bandarharjo karena menimbulkan dampak yang merugikan, pada aspek fisik lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek fisik lingkungan, masyarakat mengalami beberapa kerugian antara lain kumuhnya lingkungan, rusaknya kontruksi bangunan, rusaknya kendaraan karena korosi, dan rusaknya jaringan jalan serta saluran drainase. Pada aspek sosial dan ekonomi, masyarakat mengalami beberapa kerugian antara lain terganggunya kegiatan belajar mengajar dan kegiatan perekonomian, munculnya penyakit kulit (gatal-gatal) dan diare, berkurangnya pendapatan untuk membaiyai peninggian rumah, dan terganggunya kegiatan sehari-hari lainnya.

Kerentanan Masyarakat Kelurahan Bandarharjo tidak hanya disebabkan oleh permasalahan rob. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan kemiskinan, lingkungan kumuh, dan kepadatan penduduk serta kepadatan lahan terbangun. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin sensitif ketika harus menghadapi bencana rob. Sebagai upaya adaptasi terhadap

rob, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat Kelurahan Bandarharjo dalam bentuk pelaksanaan program-program peningkatan kualitas lingkungan.

Konteks program peningkatan kualitas lingkungan pada penelitian ini adalah program yang berupaya dalam menanggulangi permasalahan lingkungan melalui perbaikan infrastruktur maupun pembangunan infrastruktur baru. Program tersebut bertujuan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat seperti rob dan kekumuhan. Program tersebut antara lain Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan rob dan Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2*) yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kekumuhan lingkungan yang menjadi salah satu akibat dari rob.

Implementasi dari program-program tersebut seharusnya mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga kerentanan dapat berkurang. Kerentanan masyarakat terhadap rob berkurang apabila sensitivitas masyarakat berupa masalah kemiskinan dan lingkungan kumuh serta intensitas paparan berupa rob juga berkurang. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya kualitas hidup masyarakat, membaiknya kualitas lingkungan, berkurangnya intensitas kejadian rob, dan berkurangnya dampak merugikan akibat rob. Namun, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan program-program tersebut belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kelurahan Bandarharjo. Saat ini, masih ditemukan beberapa titik atau lokasi yang masih mengalami rob dan kekumuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menilai keberhasilan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 dari segi kebermanfaatannya bagi masyarakat Kelu-

rahan Bandarharjo dan dampaknya dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap rob. Hasil penelitian yang berupa penilaian terhadap kebermanfaatan dari implementasi program-program tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dan serupa.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang yang terdiri dari 12 RW (Rukun Warga). Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berkaitan dengan jenis data dan teknik analisis data. Data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data lebih lanjut yaitu analisis skoring dengan menilai keberhasilan program pada kriteria dampak, keberlanjutan, dan responsivitas.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh KK di Kelurahan Bandarharjo yang berjumlah 4914 KK. Sampel atau responden pada penelitian ini adalah KK yang menerima manfaat dari adanya Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2. Penelitian ini menggunakan teknik sampling random sampling (*Disproportionate Stratified Random Sampling*). Tingkat error yang digunakan yaitu 10 persen. Perhitungan dengan Rumus Slovin menghasilkan ukuran sampel sebesar 98 KK. Penentuan ukuran sampel pada tiap kelompok penerima manfaat program kemudian dilakukan dengan menggunakan konstanta atau faktor pengali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan ukuran sampel yang proporsional karena setiap program memiliki jumlah populasi yang ber variasi.

$K = n/N$, dimana n adalah ukuran sampel dan N adalah ukuran populasi, sehingga didapatkan Konstanta = 0,02.

Tabel 1.
Ukuran Sampel Program (Lingkup RW)

Kelompok	RW	Jumlah KK	K	Sampel RW
P1	I	530	0,02	11
	II	580	0,02	12
	III	395	0,02	8
	IV	411	0,02	8
P2	V	414	0,02	8
	VI	587	0,02	12
	VII	269	0,02	5
	VIII	408	0,02	8
P3	IX	525	0,02	10
	X	338	0,02	7
	XI	203	0,02	4
	XII	254	0,02	5
Total		4914		98

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Keterangan:

P1: Kelompok penerima manfaat Program NUSP-2

P2: Kelompok penerima manfaat Program NUSP-2 dan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang

P3: Kelompok penerima manfaat Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang

Berdasarkan jumlah sampel atau responden dari penyebaran kuesioner tersebut, maka jumlah kuesioner untuk menghimpun data pada masing-masing program dijabarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Jumlah Responden dan Data Kuesioner

Kelompok Populasi	Jumlah Responden	Jumlah Kuesioner	
		Sistem Polder Kali Semarang	Program NUSP-2
P1 (RW I)	11	0	11
P2 (RW II, III, IV, V, VI, VII, VIII)	61	61	61
P3 (RW IX, X, XI, XII)	26	26	0
Total	98	87	72

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Analisis skoring dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dengan menilai implementasi program melalui indikator-

indikator dari kriteria dampak, keberlanjutan, dan responsivitas. Skor didapatkan dari persepsi responden yang terkumpul dalam bentuk skala likert. Pada skala ini, terdapat lima jenis pernyataan atau jawaban responden terhadap item pertanyaan atau indikator penilaian, yaitu 'Sangat Setuju' (SS), 'Setuju' (S), 'Kurang Setuju' (KS), 'Tidak Setuju' (TS), dan 'Sangat Tidak Setuju' (STS). Pernyataan 'Sangat Setuju' mendapatkan skor tertinggi yaitu lima (5) dan pernyataan 'Sangat Tidak Setuju' mendapatkan skor terendah yaitu satu (1). Kriteria dan indikator penilaian keberhasilan program dijelaskan dalam Tabel 3.

Hasil akhir tingkat keberhasilan program didapatkan dengan menghitung skor rata-rata pada setiap indikator dan menjumlahkan skor rata-rata setiap indikator pada masing-masing kriteria.

$$\text{Tingkat Keberhasilan Kriteria A} = \frac{1A}{1} + \frac{2A}{2} + \frac{3A}{3} + \frac{4A}{4} + \frac{5A}{5}$$

$$\text{Tingkat Keberhasilan Kriteria B} = \frac{1B}{1} + \frac{2B}{2} + \frac{3B}{3} + \frac{4B}{4} + \frac{5B}{5}$$

$$\text{Tingkat Keberhasilan Kriteria C} = \frac{1C}{1} + \frac{2C}{2} + \frac{3C}{3} + \frac{4C}{4} + \frac{5C}{5}$$

$$\text{Tingkat Keberhasilan Keseluruhan} = A + B + C$$

Skor rata-rata merepresentasikan seberapa berhasil program-program pembangunan menurut persepsi masyarakat Kelurahan Bandarharjo berdasarkan rentang interval tingkat keberhasilan program pada Tabel 4. Rentang interval tingkat keberhasilan program didapatkan melalui perhitungan rumus berikut:

$$\text{Rentang Interval} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah kategori}}$$

Keterangan:

Nilai tertinggi = Skor tertinggi (5) x Banyaknya indikator

Nilai terendah = Skor terendah (1) x Banyaknya indikator

Jumlah kategori = Tingkatan keberhasilan program = 5

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kejadian Rob

Rob di Kelurahan Bandarharjo telah terjadi selama bertahun-tahun. Pratikno & Handayani (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa

Tabel 3.
Kriteria dan Indikator Penilaian Keberhasilan Program

Kriteria	Indikator
A. Dampak Parameter: membaiknya aspek-aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola Referensi: KEHATI (2017), Isdijoso et al. (2016), Hermawati et al. (2015), Ratnasari & Manaf (2015), Yoo et al. (2014), Wirawan (2011), PP No. 39/2006	1A. Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat membaik 2A. Kondisi tempat tinggal masyarakat membaik 3A. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, listrik, air minum, dan air bersih) masyarakat meningkat 4A. Kualitas pendidikan masyarakat membaik 5A. Kualitas kesehatan masyarakat membaik 6A. Besaran pendapatan masyarakat meningkat 7A. Kerugian akibat rob berkurang 8A. Intensitas kejadian rob berkurang
B. Keberlanjutan Parameter: fungsi program, manfaat, dan dampak akan berlanjut jangka panjang setelah program selesai Referensi: KEHATI (2017), McLeroy et al. (2017), Hutchinson (2010), PP No. 39/2006	1B. Masyarakat mampu mengoperasikan dan memelihara alat pada program 2B. Masyarakat mampu mengelola program secara swadaya setelah program selesai dilaksanakan 3B. Masyarakat dapat tetap menerima manfaat jangka panjang setelah program selesai dilaksanakan 4B. Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan 5B. Pemimpin masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program
C. Responsivitas Parameter: menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok sasaran Referensi: Ratnasari & Manaf (2015), Simatupang & Akib (2011), Dunn (2003), Winarno (2002)	1C. Program sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2C. Program tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat 3C. Masyarakat mendukung keberadaan program 4C. Masyarakat memberikan kritik dan saran kepada pelaksana program 5C. Pelaksana program memberikan umpan balik kepada masyarakat

Tabel 4.
Rentang Interval Tingkat Keberhasilan Program

Tingkat	Rentang Interval			
	Kriteria A	Kriteria B	Kriteria C	Keseluruhan
STB	8 – 14,4	5 - 9	5 – 9	18 – 32,4
TB	14,41 – 20,8	9,01 – 13	9,01 – 13	32,41 – 46,8
KB	20,81 – 27,2	13,01 - 17	13,01 – 17	46,81 – 61,2
B	27,21 – 33,6	17,01 - 21	17,01 – 21	61,21 - 75,6
SB	33,61 - 40	21,01 - 25	21,01 – 25	75,61 – 90

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Keterangan:

STB : Sangat Tidak Berhasil

TB : Tidak Berhasil

KB : Kurang Berhasil

B : Berhasil

SB : Sangat Berhasil

rob di Kelurahan Bandarharjo telah terjadi sejak tahun 1985 dan terus terjadi setiap tahunnya hingga saat ini. Penyebab rob di Kelurahan Bandarharjo yaitu kenaikan muka air laut

(*sea level rise*) sebagai dampak dari pemanasan global dan jenis tanah yang dimiliki kelurahan ini yang berupa tanah alluvial pasir dan lempung yang terus menerus mengalami penurunan

20 cm per tahun akibat dari penggunaan air tanah yang dilakukan secara berlebihan (Ariandini et al., 2016). Rob terjadi pada saat-saat tertentu seperti pada saat bulan purnama (air laut pasang) atau bulan-bulan tertentu seperti Mei hingga Oktober. Data kejadian rob disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Data Kejadian Rob di Kelurahan Bandarharjo

Tahun	Lokasi Genangan	Durasi	Ketinggian Genangan
2014	RW I	24 jam	20 cm
	RW IV	24 jam	30-40 cm
	RW V	2-3 jam	10 cm
	RW VIII	1 jam	30-40 cm
	RW X	2-3 jam	30-40 cm
2019	RW I	5 jam	15-35 cm

Sumber: (Hasil Wawancara, 2019)

Sejak lima tahun terakhir hingga saat ini, daerah yang masih terpapar rob adalah RW I yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara dan timurnya. Sementara itu, RW lain yang berada lebih selatan dan dibatasi oleh Jalan Raya Pantura kondisinya sudah lebih baik dan terhindar dari rob. Faiqoh et al. (2017) pada penelitiannya juga mengungkapkan bahwa saat ini hanya RW I yang masih terpapar rob karena letaknya tidak terjangkau oleh *polder* air dan tanggul sungai.

Rob yang masih terjadi di RW I Kelurahan Bandarharjo biasanya disebabkan oleh air laut yang masuk ke perkampungan melalui saluran drainase tersier yang terhubung dengan saluran drainase sekunder di sepanjang Jalan Komodor Laut Yos Sudarso. Drainase sekunder ini sebenarnya memiliki dua buah pompa air, namun warga menyatakan bahwa pompa tersebut tidak mampu beroperasi. Namun, rob sudah semakin berkurang setelah terbangunnya tanggul laut di sepanjang Jalan Komodor Laut Yos Sudarso yang juga berfungsi sebagai tempat bersandar kapal-kapal nelayan.

2. Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang

Rob yang terjadi di wilayah pesisir utara Kota Semarang memasuki daratan melalui sungai yang terbagi ke dalam beberapa sistem drainase. Kota Semarang terbagi ke dalam empat wilayah sistem drainase, yaitu Wilayah Sistem Drainase Mangkang, Semarang Barat, Semarang Tengah, dan Semarang Timur (BBWS Pemali Juana, 2012). Pemerintah Kota Semarang kemudian melakukan upaya penanggulangan masalah rob melalui berbagai cara, salah satunya yaitu pembangunan *polder* atau sistem drainase tertutup di beberapa wilayah sistem drainase tersebut. Hingga saat ini, Kota Semarang memiliki lima *Polder* utama yaitu *Polder* Tawang, *Polder* Kali Semarang, *Polder* Banger, *Polder* Sringin, dan *Polder* Tenggang.

Sistem *Polder* Kali Semarang merupakan salah satu *polder* yang paling awal dibangun untuk menangani masalah rob. Pembangunan *polder* ini dilakukan oleh Dinas SDA dan Dinas Cipta Karya Kementeriaan PUPR Provinsi Jawa Tengah. *Polder* yang mulai beroperasi pada tahun 2014 ini melayani sub-sub sistem drainase yang terdiri dari Kali Bulu, Kali Asin, Kali Semarang, Kali Baru, Kali Bandarharjo, dan Kali Simpang Lima. Tujuan pembangunan *polder* ini yaitu untuk menghalangi air laut masuk ke bagian tengah kota melalui jaringan sungai tersebut. Pada muara Kali Semarang kemudian dibangun sistem *polder* yang terdiri dari tanggul, kolam retensi, dan pompa air. Air yang berasal dari kiriman sungai-sungai di Wilayah Sistem Drainase Semarang Tengah akan ditampung dalam kolam retensi untuk akhirnya dipompa keluar menuju laut.

Wilayah Kelurahan Bandarharjo diapit oleh Kali Semarang di sebelah timur dan baratnya. Kali Semarang merupakan salah satu kanal yang langsung bermuara ke laut, sehingga wilayah yang berada di sekitar muara Kali Semarang mudah terkena luapan baik dari rob maupun air hujan kiriman dari wilayah Semarang Atas. Pemerintah Kota Semarang kemudian melakukan upaya pengurangan resiko rob dengan mem-

buat sistem drainase tertutup pada kedua muara Kali Semarang. Pada bagian muara Kali Semarang bagian timur (Kalibaru timur), muara kali ditanggul dengan tanah, sehingga limpasan air hujan tidak dapat memasuki laut dan air laut tidak dapat memasuki kali. Kemudian pada muara kali bagian baratnya inilah lokasi dibangunnya *Polder* Kali Semarang.

3. Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading Shelter Project Phase 2*)

Kelurahan Bandarharjo merupakan satu dari 62 kelurahan di Kota Semarang yang kumuh menurut SK Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang. Kelurahan Bandarharjo memiliki kriteria permukiman kumuh yang terdiri dari: kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan limbah, kondisi pengelolaan sampah, kondisi pengamanan kebakaran, dan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH). Selain kumuh, sebesar 36 persen dari keseluruhan lahan di Kelurahan Bandarharjo digunakan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pemerintah Kota Semarang melalui Program NUSP-2 (*Neighborhood Upgrading and Shelter Project*) bersama Ditjen Cipta Karya Kementeriaan PUPR berusaha untuk mengurangi kekumuhan di Kelurahan Bandarharjo. Kelurahan Bandarharjo menjadi prioritas ketiga penanganan permukiman kumuh. Strategi penanganan yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan layanan infrastruktur sesuai SPM dan memperbaiki kualitas rumah kumuh serta meningkatkan penghidupan masyarakat miskin.

Program NUSP-2 dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan menggunakan dana bantuan dari ADB (Asian Development Bank). Kota Semarang sendiri menjadi bagian Program NUSP fase kedua. Lokasi pelaksanaan program ini ditetapkan melalui SK Walikota Nomor 050/801/2014 yang menetapkan ke-

lurahan-kelurahan yang termasuk kumuh dan perlu penanganan, sehingga Kelurahan Bandarharjo termasuk kelurahan yang mendapatkan manfaat dari Program NUSP-2 ini.

Program NUSP-2 di Kelurahan Bandarharjo merupakan program dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), yaitu pelaksana program secara langsung berhubungan dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) se-tempat untuk mengelolanya. Di Kelurahan Bandarharjo, program ini dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2018. Tidak semua wilayah kelurahan mendapatkan Program NUSP-2, beberapa diantaranya yang termasuk wilayah deliniasi penerima program ini yaitu RW I hingga RW VIII. Bentuk bantuan yang diterima masyarakat berupa perbaikan kualitas lingkungan melalui perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan lampu jalan, pembangunan MCK umum, penyediaan tempat sampah, dan pembuatan taman toga dan sayuran.

4. Tingkat Keberhasilan Program Penilaian Kriteria Dampak

Penelitian ini menggunakan kriteria dampak sebagai acuan dalam menilai seberapa besar masyarakat merasakan dampak atau manfaat dari program-program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari adanya program diukur pada aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dianggap rentan terhadap rob, seperti aspek lingkungan, tempat tinggal, kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Selain pada aspek kehidupan masyarakat, dampak program juga diukur pada aspek penanggulangan rob. Program yang sudah dilaksanakan selain harus mampu memberikan manfaat kesejahteraan pada masyarakat, juga harus mampu menanggulangi permasalahan rob. Pengukuran aspek penanggulangan rob dilakukan dengan menilai seberapa berkurangnya kerugian yang dialami masyarakat akibat rob setelah program dilaksanakan dan seberapa berkurangnya intensitas kejadian rob setelah program dilaksanakan. Hasil analisis skoring pada kriteria dampak disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Analisis Skoring Kriteria Dampak

Indikator	Skor Rata-Rata	
	Polder Kali Semarang	Program NUSP-2
Kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat membaik	4,36	3,96
Kondisi tempat tinggal masyarakat membaik	3,90	3,71
Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, listrik, air minum, dan air bersih) masyarakat meningkat	3,25	3,26
Kualitas pendidikan masyarakat membaik	3,75	3,69
Kualitas kesehatan masyarakat membaik	3,98	3,96
Besaran pendapatan masyarakat meningkat	3,01	3,06
Kerugian akibat rob berkurang	4,48	3,96
Intensitas kejadian rob berkurang	4,63	3,96
Total Skor	31,36	29,56
Tingkat Keberhasilan	Berhasil	Berhasil

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa kedua program memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat berupa membaiknya kondisi lingkungan dan tempat tinggal mereka. Selain membaiknya kondisi lingkungan dan tempat tinggal, masyarakat juga merasa bahwa kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi lebih baik setelah kedua program terlaksana. Masyarakat merasa bahwa program-program tersebut memberikan dampak atau manfaat yang cukup signifikan pada aspek lingkungan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Pada aspek penanggulangan rob, masyarakat merasa setelah adanya *Polder Kali Semarang*, kerugian akibat rob dan intensitas kejadian rob sangat berkurang. Program NUSP-2 juga mendapatkan jawaban yang rata-rata positif dari masyarakat pada kedua indikator ini. Namun, Program NUSP-2 mendapatkan skor yang lebih rendah pada kedua indikator ini daripada Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat merasa adanya *Polder Kali Semarang* lebih besar dirasakan dampak atau manfaatnya dalam menanggulangi permasalahan rob dibandingkan dengan Program NUSP-2.

Berbeda dengan keenam indikator di atas, indikator kemampuan pemenuhan kebutuhan

hidup dan pendapatan pada kedua program mendapatkan jawaban masyarakat yang lebih bervariasi. Bagi masyarakat yang bermata-pencarian dengan membuka warung atau usaha di rumahnya, adanya kedua program tersebut cukup berdampak pada peningkatan besaran pendapatan mereka. Setelah rob berkurang, aktivitas perdagangan dan usaha mereka menjadi lebih mudah, sehingga pendapatan mereka juga meningkat. Namun, berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak memiliki usaha di rumahnya dan bekerja jauh dari lokasi tempat tinggal mereka. Kedua program ini tidak berpengaruh pada besaran pendapatan mereka karena jenis pekerjaan mereka tidak bergantung pada ada atau tidaknya kejadian rob.

Penilaian Kriteria Keberlanjutan

Kriteria keberlanjutan merupakan salah satu kriteria yang juga menentukan keberhasilan program, karena program yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Umumnya, untuk membuat suatu program berkelanjutan, penerima manfaat harus terlibat dalam pelaksanaannya. Hasil analisis skoring pada kriteria keberlanjutan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Analisis Skoring Kriteria Keberlanjutan

Indikator	Skor Rata-Rata	
	Polder Kali Semarang	Program NUSP-2
Masyarakat mampu mengoperasikan dan memelihara alat pada program	2,63	2,25
Masyarakat mampu mengelola program secara swadaya setelah program selesai dilaksanakan	2,61	3,03
Masyarakat dapat tetap menerima manfaat jangka panjang setelah program selesai dilaksanakan	4,09	3,74
Masyarakat mampu menutup biaya operasional dan pemeliharaan setelah program selesai dilaksanakan	2,55	3,71
Pemimpin masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan program	3,24	3,69
Total Skor	15,12	16,42
Tingkat Keberhasilan	Kurang Berhasil	Kurang Berhasil

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Hasil analisis scoring pada kriteria keberlanjutan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang, masyarakat belum mampu mengoperasikan dan memelihara alat pada program serta mengelola program secara swadaya setelah program selesai terlaksana. Namun, beberapa orang masyarakat meyakini bahwa beberapa pekerja di stasiun pompa drainase (*polder*) merupakan warga Kelurahan Bandarharjo. Bagaimanapun juga, biaya operasional dan pemeliharaan seluruh alat pada Sistem *Polder* Kali Semarang merupakan tanggung jawab dari pemerintah, sehingga wajar jika ketiga indikator pada program ini mendapatkan skor yang rendah. Pada Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang, partisipasi masyarakat Kelurahan Bandarharjo memang tidak terlihat karena pemerintah melaksanakan program ini secara sepenuhnya. Pemerintah bertanggungjawab secara penuh karena permasalahan tersebut menyangkut lingkup wilayah yang luas. Walaupun demikian, sebagian masyarakat merasa sebelum pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang, para pemimpin masyarakat setidaknya sudah terlibat dalam hal penyampaian aspirasi dan sudah ada sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait pembangunan tangkul di Kalibaru yang lokasinya dekat dengan permukiman RW VIII, RW IX, dan RW X.

Pada pelaksanaan Program NUSP-2, masyarakat belum mampu mengoperasikan dan memelihara alat pada program. Masyarakat juga belum mampu mengelola program secara swadaya dan menutup biaya operasional serta pemeliharaan. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pihak yang membangun jalan, drainase, dan sebagainya sepenuhnya adalah pihak pemerintah. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan warga yang merupakan salah satu anggota Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) BKM Bandarharjo, tenaga proyek yang membangun jalan, drainase, dan sebagainya pada Program NUSP-2 terkadang merupakan warga Bandarharjo sendiri.

Sebagian dari masyarakat Bandarharjo menyatakan bahwa mereka memelihara hasil fisik dari Program NUSP-2 dalam bentuk bersih-bersih dan kerja bakti pada waktu-waktu tertentu. Namun, ada pula RT dan RW yang masih jarang melakukan kerja bakti, sehingga hasil fisik dari Program NUSP-2 masih ada yang kurang terpelihara. Pada Program NUSP-2 ini, para pemimpin masyarakat (Ketua RT dan RW) sudah terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan pihak BKM seringkali melakukan sosialisasi bersama dengan para Ketua RT dan RW baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Ketua RT juga biasanya

ikut mengawasi dan menjaga bahan material yang akan digunakan dalam proses konstruksi di wilayahnya. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah pencurian terhadap bahan material oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Penilaian Kriteria Responsivitas

Kriteria responsivitas digunakan untuk mengetahui apakah program-program yang te-

lah dilaksanakan sudah tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kriteria ini juga digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat memberikan respon positif terhadap keberadaan program. Jika masyarakat memberikan respon positif berupa dukungan terhadap program, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut berhasil. Hasil analisis skoring pada kriteria responsivitas disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Hasil Analisis Skoring Kriteria Responsivitas

Indikator	Skor Rata-Rata	
	Polder Kali Semarang	Program NUSP-2
Program sesuai dengan kebutuhan masyarakat	3,99	3,82
Program tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat	4,26	3,86
Masyarakat mendukung keberadaan program	4,49	4,07
Masyarakat memberikan kritik dan saran kepada pelaksana program	2,68	3,01
Pelaksana program memberikan umpan balik kepada masyarakat	2,51	2,65
Total Skor	17,93	17,41
Tingkat Keberhasilan	Berhasil	Berhasil

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Hasil analisis skoring pada kriteria responsivitas menunjukkan bahwa kedua program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah tepat dalam menyelesaikan permasalahan rob di Kelurahan Bandarharjo. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa kejadian rob dan luasan permukiman kumuh memang sudah semakin berkurang setelah adanya kedua program. Hampir secara keseluruhan masyarakat Kelurahan Bandarharjo mendukung adanya kedua program ini dan mereka merasa terbantu oleh adanya kedua program ini.

Walau mendapat dukungan positif dari masyarakat, pada pelaksanaan Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang, masyarakat masih jarang sekali menyampaikan aspirasinya kepada pelaksana program. Hal ini dikarenakan lokasi *polder* yang cukup jauh dari jangkauan permukiman masyarakat dan secara birokrasi pihak pelaksana program juga tidak mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain

itu, program ini juga tidak hanya ditargetkan kepada masyarakat Kelurahan Bandarharjo, tetapi untuk lingkup yang lebih luas. Ada gap cukup besar antara masyarakat dan pelaksana program, sehingga sulit untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bagaimanapun juga, sebagian besar masyarakat Kelurahan Bandarharjo sangat mendukung program ini, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi menyampaikan kritik atau saran dalam bentuk apapun kepada pelaksana program. Oleh karenanya, selama ini belum ada *feedback* apapun dari pihak pelaksana program karena belum ada masukan yang berarti dari masyarakat.

Pada pelaksanaan Program NUSP-2, sebagian dari masyarakat merasa sudah pernah memberikan masukan berupa kritik atau saran kepada pelaksana program, walaupun awalnya mereka memberikan masukan melalui RT atau RW terlebih dahulu. Biasanya, masyarakat menyampaikan saran atau kritik saat terjadi keru-

sakan pada jalan atau saluran drainase yang berada di dekat tempat tinggal mereka. Pada Program NUSP-2, penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada pelaksana program memang lebih mudah dilakukan karena pelaksana program yang merupakan Kementerian PUPR juga telah memberikan sebagian wewenang pengelolaannya kepada pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Bandarharjo. BKM ini menjembatani masyarakat dengan pelaksana program, sehingga gap yang ada tidak sebesar Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang. Walaupun demikian, masyarakat merasa masukan-masukannya belum terlalu mendapatkan respon atau *feedback* yang positif dari pihak pelaksana. Bagian jalan dan saluran drainase yang telah rusak masih ada yang belum tertangani walaupun masyarakat

sudah menyampaikan keluhannya melalui RT dan RW.

Penilaian Keseluruhan Program

Berdasarkan hasil penjumlahan skor dari ketiga kriteria pada masing-masing program, baik Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang dan Program NUSP-2 termasuk ke dalam kategori ‘Berhasil’ (61,21 - 75,6). Perolehan total skor kedua program tidak terpaut jauh satu-sama lain. Walaupun kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori berhasil, namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk evaluasi lebih lanjut baik oleh pemerintah sebagai pelaksana program maupun masyarakat Kelurahan Bandarharjo sebagai penerima manfaat program.

Tabel 9.
Hasil Analisis Skoring Keberhasilan Program

Kriteria	Skor Rata-Rata		Tingkat
	Polder Kali Semarang	Program NUSP-2	
Dampak	31,36	29,56	Berhasil
Keberlanjutan	15,12	16,42	Kurang Berhasil
Responsivitas	17,93	17,41	Berhasil
Total Skor	64,41	63,39	Berhasil

Sumber: (Hasil Analisis, 2019)

Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang dan Program NUSP-2 ‘berhasil’ pada penilaian kriteria dampak dan responsivitas. Kedua program dianggap sudah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan tepat dalam menangani masalah rob serta kekumuhan di lingkungan mereka. Namun, kedua program tersebut ‘kurang berhasil’ pada penilaian kriteria keberlanjutan karena masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi mengelola hasil pelaksanaan program secara swadaya.

Diskusi: Program Peningkatan Kualitas Lingkungan sebagai Upaya Adaptasi Proaktif

Pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan di Kelurahan Bandarharjo pada

dasarnya bertujuan untuk menanggulangi permasalahan rob dan kekumuhan lingkungan. Secara keseluruhan setelah adanya kedua program tersebut, kerentanan masyarakat terhadap rob di Kelurahan Bandarharjo semakin berkurang. Kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan membaik. Selain itu, intensitas rob dan dampak merugikan yang ditimbulkan rob juga semakin berkurang. Namun, masyarakat belum dapat merasakan manfaat dari kedua program ini secara maksimal.

Rob di RW I Kelurahan Bandarharjo masih terjadi hingga saat ini karena Sistem *Polder* Kali Semarang tidak menjangkau wilayah tersebut. Pada pelaksanaan Program NUSP-2 di beberapa titik, pembangunan saluran drainase tersier dan peninggian jalan lingkungan juga menyebabkan permasalahan baru bagi masyarakat. Di

RW I, II, IV, dan VIII, saluran drainase masih belum sesuai dengan kebutuhan dan belum mampu mengalirkan air dengan baik. Hal ini karena perlu penyesuaian terhadap anggaran dana yang terbatas sehingga volume drainase lebih kecil dari yang seharusnya. Selain itu, pembangunan di beberapa titik kurang memperhatikan arah aliran air, sehingga pada saat hujan deras, air limpasan tidak mampu mengalir secepatnya ke saluran drainase sekunder dan akhirnya menggenangi permukiman. Peninggian jalan juga menyebabkan permasalahan baru bagi masyarakat yang tidak mampu untuk turut meninggikan lantai rumahnya. Pada saat hujan deras, air limpasan dari saluran drainase dan permukaan jalan yang letaknya lebih tinggi dari lantai rumah akan masuk dan menggenangi rumah-rumah yang lebih rendah.

Program yang telah dilaksanakan masih bersifat reaktif dan belum berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pemerintah terus berupaya membangun saluran drainase, meninggikan jalan, serta membangun tanggul untuk menanggulangi masalah rob di Kelurahan Bandarharjo, namun upaya-upaya ini tidak menyelesaikan akar permasalahan rob yang se-sungguhnya, yaitu penurunan tanah (*land subsidence*) yang masih terus terjadi.

Handayani et al. (2019) dan Sakuntaladewi et al. (2015) mengungkapkan bahwa penanganan bencana seperti penataan fisik dan infrastruktur, hasilnya dinilai tidak lebih dari situasi awal sebelum bencana itu terjadi, sehingga masyarakat pun akan mengalami hal yang sama pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan seringkali bencana yang terjadi lebih parah karena tidak menyelesaikan permasalahan struktural yang dihadapi masyarakat. Tindakan adaptasi yang bersifat fisik tidak akan optimal mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi bila tidak ada penguatan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya adaptasi yang lebih bersifat proaktif dan transformatif, sifatnya lebih antisipatif dan terencana.

Adaptasi yang selama ini dilakukan di Kota Semarang cenderung bersifat reaktif. Intervensi/inisiatif yang dilakukan terkon-sentrasi pada upaya mengatasi masalah yang timbul (Handayani et al., 2019). Sementara, upaya adaptasi yang ideal juga meliputi adaptasi yang bersifat proaktif yaitu adaptasi yang dilakukan sebelum teridentifikasi masalah (i.e. bencana atau dampak perubahan iklim) (Mochamad, 2013). Handayani et al. (2019) dan Watkiss et al. (2010) meyakini bahwa upaya adaptasi yang dilakukan secara dini dapat mengurangi biaya adaptasi di masa mendatang dan penanggulangan bencana yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan upaya yang lebih berorientasi jangka panjang untuk mengantisipasi permasalahan utama di Kelurahan Bandarharjo dan mencari solusi yang lebih tepat untuk menanganinya. Pemerintah perlu melakukan upaya adaptasi yang mencegah terjadinya penurunan tanah agar tidak semakin parah. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah di wilayah yang rentan terhadap penurunan tanah.

D. Penutup

Kesimpulan: Implementasi Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang dan Program NUSP-2 di Kelurahan Bandarharjo termasuk ke dalam kategori ‘berhasil’ dalam mengurangi kerentanan masyarakatnya terhadap rob. Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang dan Program NUSP-2 berhasil memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat Bandarharjo. Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang berhasil mengurangi intensitas rob secara signifikan dan Program NUSP-2 berhasil menanggulangi keku-muhan lingkungan permukiman. Setelah rob dan kekumuhan berkurang, kualitas kehidupan masyarakat pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi jauh lebih baik. Selain berhasil memberikan manfaat yang cukup besar, masyarakat juga menganggap Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Sema-

rang dan Program NUSP-2 sudah tepat dalam menanggulangi permasalahan rob di Kelurahan Bandarharjo.

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang didukung oleh ketersediaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur penanggulangan Rob yang memadai. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sistem polder tersebut dan berharap sistem polder tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan Program NUSP-2 didukung oleh kelembagaan yang kuat dari BKM dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai untuk membangun infrastruktur permukiman sesuai SPM. Keberhasilan kedua program tersebut juga tidak luput dari dukungan masyarakat dan keterlibatan pemimpin masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Keberhasilan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 belum mencapai tingkat maksimal karena kedua program tersebut masih kurang berkelanjutan. Pada Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan hasil pelaksanaan program masih kurang. Pemerintah sebagai pelaksana program juga masih kurang menjalin komunikasi dengan masyarakat. Pada Program NUSP-2, keterlibatan dan kepedulian masyarakat untuk memelihara hasil pelaksanaan program secara swadaya masih belum terlihat. Pendanaan program masih lemah karena hanya bergantung pada satu sumber yaitu ADB (*Asian Development Bank*).

Rekomendasi: Pemerintah perlu menciptakan program lanjutan yang lebih kreatif agar keberlanjutan Program Pembangunan Sistem *Polder* Kali Semarang dan Program NUSP-2 optimal. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keguyuban di masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan. Masyarakat juga perlu terlibat dalam pengawasan dan pemeliharaan sungai, tanggul sungai, pintu air, dan rumah-rumah pompa. BKM diharapkan dapat berperan lebih aktif dengan mencari sumber pendanaan lain untuk memelihara hasil pelaksanaan program, serta melaksanakan program-program lanjutan. Keberlanjutan program dapat lebih terjaga apabila pendanaan program berasal dari berbagai sumber dan tidak hanya bergantung pada satu sumber saja.

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang didukung oleh ketersediaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur penanggulangan Rob yang memadai. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya sistem polder tersebut dan berharap sistem polder tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang. Keberhasilan pelaksanaan Program NUSP-2 didukung oleh kelembagaan yang kuat dari BKM dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai untuk membangun infrastruktur permukiman sesuai SPM. Keberhasilan kedua program tersebut juga tidak luput dari dukungan masyarakat dan keterlibatan pemimpin masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Departemen dan seluruh civitas akademika Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro serta seluruh masyarakat Kelurahan Bandarharjo atas partisipasi dan kerjasamanya dalam penelitian ini.

Pustaka Acuan

- Ariandini, D. W., Utami, S., & Yatnawijaya, B. (2016). Adaptasi Fisik Bangunan Rumah Tinggal di Permukiman Rawan Banjir (Studi Kasus/ : Kelurahan Bandarharjo, Semarang Utara). *Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur*, 4(3).
- BBWS Pemali Juana. (2012). Konsep Pena-nganan Banjir Kota Semarang. Retrieved April 16, 2019, from https://issuu.com/ dimitrijos/docs/penanganan_banjir_semarang
- Birkmann, J., Cardona, O., Carreño, M., Barbat, A., Pelling, M., Schneiderbauer, S., ... Welle, T. (2013). Framing vulnerability, risk and societal responses: the MOVE framework. *Natural Hazards*, 67(2), 193–211. Retrieved from <https://econpapers.repec.org/RePEc:spr:nathaz:v:67:y:2013:i:2:p:193-211>
- Buchori, I., Pramitasari, A., Sugiri, A., Maryono, M., Basuki, Y., & Sejati, A. W. (2018). Adaptation to coastal flooding and inundation: Mitigations and migration pattern in Semarang City, Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 163(July), 445–455. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.07.017>
- Dunn, N. W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faiqoh, F., Sulistiyan, S., & Budiyono, B. (2017). Analisis Hubungan Tingkat Kerentanan Penduduk Wilayah Pantai Kota Semarang Akibat Banjir Rob dengan Status Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(5), 649–658.
- Handayani, W., Fisher, M. R., Rudiarto, I., Setyono, J. S., & Foley, D. (2019). Operationa-lizing resilience: A content analysis of flood disaster planning in two coastal cities in Central Java, Indonesia. *Internation-*

- al *Journal of Disaster Risk Reduction*, 35, 101073. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101073>
- Handayani, W., Hapsari, S. P. I., Mega, A., & Sih, S. J. (2019). Community-based disaster management: Assessing local preparedness groups (LPGs) to build a resilient community in Semarang City, Indonesia. *Disaster Advances*, 12(5), 23–36.
- Handayani, W., Rudiarto, I., Setyono, J. S., Chigbu, U. E., & Sukmawati, A. M. A. (2017). Vulnerability assessment: A comparison of three different city sizes in the coastal area of Central Java, Indonesia. *Advances in Climate Change Research*, 8(4), 286–296. <https://doi.org/10.1016/j.accr.2017.11.002>
- Handoyo, G., Suryoputro, A. A. D., & Subardjo, P. (2016). Genangan Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(1), 55. <https://doi.org/10.14710/jkt.v19i1.601>
- Hermawati, W., Sutarja, I. N., & Nadiasa, M. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin (Rtm) Di Kota Denpasar. *Jurnal Spektran*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.24843/spektran.2015.v03.i02.p09>
- Hutchinson, K. (2010). Literature Review of Program Sustainability Assessment Tools. *The Capture Project*, (604), 1–26. Retrieved from www.communitysolutions.ca
- Isdijoso, W., Suryahadi, H., & Akhmad, A. (2016). *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*.
- KEHATI. (2017). *Kerangka Acuan Kerja Eva-luasi Program TFCA Sumatera*.
- McLeroy, K. R., Rivera, V. D., Watcher, B., Klaus, T., Asheer, S., & Harris, E. (2017). *The OAH Framework for Program Sustainability*. Retrieved from <https://www.hhs.gov/ash/oah/sites/default/files/oah-framework-for-program-sustainability-508-compliant.pdf>
- Mochamad, A. (2013). *Merespon Ancaman Perubahan Iklim: Adaptasi Sebuah Pilihan yang Mendesak dan Prioritas*. Jakarta, Indonesia.
- Mussadun, M., Jannata, P. F., & Islamiyah, F. W. P. (2016). Upaya Adaptasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Menghadapi Bencana Banjir Rob (Studi Kasus: Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang). *Ruang*, 2(4), 331–340. <https://doi.org/10.14710/RUANG.2.4.331-340>
- Pratikno, N. S., & Handayani, W. (2014). Pe-ngaruh Genangan Banjir Rob Terhadap Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Bandarharjo, Semarang. *Teknik PWK*, 3(2), 312–318.
- Ramadhan, A. S., Subardjo, P., & Suryo, A. A. D. (2012). Daerah Rawan Genangan Rob di Wilayah Semarang. *Journal of Marine Research*, 1(2), 174–180.
- Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jmr/article/view/2035>
- Ratnasari, D. J., & Manaf, A. (2015). Tingkat Keberhasilan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal Dan Kota Pekalongan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.14710/jpk.3.1.40-48>
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. , (2006).
- Sakuntaladewi, N., Sari, D. R. K., Laksmi, R., Nugroho, N. P., Wibowo, L. R., Savitri, E., ... Harjadi, B. (2015). *Sintesis Penelitian Integratif Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat terhadap Perubahan Iklim* (Cetakan ke). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan – Kementerian Kehutanan.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–9.
- Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K., & Miller, H. (2007). *Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Watkiss, P., Downing, T., & Dyszynski, J. (2010). *ADAPTCost Project/ : Analysis of the Economic Costs of Climate Change Adaptation in Africa*.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wong, P. P., Losada, I. J., Gattuso, J.-P., Hinkel, J., Khatib, A., McInnes, K. L., ... Sallenger, A. (2014). Climate Change 2014: Coastal systems and low-lying areas. In *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 361–409).
- Yoo, G., Kim, A. R., & Hadi, S. (2014). A methodology to assess environmental vulnerability in a coastal city: Application to Jakarta, Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 102, 169–177. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.09.018>
- Yuwono, B. D., Abidin, H. Z., & Hilmi, M. (2013). Analisa geospasial penyebab penurunan muka tanah di Kota Semarang. *Pro-siding SNST Ke-4 Tahun 2013*, 1–12.

Persepsi Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Public Perception Towards Disability Persons at Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Province

Jefirstson Richset Riwukore¹, Fellyanus Habaora², Yohanes Susanto³, dan Hilda Manafe⁴

¹Universitas Indo Global Mandiri. Jl. Jenderal Sudirman, No.629, Palembang, Indonesia. Kodepos: 30129.

Email: jefiririwukore@gmail.com

²Program Pascasarjana, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Jl. Agatis, Babakan-Dramaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kodepos: 16680.

Email: habaorahomas@yahoo.co.id, mobile: 081290880881

³Universitas Bina Insan Lubuklinggau. Jl. HM Soeharto, Kel. Lubuk Kupang, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kodepos: 31626.

Email:susantoyohanes60@gmail.com, mobile: +6285267038666

⁴Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jl. Jenderal Gatot Subroto no. 6 Senayan Jakarta 10270.

Email: hildamanafe@gmail.com

Diterima tanggal 20 Oktober 2019 di perbaiki tanggal 28 Oktober 2019 di setujui tanggal 20 Desember 2019

Abstract

The public perception research on persons with disabilities was carried out in Kupang City, East Nusa Tenggara for 7 months, from June to December 2018. Determination of respondents' samples used a purposive sampling technique, as many as 51 people. The analysis used primary data and secondary data. Data were analyzed descriptively qualitatively and quantitatively using a frequency distribution table. The results showed that public perceptions on persons with disabilities in Kupang City were: 1) People who experienced biomedical, social and bio-psychosocial discrimination and stereotyping; 2) The city government did not pay as much attention to persons with disabilities as the public assumption that public facilities, government policies and services had not been friendly to people with disabilities yet; (3) The existence of persons with disabilities needed to be protected. The government needed to make friendly and inclusive policies for people with disabilities and to implement protection, empowerment of persons with disabilities and to fulfill their human rights as a commitment.

Keywords: *perception; disability; Kupang.*

Abstrak

Penelitian persepsi publik terhadap penyandang disabilitas dilaksanakan di Kota Kupang Nusa, Tenggara Timur selama 7 bulan, yakni mulai bulan Juni hingga Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik purposive sampling, sebanyak 51 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang adalah: 1) Orang yang mengalami diskriminasi dan stereotype secara biomedis, sosial, dan biopsikososial; 2) Pemerintah kota kurang memperhatikan penyandang disabilitas sebagaimana anggapan publik bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan pemerintah belum ramah bagi disabilitas; (3) Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas serta melaksanakan perlindungan, pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai sebuah komitmen.

Kata Kunci: *persepsi; disabilitas; Kota Kupang*

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada semua manusia, termasuk seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Pemenuhan hak-hak tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban pemerintah, seperti tertuang dalam Pasal 28I UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah. Kemudian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun dalam implementasi kebijakan, penyandang disabilitas masih diperlakukan diskriminatif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah persepsi. Persepsi menjadi indikator utama dalam keberpihakan kebijakan yang ramah disabilitas. Persepsi merupakan tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan disekitarnya sebagai hasil stimulasi pancaindera sebagai pembentukan pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian (Riwukore dan Habaora, 2019; Riwukore et al., 2019^{a,b}). Allensky dan Mashur (2017) menyatakan bahwa disabilitas dan persepsi masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan tetapi beda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada disekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap

keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam hal ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya (Latuconsina, 2014; Setyaningsih dan Gutama, 2016; Syafi'ie, 2017; Poerwanti, 2017). Dengan demikian penyandang disabilitas mengalami diskriminasi dari status mereka secara *biomedis, sosial, dan biopsikososial*.

Keberpihakan pemerintah secara konstitusional pun masih belum maksimal keterpenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini bisa dikaji dari keberpihakan pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, kebijakan yang berpektif disabilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Jamal et al. (2017) menyatakan bahwa pada tataran realita para penyandang disabilitas masih sering mendapat perlakuan diskriminasi dan stigma negatif dari beberapa pihak, salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah masih lemah dalam menerapkan keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas melalui standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya (Ningsih, 2014; Allensky dan Mashur, 2017; Kusumaningrum et al. 2017).

Eksistensi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari pun sering me-

ngalami ketidakadilan dalam mengakses haknya sebagai warga negara. Eksistensi penyandang disabilitas masih belum meratanya pelaksanaan pelayanan publik khususnya untuk penyandang disabilitas fisik (Winurini, 2011; Marwadianto, 2018; Andriani, 2018). Faktor penyebab diskriminasi terhadap eksistensi penyandang disabilitas dikarenakan ketidakpatuhan pihak-pihak serta ketidaktahuan pihak-pihak mengenai adanya aturan tentang hak bagi penyandang disabilitas (Latuconsina, 2014; Lestari et al. 2017; Shaleh, 2018).

Kota Kupang merupakan wilayah otonomi yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Penyandang disabilitas di NTT mencapai 36.600 orang dan kurang lebih 10% dari penyandang tersebut berada dan bertempat tinggal di Kota Kupang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menghasilkan kebijakan ramah disabilitas untuk mencegah dan mengobati dampak diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 7 bulan, yaitu bulan Juni-Desember 2018. Penentuan sampel responden menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono, 2010), dengan pertimbangan penyebaran kelurahan di Kota Kupang, sebanyak 51 kelurahan. Responden diambil secara acak pada setiap kelurahan di Kota Kupang sebanyak satu orang yang telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: (1) pernah bertemu atau sering bertemu dengan salah seorang penyandang

disabilitas, dan atau merupakan penyandang disabilitas itu sendiri, (2) memiliki kemampuan analisis terhadap infrastruktur existing pemerintah yang ramah disabilitas karena terlibat langsung dalam kerja-kerja yang berhubungan dengan disabilitas, (3) bersedia menandatangani surat pernyataan jujur dalam memberi keterangan, (4) pernah membantu penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari selama 2 tahun terakhir; (5) pernah berkunjung ke layanan pemerintah seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, taman rekreasi dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan teknik ini maka responden dalam penelitian ini sebanyak 51 orang, yang terdiri atas responden dengan status penyandang disabilitas sebanyak 21 orang, pengambil kebijakan (Kepala Satuan Perangkat Daerah Kota Kupang) sebanyak 6 orang, dan masyarakat sebanyak 24 orang sehingga total responden menjadi 51 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik wawancara menggunakan kuisioner, dan data sekunder diperoleh menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari internet, laporan statistik, jurnal dan dokumen lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif (kualitatif dan kuantitatif) berdasarkan pengelompokan, penyederhanaan, dan penyajian data seperti penggunaan tabel distribusi frekuensi dan pengukuran dengan menggunakan skala likert. Skala likert merupakan teknik pengukuran metodologi untuk mengetahui sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Penggunaan skala likert ini menghubungkan variabel yang akan diukur dengan dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah persepsi publik dengan parameter yang diukur adalah status menyandang disabilitas, kebijakan pemerintah daerah untuk disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Variabel dan indikator pengukuran variabel penelitian

Variabel	Subvariabel	Indikator
Persepsi	Hambatan menyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Biomedis - Sosial - Biopsikosial
	Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pemkot ramah disabilitas - Kebijakan Pemkot ramah disabilitas - Pelayanan Pemkot ramah disabilitas
	Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi	<ul style="list-style-type: none"> - Kepentingan disabilitas urgen - Penguatan kapasitas disabilitas - Perlindungan penyandang disabilitas - Kebijakan Pemkot berbasis inklusi

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sangat setuju (5)
- b. Setuju (4)
- c. Cukup setuju (3)
- d. Tidak setuju (2)
- e. Sangat tidak setuju (1)

Pengukuran setiap indikator penelitian dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas sebagai berikut:

Dengan asumsi dasar interval kelas dan rentang kelas tersebut dapat dibuat kategori sebagai berikut.

Nilai maksimal = Skor tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Nilai minimal = Skor terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan

Rentang kelas = Jumlah nilai tertinggi - Jumlah nilai terendah / Jumlah Skor

Tabel 2.
Kategori dan rentang kelas skala likert pengukuran persepsi peternak

Kategori	Rentang Kelas			
	Hambatan menyandang disabilitas	Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas	Disabilitas perlu dilindungi	Persepsi publik secara keseluruhan
5. Sangat Setuju	642,7-765	642,7-765	856,9-1020	2143-2550
4. Setuju	520,3-642,6	520,3-642,6	693,7-856,8	1735-2142
3. Cukup Setuju	397,9-520,2	397,9-520,2	530,5-693,6	1327-1734
2. Tidak Setuju	275,5-397,8	275,5-397,8	367,3-530,4	919-1326
1. Sangat Tidak Setuju	153-275,4	153-275,4	204-367,2	510-918

C. Hasil dan Pembahasan (Sesuai Tema Bahasan)

1. Hambatan Menyandang Disabilitas

Paradigma publik terhadap penyandang disabilitas membentuk status penyandang disabilitas. Ada beberapa paradigma publik terhadap hal ini, yaitu model biomedis, model sosial, dan model biopsikososial (Syafi'ie, 2014; Trimaya, 2016). Model biomedis dipengaruhi oleh teori

Barnes yang menyebutkan bahwa disabilitas adalah ketidakberuntungan individu karena kecacatan tersebut merupakan hasil perbuatan tidak etis/dosa, *taboo* atau bentuk sebuah kutukan atau hukuman Tuhan. Model ini juga mencetuskan paradigma terhadap disabilitas semata-mata hanya pada persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan).

Kemudian paradigma biomedis dikritik oleh model sosial yang menyebutkan bahwa adanya struktur sosial (lingkungan) pada kenyataannya telah mencacatkan seseorang karena baik lingkungan fisik maupun sosial telah tidak responsif atau bahkan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Cara pandang ini telah melahirkan marginalisasi, diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka.

Selanjutnya, muncul paradigma yang lebih kontemporer yang melakukan upaya “kompromi” antara model sosial dan model biomedis yang disebut dengan model biopsikososial. Model ini merujuk pada adanya faktor *impairments* yang dialami individu, yang berinteraksi dengan adanya hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal barriers*) dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi penuh dan setara terhadap kelompok penyandang disabilitas. Untuk melihat persepsi publik ter-

hadap penyandang disabilitas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang lebih dipengaruhi oleh model biopsikososial dengan jumlah skor 193, diikuti status biomedis dengan jumlah skor 173 dan kemudian model sosial dengan jumlah skor 126. Persepsi ini menunjukkan bahwa hambatan seseorang ketika menyandang disabilitas di Kota Kupang rentan terdiskriminasi, selain dari hambatan budaya (sikap masyarakat atau *attitudinal barriers*) juga terjadi di lingkungan fisik sehingga penyandang disabilitas tidak diterima atau dibatasi perannya dalam pemenuhan hak sebagai warga negara. Pergeseran persepsi publik terhadap penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian seluruh publik dalam mendukung pemenuhan dan jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Tabel 2
Persepsi publik terhadap status penyandang disabilitas

No.	Indikator	Skor Nilai	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Percentase	
1	Biomedis	5	8	40	23,12	
		4	15	60	34,68	
		3	20	60	34,68	
		2	5	10	5,78	
		1	3	3	1,73	
Jumlah		51		173	100,00	
2	Sosial	5	3	15	11,90	
		4	11	44	34,92	
		3	5	15	11,90	
		2	20	40	31,75	
		1	12	12	9,52	
Jumlah		51		126	100,00	
3	Biopsikososial	5	19	95	49,22	
		4	14	56	29,02	
		3	9	27	13,99	
		2	6	12	6,22	
		1	3	3	1,55	
Jumlah		51		193	100,00	
Total 1+2+3				492	Cukup Setuju	

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bahwa pergeseran paradigma dalam memaknai disabilitas perlu terus digulirkan seiring dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang

bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia. Pemenuhan kebijakan dan intensifikasi peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi, pengaturan regulasi, dan pemenuh-

an pelayanan fasilitas yang ramah disabilitas disegala bidang mampu mengubah persepsi publik bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai perwujudan dari paradigma hak asasi manusia.

Secara umum persepsi publik terhadap hambatan menyandang disabilitas pada kategori “cukup setuju” dengan skor 492. Kondisi ini menjelaskan bahwa warga masih menganggap bahwa seseorang ketika menyandang disabilitas sangat rentan terhadap *stereotype* secara biomedis, sosial, dan biopsikososial.

2. Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas

Perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dapat diketahui dari indikator penyediaan fasilitas, kebijakan dan pelayanan yang ramah terhadap disabilitas. Fasilitas merupakan upaya dari pemimpin atau penguasa untuk mengapresiasi berbagai perspektif, pendapat, atau permasalahan yang dikemukakan oleh anggota/masyarakatnya. Tujuan dari adanya fasilitas adalah untuk mendapatkan solusi atas masalah yang dikemukakan tersebut (Latuconsina, 2014; Haryono et al., 2015). Kemudian pengertian kebijakan menurut James Anderson adalah perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian lain kebijakan berasal dari Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Subarsono, 2012; Latuconsina, 2014; Trimaya, 2016). Sedangkan Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Marwandianto, 2018). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah

diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persepsi publik tentang keberpihakan Pemkot Kupang terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kota Kupang terhadap penyandang disabilitas belum maksimal, dimana persepsi publik secara umum menyatakan bahwa “tidak setuju” jika Pemerintah Kota Kupang telah memperhatikan penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang dalam hal fasilitas pemerintah yang ramah disabilitas, kebijakan pemerintah yang ramah disabilitas, dan pelayanan yang ramah disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kupang perlu menginisiasi dan merevitalisasi fasilitas-fasilitas publik yang ada di Kota Kupang agar ramah disabilitas. Politik anggaran antara pihak pemerintah daerah dengan mitranya di DPRD perlu disinerjikan agar menghasilkan dukungan perbaikan fasilitas publik yang ramah terhadap disabilitas. Selain keberpihakan pemerintah yang ditunjukkan melalui fasilitas publik yang disediakan, kebijakan non fisik yang diimplementasikan harus ramah disabilitas, seperti kebijakan pemerintah Kota Kupang untuk menyediakan usaha ekonomi kreatif bagi penyandang disabilitas, kebijakan anggaran non fisik seperti pemberdayaan penyandang disabilitas disegala sektor. Paradigma personil aparatur pemerintahan perlu ditingkatkan lagi karena masih menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang termarginalkan.

Secara umum persepsi publik tentang Pemkot memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Kupang mengatakan tidak setuju dengan jumlah skor 297. Persepsi publik ini dipengaruhi karena anggapan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum maksimal dari memberlakukan fasilitas yang ramah disabilitas, penerapan kebijakan pro disabilitas yang masih lemah dari pemerintah, dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang masih bersifat diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seharusnya

Tabel 2.
Persepsi publik tentang keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas

No.	Indikator	Skor Nilai	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Percentase
1	Fasilitas Pemkot ramah disabilitas	5	4	20	21,98
		4	2	8	8,79
		3	3	9	9,89
		2	12	24	26,37
		1	30	30	32,97
Jumlah			51	91	100,00
2	Kebijakan Pemkot ramah disabilitas	5	7	35	25,93
		4	1	4	2,96
		3	13	39	28,89
		2	27	54	40,00
		1	3	3	2,22
Jumlah			51	135	100,00
3	Pelayanan Pemkot ramah disabilitas	5	3	15	21,13
		4	1	4	5,63
		3	1	3	4,23
		2	3	6	8,45
		1	43	43	60,56
Jumlah			51	71	100,00

diimplementasikan secara baik oleh setiap warga, terutama pemerintah sebagai upaya untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam implementasi perundang-undangan tersebut. Perhatian pemerintah Kota Kupang untuk jamin, memenuhi, dan memperhatikan penyandang disabilitas melalui suatu produk peraturan perundang-undangan perlu dipertimbangkan, yaitu Perda Tentang Disabilitas. Pemerintah Kota Kupang sampai saat dilakukan penelitian ini belum memiliki Perda tentang Disabilitas.

3. Eksistensi Disabilitas perlu dilindungi

Eksistensi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin, yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada, sehingga pengertian eksistensi adalah apa yang ada, apa yang memiliki, segala sesuatu yang dialami

dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada, dan eksistensi adalah kesempurnaan. Eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang dapat dilihat pada Tabel 3.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang perlu dilindungi karena kepentingan disabilitas sangat urgen, penyandang disabilitas perlu dikuatkan, dan penyandang disabilitas perlu dilindungi dengan jumlah skor nilai 986 (sangat setuju). Persepsi publik ini merujuk pada pemahaman bahwa eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang masih mengalami diskriminasi. Jamal et al. (2017) menyatakan bahwa kenyataannya tidak sedikit para penyandang disabilitas yang menerima perlakuan tidak menyenangkan, stigma negatif serta *stereotip* dari orang-orang sekitar. Dengan demikian kepentingan, penguatan dan perlindungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya pemerintah dalam keberpihakan pemerintah terhadap eksistensi penyandang disabilitas di Kota Kupang.

Tabel 3.
Persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas

No.	Indikator	Skor Nilai	Jumlah Responden	Jumlah Skor	Percentase	
1	Kepentingan disabilitas urgen	5	45	225	90,73	
		4	5	20	8,06	
		3	1	3	1,21	
		2	0	0	0,00	
		1	0	0	0,00	
Jumlah			51	248	100,00	
2	Penguatan disabilitas	5	34	170	74,56	
		4	10	40	17,54	
		3	5	15	6,58	
		2	1	2	0,88	
		1	1	1	0,44	
Jumlah			51	228	100,00	
3	Perlindungan disabilitas	5	51	255	100,00	
		4	0	0	0,00	
		3	0	0	0,00	
		2	0	0	0,00	
		1	0	0	0,00	
Jumlah			51	255	100,00	
Jumlah			51	255	100,00	
Total 1+2+3				986	Sangat Setuju	

Santoso dan Apsari (2017) menyatakan bahwa pendekatan inklusif digunakan dengan makna untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia dengan disabilitas.

4. Persepsi Publik Terhadap Disabilitas

Indikator mengukur persepsi publik terhadap penyandang disabilitas adalah status penyandang disabilitas, keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas. Secara umum indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang pada kategori “cukup setuju” jika penyandang disabilitas di Kota Kupang masih mengalami hambatan stereotipe secara biomedis, sosial, dan psikososial. Kemudian publik menganggap bahwa Pemerintah Kota dalam menyediakan fasilitas, menerbitkan kebijakan, dan melakukan pelayanan ke seseorang berstatus disabilitas belum ramah disabilitas.

Demikian juga persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa publik “sangat setuju” adanya reformasi dan revitalisasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara terhadap penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan dan harakat martabat yang sama dengan siapapun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Kupang terhadap hak asasi manusia dan sebagai makluk ciptaan Tuhan.

Tabel 4.
Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas

Variabel	Sub variable	Nilai	Keterangan
Persepsi	Hambatan menyandang disabilitas	492	Cukup Setuju
	Pemkot Memperhatikan Penyandang Disabilitas	297	Tidak Setuju
	Eksistensi penyandang disabilitas perlu dilindungi	986	Sangat Setuju
Jumlah		1775	Setuju

Secara umum data pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa persepsi publik menyatakan setuju bahwa status penyandang disabilitas masih terdiskriminasi, keberpihakan pemerintah masih rendah terhadap penyandang disabilitas, dan eksistensi penyandang disabilitas belum menjadi perhatian pemerintah.

D. Penutup

Kesimpulan: Persepsi publik terhadap penyandang disabilitas di Kota Kupang masih menganggap bahwa seseorang yang menyandang disabilitas tentu akan mengalami diskriminasi dan stereotipe secara biomedis, sosial, dan biopsikososial. Kemudian persepsi publik Kota Kupang bahwa fasilitas, kebijakan dan pelayanan oleh pemerintah belum berperspektif ramah disabilitas. Sedangkan persepsi publik terhadap eksistensi penyandang disabilitas perlu lindungi menunjukkan kepentingan disabilitas sangat urgen, penguatan disabilitas sangat penting, perlindungan disabilitas dan kebijakan yang ramah inklusif sangat diperlukan sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Kota Kupang.

Rekomendasi: Peran Pemerintah Kota Kupang untuk mengevaluasi, memahami, dan memperhatikan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui pembenahan infrastruktur pelayanan publik berwawasan disabilitas, namun didahului oleh peningkatan kapasitas aparatur publik terkait perspektif terhadap penyandang disabilitas. Usaha Pemerintah juga perlu ditingkatkan dalam perubahan perspektif publik terhadap penyandang disabilitas sebagai pengakuan akan hak asasi manusia melalui kegiatan-kegiatan pertemuan di tingkat warga.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Jeriko Center Kupang yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada informan penelitian yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penyempurnaan penelitian.

Pustaka Acuan

- Allensky, A., dan Mashur, D. (2017). *Implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)*. *JOM FISIP*, 4(1), 1-9.
- Andriani, N.S. (2016). *Kebijakan responsif disabilitas: Pengarustamaan managemen kebijakan di level daerah, nasional dan international*. *Jurnal Palastren*, 9(1), 189-213.
- Haryono, T.J.S., Koesbardiati, T., dan Mas'udah, S. (2015). *Reproduction health service for disabled females to prevent sexual abuse*. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 80-93.
- Jamal, K., N. Fatah, dan Wilaela. (2017). *Eksistensi kaum disabel dalam perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal Ushuludin*, 25(2), 221-234. doi: 10.24014/jush.v25i2.3916.
- Kusumaningrum, D.N., Afina, O., Agustin, R.A., dan Herwiandini, M. (2017). *Pengaruh ASEAN Disability Forum terhadap pengembangan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia*. *Jurnal Insignia*, 4(1), 13-26.
- Latuconsina, Z. (2014). *Afirmasi kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas*. *Jurnal Pandecta*, 9(2), 203-211.
- Lestari, E.Y., Sumarto, S., dan Isdaryanto, N. *Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CRPD) dalam bidang pendidikan*. *Jurnal Integralistik*, 28(1), 1-9.
- Marwandianto. (2018). *Public transportation services easily accessed by people with disability in human rights perspective*. *Jurnal HAM*, 9(2), 175-190.
- Ningsi, E.R. (2014). *Mainstreaming isu disabilitas di masyarakat dalam kegiatan penelitian maupun*

- pengabdian pada masyarakat di STAIN Kudus. Jurnal Penelitian*, 8(1), 71-92.
- Poerwanti, S.D. (2017). *Pengelolaan tenaga kerja difabel untuk mewujudkan workplace inclusion. Inklusi: Journal of Disability Studies*, 4(1), 1-24. doi:10.14421/ijds.040101.
- Riwukore, J.R., dan Habaora, F. (2019). *Perception of farmers on the performance of extensionist in the pasture agroecosystem of Timor Tengah Utara district. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics dan Sociology (IJAESS)*, 29(2), 1-10. doi: 10.9734/AJAEES/2019/45539.
- Riwukore, J.R., Habaora, F., dan Manafe, H. (2019^a). *Analysis of perception about PSL in Kota Kupang, NTT province, Indonesia In 2017. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 7(1), 1-9.
- Riwukore, J.R., Habaora, F., Hidayanti, S.K., dan Susanto, Y. (2019^b). *The local community perception towards pig farming in Kupang City, East Nusa Tenggara, Indonesia. Asian Journal Science and Technology (AJST)*, 10(5), 9660-9664.
- Santoso, M.B., dan Apsari, N.C. (2017). *Pergeseran paradigma dalam disabilitas. Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166-176. doi: 10.24198/intermestic.v1n2.6.
- Setyaningsih, R., dan Gutama, Th.A. (2016). *Pengembangan kemandirian bagi kaum difabel (Studi kasus pada peran Paguyuban Sehati dalam upaya pengembangan kemandirian bagi kaum difabel di kabupaten Sukoharjo. Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42-52.
- Shaleh, I. 2018. *Implementation of the fulfillment of rights for people with disability in the employment in Semarang. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82. doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>.
- Syafi'iie, M. 2014. *Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jurnal Inklusi*, 1(2), 269-308.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Trimaya, A. 20016. *Ways to respect, protect, and fulfill the rights of persons with disabilities through Law Number 8 of 2006 on persons with disabilities. Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-410.
- Winurini, S. 2011. *Upaya perlindungan penyandang disabilitas dan tantangannya. Buletin Kesejahteraan Sosial*, 3(24), 9-12.

3

Implementasi Metode “TATAP” dalam Meningkatkan Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga

Implementation of the “TATAP” Method in Improving Knowledge of Financial Literacy of Housewives

Uswatun Hasanah¹, Mirdat Silitonga² dan Tetti Manullang³

Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

HP. 081380551255 E-mail: mirdatsilitonga@unj.ac.id

diterima 03 September 2019, diperbaiki 22 November 2019, disetujui 20 Desember 2019

Abstract

Financial literacy knowledge is an important ability for every individual, especially housewives. This study aimed to analyze the differences in the basic ability of financial literacy of housewives before and after being given training with the TATAP method (Know to distinguish between needs and desires; Do not hesitate to invest; Beware or be alert when in debt; Smart to manage finances). This research used a quantitative approach with the experiments method. This study involved 30 housewives in Segaran Village, Batujaya District, Karawang Regency, Indonesia. Participants were selected using purposive sampling technique with the criteria of housewives who borrow money from “Emok Bank”. Data was collected by conducting interviews, analyzing descriptively and carrying out paired sample t-tests. The results showed a significant difference in the basic knowledge of financial literacy of housewives before and after being given training with the TATAP method. The better the financial literacy knowledge of housewives was, the better the ability to manage family finances would be and this would lead to increasing family welfare. Training with the TATAP method was effectively used to increase knowledge of housewives’ financial literacy. The local government should make such a family financial education program that should be carried out periodically considering the fact of the low knowledge of financial literacy of housewives.

Keywords: Emok Bank, financial literacy, housewives, TATAP method

Abstrak

Pengetahuan literasi keuangan merupakan kemampuan yang penting bagi setiap individu, khususnya ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perbedaan kemampuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan pelatihan dengan metode TATAP (Tahu mana kebutuhan dan keinginan; Tidak ragu berinvestasi; Awas saat berhutang; Pintar mengelola keuangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Penelitian ini melibatkan 30 ibu rumah tangga di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Partisipan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria ibu rumah tangga yang melakukan peminjaman uang dari “Bank Emok”. Data dikumpulkan melalui wawancara, dianalisis secara deskriptif dan *paired sample t-test*. Hasil menunjukkan adanya perbedaan signifikan pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan pelatihan dengan metode TATAP. Semakin baik pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga maka kemampuan pengelolaan keuangan keluarga akan semakin baik, dan akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan keluarga. Pelatihan dengan metode TATAP efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga. Pemerintah setempat sebaiknya membuat program edukasi keuangan keluarga yang dibuat secara berkala, mengingat rendahnya pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga.

Kata Kunci: Bank Emok, literasi keuangan, ibu rumah tangga, metode TATAP

A. Pendahuluan

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditemukan bahwa Indeks Li-

terasi Keuangan Nasional 2016 hanya sebesar 29,7%. Menurut survei Bank Dunia (World Bank), Indonesia merupakan negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan pa-

ling lemah setelah India dan Cina dari seluruh negara di dunia. Hal ini menjadi masalah serius bagi negara Indonesia. Keluarga menjadi ujung tombak perekonomian Negara karena sebagian besar perputaran roda perekonomian suatu negara terjadi dalam keluarga. oleh sebab itu, penting bagi sebuah keluarga memiliki literasi keuangan yang baik. Sejalan dengan survei *Financial Literacy Assessment Framework* (OECD INFE, 2012) yang merumuskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor yang fundamental untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Lusardi dan Mitchell (2014); Chen dan Volpe (1998) menyatakan bahwa literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Sementara itu, penelitian Akmal dan Yogi (2016) menemukan bahwa semakin baik literasi keuangan suatu masyarakat/ keluarga maka tingkat kesejahteraannya juga akan semakin meningkat.

Masyarakat Desa Segaran Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang sudah tidak asing lagi dengan transaksi dana pemberian pinjaman modal usaha yang dikelola “Bank Emok”. Bank Emok merupakan rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang relatif besar, yakni 20 persen. Kehadiran Bank Emok di kabupaten Karawang awalnya dianggap sangat membantu karena praktik dana pemberian pinjaman modal usaha yang dikelola oleh bank emok bertujuan membantu usaha kecil masyarakat. Model peminjaman bank emok dilakukan secara berkelompok dengan metode tanggung renteng. Model pembiayaan berkelompok ini sangat membantu bagi kelompok masyarakat yang tidak dapat berhubungan dengan lembaga keuangan formal. Dilain sisi kehadiran bank emok membuat resah, terutama khususnya bagi ibu rumah tangga karena setiap pertemuan peminjam wajib menyetor dan tidak boleh ada alasan apapun untuk tidak memba-

yar cicilan. Bunga pinjaman yang sangat besar membuat masyarakat kesulitan dalam pengembalian pinjaman pada Bank Emok. Hal ini akhirnya membuat masyarakat harus mengupayakan berbagai cara agar bisa memenuhi setoran pinjaman. Warga yang terjerat rentenir Bank Emok, biasanya akan melakukan gali lubang tutup lubang untuk memenuhi setoran pinjaman kepada Bank Emok.

Pelaku usaha ultra mikro yang sulit mendapatkan pinjaman dari perbankan seringkali dimanfaatkan oleh Bank Emok. Keberadaan Bank Emok ini memang lebih mudah dan cepat dalam pencairan pinjaman namun, ketika membayar seringkali mempersulit masyarakat yang meminjamnya karena tingginya bunga yang dipatok. Bunga yang dibebankan kepada masyarakat lebih dari 20%. Oleh karena itu, masyarakat yang menerima pinjaman merasakan kesulitan ketika pengembalian.

Bank Emok memberikan pembiayaan modal bagi pelaku usaha ultra mikro. Uang pinjaman digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha. Namun kerap kali warga melakukan pinjaman uang pada Bank Emok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan digunakan untuk modal usaha. Georgarakos dan Inderst (2014) menyatakan bahwa rumah tangga berhutang sering kali terjadi disaat pengeluaran lebih besar dari pendapatan, sehingga ada usaha untuk memenuhi kekurangan pendapatan tersebut dengan mencari alternatif pinjaman atau hutang, yang menimbulkan konsekuensi untuk melunasi kembali hutang tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, banyak warga yang menjadi korban Bank Emok rumah tangganya hancur atau bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri karena terlilit hutang.

Kegagalan seseorang dalam mengelola keuangan bukan disebabkan karena rendahnya pendapatan seseorang, tetapi lebih pada faktor ketidaktahuan individu dalam mengalokasikan pendapatan pada pos-pos tertentu (Sari, 2015). Kegagalan banyak ibu rumah tangga di Desa Segaran Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang disebabkan oleh warga tidak memiliki

kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, khususnya ibu rumah tangga.

Pendidikan keuangan (*financial education*) bagi ibu rumah tangga dapat digunakan untuk mengatasi rendahnya tingkat “melek keuangan”. Pendidikan keuangan adalah proses yang dapat menghasilkan individu untuk memiliki rencana keuangan di masa depan demi mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan pola dan gaya hidup keluarga. Dengan adanya literasi keuangan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga.

Pemerintah mengalami kesulitan dalam pemberantasan Bank Emok di tengah masyarakat Karawang karena bank emok yang sudah menjamur di wilayah tersebut. Tingginya jumlah permintaan dari masyarakat akan pinjaman uang pada Bank Emok makin memperkuat posisi Bank Emok di tengah masyarakat. Solusi yang ditawarkan Pemerintah seringkali hanya berfokus pada program bantuan permodalan untuk usaha kecil, permasalahan yang terbesar pada rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Karawang, khususnya para ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga. Rendahnya tingkat literasi menyebabkan ibu rumah tangga tidak dapat membedakan keinginan dan kebutuhan, buta akan investasi, membuat keputusan berhutang yang salah, dan ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik. Ibu rumah tangga memerlukan penyuluhan mengenai literasi keuangan, agar kemampuan pengetahuan keuangan keluarga meningkat yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ibu rumah tangga dituntut untuk bisa membagi penghasilan yang diterima dari suami atau gabungan penghasilan suami-istri agar keluarga dapat hidup dengan sejahtera. Ibu rumah tangga harus melek literasi keuangan agar cerdas mengatur keuangan keluarga. Pada pelatihan ini peneliti memperkenalkan metode yang wajib diketahui ibu rumah tangga sehingga cerdas dalam mengelola keuangan keluarga. Empat metode TATAP yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu: 1. Tau mana kebutuhan dan keinginan; 2. Tidak ragu berinvestasi; 3. Awas saat berhutang; 4. Pintar mengelola keuangan.

Peneliti menggunakan pendekatan eksperimen dengan ibu rumah tangga sebagai partisipan. *Treatment* yang digunakan peneliti yaitu metode TATAP dengan melakukan pengamatan pada *pretest* dan *post test* pada partisipan. Rataan literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum diberikan *treatment* sebesar 35,55 dan rataan setelah diberikan *treatment* sebesar 60,00. Hasil menunjukkan bahwa literasi keuangan ibu rumah tangga meningkat setelah diberikan *treatment*. Terdapat perbedaan positif yang signifikan literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan setelah diberikan *treatment* dengan metode TATAP. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dampak peningkatan pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga dari pelatihan dengan metode TATAP yang telah dilakukan oleh peneliti.

Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan solusi program bantuan permodalan bagi masyarakat di daerah karawang, tetapi perlu diseimbangkan dengan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Literasi keuangan dengan metode TATAP dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga. ibu rumah tangga akan mampu melakukan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik dengan menggunakan empat indikator yang dalam metode TATAP. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis mengenai faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi peningkatan literasi keuangan ibu rumah tangga yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang memberikan perlakuan/*treatment* kepada partisipan. Menurut Latipun (2002) penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan

dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Sementara menurut Sukardi (2011) penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat (*causal-effect relationship*).

Penelitian eksperimen dibagi menjadi dua yaitu *true experiment* dan *quasi experiment*. Pendekatan *true experiment* peneliti dapat mengontrol secara penuh semua variabel luar yang dapat memengaruhi jalannya eksperimen, sedangkan pada pendekatan *quasi experiment* peneliti tidak sepenuhnya dapat mengontrol variabel luar yang dapat memengaruhi jalannya eksperimen (Gribbons dan Herman, 1997). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *quasi experiment* karena peneliti tidak dapat mengontrol sepenuhnya variabel lain yang dapat memengaruhi jalannya eksperimen. *Treatment* diberikan kepada responden dengan memberikan pelatihan berupa literasi keuangan dengan menggunakan metode TATAP di kelas kepada semua partisipan secara serentak.

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang yang melakukan peminjaman pada Bank Emok. Teknik pemilihan sampling dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah contoh adalah 30 ibu rumah tangga. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah karakteristik partisipan, pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah *treatment*. Pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga merupakan pemahaman ibu rumah tangga dalam membedakan kebutuhan dan keinginan, berinvestasi, dampak buruk ketika berhutang, dan pengelolaan keuangan keluarga untuk mencapai tujuan keluarga. Pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga diukur sebelum dan sesudah

treatment untuk melihat perbedaan pengetahuan partisipan sebelum dan sesudah diberikan pelatihan literasi keuangan dengan menggunakan metode TATAP.

Pengumpulan data dilakukan melalui *self-report* dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji reliabilitasnya. Karakteristik partisipan terdiri atas usia istri, pendidikan istri, pekerjaan, pendapatan keluarga dan kuesioner TATAP. Usia istri dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan Hurlock (1980) yaitu kelompok usia dewasa awal (18-40 tahun), kelompok dewasa *middle* (41-60 tahun), dan dewasa akhir (> 60 tahun). Pendidikan istri dikategorikan menjadi pendidikan dasar (1-9 tahun), pendidikan menengah (10-12 tahun), dan pendidikan tinggi (> 12 tahun).

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses *editing, coding, scoring, entry data, cleaning data*, kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensia selanjutnya data di interpretasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel dan *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Setelah *entry* dan *cleaning data*, dilakukan pengategorian data terlebih dahulu. Pengategorian dilakukan untuk mempermudah proses analisis. Pada saat melakukan pengolahan data pada variabel literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan *treatment* dengan metode TATAP, kemudian hasil scoring tersebut dijumlahkan pada masing-masing variabel. Skor total kemudian ditransformasikan ke dalam indeks.

Hasil penelitian pada penelitian ini dikategorikan dengan menggunakan *cut off* pengkategorian yaitu 00,0-50,00 dikategorikan rendah, 50,01 – 75,00 dikategorikan sedang dan 75,01 – 100,0. Analisis deskriptif digunakan untuk menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistika inferensia yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan *treatment*.

C. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Ibu Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga sebesar Rp 2.510.00,00 per bulan. Pendapatan keluarga terendah sebesar Rp 500.000,00 dan pendapatan keluarga yang tertinggi sebesar Rp 7.000.000,00. Berdasarkan usia, rata-rata usia ibu rumah tangga berada pada kategori dewasa awal (31,20 tahun). Ibu rumah tangga termuda berusia 20 tahun dan yang ibu rumah tangga tertua 50 tahun. Berdasarkan data karakteristik ibu rumah tangga di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang dapat disimpulkan bahwa seluruh ibu rumah tangga hanya memiliki pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ibu rumah tangga di Desa Segaran berada di jenjang pendidikan yang terendah (Sekolah Dasar). Hal ini mengakibatkan ibu rumah tangga banyak yang tidak mengerti mengenai dampak melakukan peminjaman pada Bank Emok.

Penelitian yang dilakukan oleh Disney dan Gathergood (2013) menyatakan bahwa orang yang memiliki pendidikan rendah, memiliki literasi keuangan yang kurang baik. Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi adalah mereka yang memiliki literasi keuangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Potrich et al., (2015) yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan ia bergabung dengan kelompok dengan tingkat miskin finansial yang lebih tinggi.

Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga

Keluarga belum mendapatkan literasi keuangan yang memadai, khususnya literasi keuangan bagi ibu rumah tangga. Keuangan kelu-

arga biasanya dikelola oleh seorang ibu rumah tangga. Literasi keuangan mutlak dibutuhkan oleh ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga. Krishna *et al* (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan keluarga merupakan proses pengambilan keputusan dalam keluarga dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya. Ida dan Dwinta (2010); Lusardi dan Mitchell (2014) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan yang dapat membantu individu dalam menentukan keputusan-keputusan dalam menentukan produk-produk finansial yang dapat mengoptimalkan keputusan keuangannya. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan literasi keuangan dimiliki oleh keluarga, khususnya ibu rumah tangga.

Berdasarkan temuan pada penelitian ini (Tabel 1) rata-rata literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum diberikan *treatment* sebesar 44,14 dan lebih dari setengah (56,7%) literasi keuangan ibu rumah tangga berada pada kategori rendah. Sementara tidak ada literasi keuangan ibu rumah tangga pada kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan rendahnya literasi keuangan literasi keuangan ibu rumah tangga.

Peneliti memberikan *treatment* berupa pelatihan literasi keuangan, sebelum dilakukan *treatment* dengan menggunakan metode TATAP ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan ibu rumah tangga sangat rendah. Hal ini juga di dukung oleh pendidikan formal partisipan yang hanya sampai tingkat sekolah dasar.

Temuan lain dalam penelitian ini adalah meningkatnya rata-rata literasi keuangan ibu rumah tangga setelah diberikan pelatihan dengan menggunakan metode TATAP menjadi 60,00 dan 70 persen pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga berada pada kategori sedang serta kategori tinggi 20 persen.

Tabel 1.
Sebaran literasi keuangan Ibu Rumah Tangga sebelum dan sesudah diberikan treatment

Kategori	Literasi keuangan			
	Sebelum		Sesudah	
	n	%	N	%
Rendah	17	56,7	3	10,0
Sedang	13	43,7	21	70,0
Tinggi	0	0	6	20,0
Total	30	100,0	30	100,0
Min-Maks	8,88-68,88		35,55-80,0	
Rata-rata ± Std	44,14±14,64		60,00±10,71	

Empat metode TATAP yang diberikan kepada ibu rumah tangga meliputi : 1. Tau mana kebutuhan dan keinginan; 2. Tidak ragu berinvestasi; 3. Awas saat berhutang; 4. Pintar mengelola keuangan. Hal ini menunjukkan pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga. Empat strategi yang diberikan kepada ibu rumah tangga terbukti dapat meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang tepat.

Pertama, Salah satu faktor terbesar ibu gagal mengutamakan memenuhi keinginan dari pada kebutuhan adalah karena tidak bisa menentukan skala prioritas dalam keluarga. Ibu rumah tangga harus mampu menilai mana pengeluran yang merupakan kebutuhan keluarga dan mana pengeluran yang hanya merupakan keinginan semata. Ibu rumah tangga membuat skala prioritas dan tidak tergesa-gesa, membuat keputusan saat melakukan pembelian, maka ibu rumah tangga dapat terhindar dari perilaku keluarga konsumtif.

Strategi yang kedua yaitu tidak ragu dalam berinvestasi. Berinvestasi berarti membuat uang bekerja lebih efektif. Investasi tidak harus besar untuk menjadi berharga. Berinvestasi adalah salah satu cara agar dapat memaksimalkan tabungan dimasa depan. Sejalan dengan pernyataan Silvi dan Yulianti (2013) yang menyatakan bahwa perencanaan dan pengelolaan investasi yang baik dan benar akan mencapai ketentraman dan kenyamanan dalam hidup.

Keuntungan dari memulai investasi sejak dini adalah bahwa investasi dapat tumbuh terus dari waktu ke waktu. Ibu rumah tangga dapat melakukan investasi yang sederhana namun penting untuk diperhatikan guna kesejahteraan keluarga dimasa depan. Investasi yang dimaksud yaitu investasi kesehatan dan investasi pada pendidikan.

Tidak ada seorangpun di dunia ini yang menginginkan menjadi sakit, namun saat penyakit datang, keluarga harus siap menghadapinya. Ibu rumah tangga harus memperhatikan investasi pada kesehatan anggota keluarga. Saat satu anggota keluarga sakit dapat menggunakan asuransi untuk memperoleh fasilitas atau layanan kesehatan.

Ketiga, awas atau waspada ketika berhutang pada bank emok. Ibu rumah tangga sering kali tergiur berbelanja secara kredit, seperti mengambil kredit pada pedagang keliling yang kerap menawarkan barang-barang dagangan dari rumah ke rumah. Demi perabotan rumah tangga, alat kesehatan sampai dengan *cosmetics* juga sering menjadi sasaran berhutang bagi ibu rumah tangga. Dengan melakukan pembelian barang secara kredit, harga yang tawarkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan membeli barang tersebut secara tunai di pasar atau toko. Berhutanglah pada lembaga resmi seperti bank, pegadaian, dan pembiayaan. Hindari peminjaman uang dari rentenir (Bank Emok) karena bunga yang dibebankan sangat besar.

Ibu rumah tangga menjadi pintar mengelola keuangan sebagai strategi yang terakhir dalam metode TATAP. Keluarga dalam mencapai tujuan perlu memiliki perencanaan yang matang. Tujuan utama ibu rumah tangga adalah tingkat kesejahteraan keluarga karena ibu rumah tangga bertanggung jawab langsung dalam mengelola keuangan keluarga. Untuk mencapai kesejahteraan keuangan keluarga, ibu harus pintar dalam mengelola keuangan.

Kunci keberhasilan mengelola keuangan disaat yaitu saat ibu rumah tangga mampu me-nge-loppokkan kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Perencanaan keuangan harus dengan cermat dan cepat dilakukan agar kebutuhan ibu di masa depan tetap dapat terpenuhi. Tahap perencanaan keuangan yang sangat penting yaitu penyusunan anggaran rumah tangga. Anggaran yang sehat adalah ketika jumlah pemasukan sama atau lebih besar dari pada pengeluaran, jangan sampai pengeluaran keluarga lebih besar dari pada pemasukan. Pengeluaran yang lebih besar dari pada pemasukan inilah yang kerap kali membuat ibu rumah tangga berhutang untuk kebutuhan konsumtif.

Anggaran yang sudah dibuat dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola uang, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut. Selain membuat anggaran ibu rumah tangga juga perlu melakukan pencatatan penghasilan dan pengeluaran secara

tertulis sehingga dapat dilakukan pengendalian keuangan oleh ibu rumah tangga.

Uji Beda

Berdasarkan hasil hasil uji beda menggunakan SPSS (Table 2) terdapat perbedaan rataan sebelum (44,14) dan sesudah (60,00) diberikan *treatment*. Pada Tabel 2 menunjukkan mean = 15,85 yang berarti selisih skor pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan *treatment* meningkat sebesar 15,85. Nilai positif bermakna setelah diberikan *treatment* dengan metode TATAP lebih tinggi daripada sebelum diberikan *treatment* dengan metode TATAP. Selanjutnya pada Tabel 3 juga diperoleh std. error yang menunjukkan angka kesalahan baku perbedaan rata-rata. Hasil uji beda t menemukan bahwa ibu rumah tangga sebelum dan sesudah diberikan *treatment* dengan metode TATAP berbeda signifikan ($p=0,000$) dengan nilai $t= 5,58$, $df= 29$. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar literasi keuangan ibu rumah tangga meningkat signifikan setelah diberikan *treatment* dengan pelatihan metode TATAP.

Tabel 2.
Paired Samples Statistics

		Mean	n	Std. Dev	Std. Er
Pair	Sebelum	44,14	30	14,89	2,72
	Sesudah	59,69	30	10,90	1,99

Tabel 3.
Paired Samples Test

Pair	Sesudah - Sebelum	Mean	Std. Dev	Lower	Upper	T	df	Sig.
		15,85	15,55	10,04	21,66	5,58	29	0,000

Kemampuan literasi keuangan dalam keluarga merupakan hal yang penting untuk dikembangkan, khususnya bagi ibu rumah tangga karena dapat dipastikan setiap hari ibu rumah tangga melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan keluarga. Setiap individu memiliki tingkat literasi keuangan yang berbeda-beda

sehingga memengaruhi pengambilan keputusan keuangan dalam keluarga. Dalam penelitian Silvi dan Yulianti (2013) menemukan bahwa pengetahuan literasi keuangan merupakan hal yang penting karena memungkinkan individu untuk memahami pengelolaan keuangan keluarga serta memiliki perilaku penghematan.

Ida dan Dwinta (2010) menyatakan bahwa literasi keuangan dapat membantu individu dalam menentukan keputusan-keputusan dalam menentukan produk-produk finansial yang dapat mengoptimalkan keputusan keuangannya. Apabila pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga semakin baik maka pengambilan keputusan keuangan keluarga akan menjadi baik. Brigham dan Houston (2007) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Sejalan dengan Sabri *et.al* (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengelola keuangan. Widdowson dan Hailwood (2007) berpendapat bahwa literasi keuangan akan memengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi dan mengelola keuangan.

Klapper *et all.* (2015) menyatakan bahwa tanpa memahami dasar-dasar konsep keuangan orang tidak dapat membuat keputusan-keputusan yang dihubungkan dengan pengelolaan keuangan. Orang yang terliterasi keuangan dengan baik, memiliki kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan keuangan yang berhubungan dengan tabungan, investasi, peminjaman, dll. Artinya, semakin baik pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga maka kemampuan pengelolaan keuangannya akan semakin baik, dan hal ini akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan keluarga.

D. Penutup

Kesimpulan: Pendidikan ibu rumah tangga hanya sampai pada jenjang sekolah dasar (SD). Sementara rata-rata usia ibu rumah tangga adalah 31,20 tahun. Rataan pendapatan keluarga sebesar Rp 2.510.000,00. Rataan literasi keuangan ibu rumah tangga sebelum diberikan *treatment* sebesar 35,55 dan rataan setelah diberikan *treatment* sebesar 60,00. Hal ini menunjukkan literasi keuangan ibu rumah tangga meningkat setelah diberikan *treatment*.

Berdasarkan hasil analisis data ditemukan adanya perbedaan positif signifikan literasi

keuangan ibu rumah tangga sebelum dan setelah diberikan *treatment* dengan metode TATAP. Hal ini menunjukkan dampak adanya pelatihan dengan metode TATAP terhadap peningkatan pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.

Rekomendasi: Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan perlu adanya edukasi finansial kepada keluarga, khususnya ibu rumah tangga, mengingat rendahnya pengetahuan literasi keuangan ibu rumah tangga. Peneliti juga menyarankan, khususnya kepada pemerintah setempat melakukan pelatihan literasi keuangan dengan metode TATAP, yakni tau mana kebutuhan dan keinginan; tidak ragu berinvestasi; awas saat berhutang; dan pintar mengelola keuangan. Apabila keempat indikator tersebut dipahami dan dimengerti ibu rumah tangga akan mampu melakukan pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya menganalisis faktor-faktor lain yang memengaruhi peningkatan literasi keuangan ibu rumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Camat Batujaya dan Kepala Desa Segaran atas segala bentuk bantuannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Pustaka Acuan

- OJK. (2016). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Jakarta.
- Akmal, H dan Yogi, E S. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan bisnis Islam*. Volume 1 Nomor 2 Juli- Desember 2016.
- Bonate, P. L. (2000). Analysis of pretest-posttest designs. Chapman and Hall/CRC.
- Brigham dan Houston. (2007). *Essentials of Financial Management: Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto. 2011. Jakarta: Salemba Empat.
- Chen, H & Volpe, RP. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students. *Financial Services Review*, 7(2), 107-128.

- Disney, R., & Gathergood, J. (2013). Financial literacy and consumer credit portfolios. *Journal of Banking & Finance*, 37(7), 2246–2254.
- Georgarakos, D., & Inderst, R. (2014). Financial advice and stock market participation. Available at SSRN 1641302.
- Gribbons, B., & Herman, J. (1997). True and quasi-experimental designs.
- Ida dan Dwinta. C. H. (2010). Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income terhadap Financial Management Behavior. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* Vol. 12 (3), 131-144.
- Klapper, L., Lusardi, A., & Van Oudheusden, P. (2015). Financial Literacy Around the World: Insights from the S&P global finlit survey. *World Bank Development Research Group*, 1-27.
- Krishna, A., Rofaida, R. and Sari, M. (2010). Analisis tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Survey pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia). In Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education (pp. 552-560).
- Latipun, H (2002). *Penelitian Eksperimen*. Malang: UMM Press
- Lusardi, A dan O.S. Mitchell. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*. 52(1), 5–44.
- Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., & Kirch, G. (2015). Determinants of Financial Literacy: Analysis of the Influence of Socioeconomic and Demographic Variables. *R. Cont. Fin. – USP*, São Paulo, 26(69), 362–377.
- Sabri, M. F., Juen, T. T., Othman, M. A., & Rahim, H. A. (2015). Financial Literacy , Financial Management Practices , And Retirement Confidence Among Women Working In Government Agencies/ : A Mediation Model. *The Journal of Developing Areas*, 49(6), 405–412.
- Silvi M & Yulianti N. (2013). Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga di Surabaya. *Journal of Business and Banking*, Vol. 3, No. 1, pp. 57-68.
- Sukardi. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widdowson, D., & Hailwood, K. (2007). Financial literacy and its role in promoting a sound financial system. *Reserve Bank of New Zealand Bulletin*, 70(2).
- World Bank. (2012). *Financial Literacy Assessment Framework*.

Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Rights to Vote for Persons with Mental Disabilities Viewed from the Human Rights Perspective

Tony Yuri Rahmanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email : tonyscooterist@gmail.com, HP. 081905093663

diterima tanggal 13 Desember 2019, direvisi tanggal 22 April 2019, disetujui tanggal 20 Desember 2019

Abstract

The political dynamics in Indonesia at the end of 2018 were warm again due to the issuance of the Circular Letter of the General Election Commission of the Republic of Indonesia which stated that people with mental disabilities had the right to vote so that they were able to be registered as voters. This seemed to lead to diverse opinions in which the government finally accommodated the rights of persons with mental disabilities but on the other hand, it raised concerns for people with mental disabilities whether to use their voting rights properly and correctly or not. The purpose of this paper was to provide a comprehensive understanding of persons with mental disabilities, to describe the legal basis related to the persons with mental disabilities and to describe the right to vote for the persons with mental disabilities in terms of a Human Rights perspective. This was a normative legal research with a qualitative approach that aimed to uncover facts and to present the circumstances, phenomena, and conditions factually that occurred based on literature studies. This writing described that persons with mental disabilities could actually be given the right to vote in elections because so far there was no prohibition for persons with mental disabilities to obtain their rights. Meanwhile, from the perspective of human rights, the granting of the right to vote for persons with disabilities was absolute because they were also part of citizens who were given the right by the state to be able to participate in a democratic process procedurally.

Keywords: *right to vote, persons with mental disabilities, human rights*

Abstrak

Dinamika politik di Indonesia pada penghujung tahun 2018 kembali hangat disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental berhak memperoleh hak pilih sehingga dapat didata sebagai pemilih. Hal tersebut rupanya menimbulkan pendapat beragam dimana akhirnya pemerintah mengakomodir hak penyandang disabilitas mental namun di sisi lain, hal ini memunculkan kekhawatiran bagi penyandang disabilitas mental apakah dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar atau tidak. Tujuan penulisan ini untuk memberikan pengertian komprehensif mengenai penyandang disabilitas mental, mendeskripsikan dasar hukum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dan mendeskripsikan hak pilih penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta dan menyuguhkan apa adanya keadaan, fenomena, serta keadaan yang terjadi berdasarkan studi kepustakaan. Penulisan ini mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas mental sejatinya tetap dapat diberikan hak pilih dalam pemilihan umum karena sejauh ini tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas mental untuk memperoleh haknya. Sementara dari perspektif HAM memandang bahwa pemberian hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah mutlak karena penyandang disabilitas mental juga merupakan bagian dari warga negara yang diberikan hak oleh negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara prosedural.

Kata Kunci: *hak pilih, penyandang disabilitas mental, hak asasi manusia*

A. Pendahuluan

Perkembangan politik dan hukum ketatane-garaan di Indonesia kembali menjadi perbin-cangan menarik pada tahun 2018 dimana telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak yang kembali memunculkan pasangan calon tunggal di beberapa provinsi, kemudian dilanjutkan dengan persiapan untuk menghadapi pemilihan calon anggota legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian dari beberapa fenomena tersebut, di penghujung tahun 2018 muncul kembali satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental yang nantinya juga akan mempengaruhi proses berdemokrasi secara prosedural di Indonesia pada tahun 2019.

Fenomena tersebut muncul ketika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau dengan kata lain disebut dengan penyandang disabilitas men-tal dapat diberikan haknya sebagai pemilih. (Agusni, 2018) menyatakan bahwa kepastian tersebut dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beberapa waktu lalu pada 13 November melalui Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 meminta KPU di semua provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Sementara menurut Arief Budiman dalam (Bomantama, 2018) menyatakan pasien gangguan jiwa yang memiliki hak pilih, diwajibkan menyertakan surat keterangan dokter saat akan memberikan suaranya.

Menanggapi fenomena sebelumnya rupanya menyebabkan pendapat yang beragam. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam (Nathaniel, 2018) menyatakan orang dengan gangguan jiwa tidak seharusnya mendapat hak pilih. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa UU Pemilu tidak mengatur secara tegas mengenai larangan orang dengan gangguan jiwa untuk memilih di pemilihan

umum (pemilu), tetapi dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melaku-kan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam Pemilu.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam (Per-dana, 2018) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 11 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu yang memasukkan penyandang disabili-tas mental atau orang dengan gangguan jiwa berhak untuk memilih. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa semua warga negara berhak untuk memilih atau dipilih namun dalam kalimat hak warga negara itu ada persyaratan untuk terpenuhinya hak. Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani atau mental.

Namun demikian terdapat pandangan lain menyikapi fenomena hak pilih bagi penyandang disabilitas mental diantaranya Anggota koalisi dari Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti dalam (Pratama, 2018) me-nyatakan bahwa ada lima alasan mengapa pe-nyandang disabilitas harus memiliki hak pilih. *Pertama*, secara filosofis, penyandang disabili-tas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dimaksud ada-ah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasar-kan putusan pengadilan atau Undang-Undang. *Kedua*, secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 menyatakan ‘Se-tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. *Ketiga*, secara medis kapasitas seseorang untuk memilih dalam pemilu tidak ditentukan oleh di-agnosisis atau gejala yang dialami penderita, me-lainkan dari kemampuan kognitif (kemampuan berpikir). Anggota koalisi lainnya yang berasal

dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Mahmud Fasa, menambahkan alasan keempat dari sisi sosiologis dimana perkembangan masyarakat Indonesia, pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Alasan kelima dilihat dari sisi historis. Dari sisi tersebut, pelarangan hak memilih pada penyandang disabilitas tidak sesuai dengan perkembangan HAM secara internasional karena perkembangan HAM internasional cenderung menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas.

Melihat keberagaman pendapat sebelumnya maka menjadi ketertarikan penulis untuk menggali lebih dalam pemenuhan hak khususnya hak politik bagi penyandang disabilitas mental karena berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 dan data rutin dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan dalam (Pinterpolitik, 2018), jumlah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental terus mengalami peningkatan di Indonesia.

Data Riskesdas 2013 dalam (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016) menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Sementara menurut data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia. Selain itu, yang lebih mengkhawatirkan adalah pada Maret 2016, pemerintah Republik Indonesia sempat mempublikasikan data bahwa ada sekitar 18.800 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih dipasung di Indonesia.

Merujuk data sebelumnya dapat dipahami bahwa dalam faktanya di Indonesia rupanya jumlah penyandang disabilitas mental yang terdata masih banyak dan jika dilihat dari kacamata politik, banyaknya jumlah penyandang

disabilitas mental tersebut sejatinya juga berpotensi dalam memberikan suara atau hak pilihnya dalam proses demokrasi secara prosedural.

Setelah terbit Surat Edaran KPU RI yang menyarankan penyandang disabilitas untuk dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), rupanya KPU baik di pusat maupun daerah langsung merespon hal tersebut dengan mencoba melakukan perekaman data bagi penyandang disabilitas tak terkecuali penyandang disabilitas mental.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam (Siallagan, 2018) mencatat, ada 43.769 penyandang disabilitas mental yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019. Jumlah itu diperkirakan bisa bertambah karena pendataan masih berlangsung. Pada Pemilu 2014 pemilih disabilitas mental hanya 8.717, sedangkan pada Pemilu 2019 mencapai 43.769 orang. Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 1.
Perbandingan Jumlah Pemilih Difabel pada Pemilu
Tahun 2014 dengan Tahun 2019.
Sumber: KPU RI dalam Indopos.co.id, 2018.

Namun demikian Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dalam (Farisa, 2018a) menyatakan bahwa KPU kemungkinan hanya mendata penyandang disabilitas mental yang berada di rumah, berkumpul dengan keluarga, atau sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Sebab, pendataan pemilih penyandang disabilitas mental yang berada di luar rumah, seperti di sekolah atau tempat kerja, belum dilakukan.

dang disabilitas mental bergantung situasi dan kondisi. Paling memungkinkan, pendataan dilakukan dengan bertanya kepada keluarga atau dokter atau tenaga medis yang merawatnya.

(Sa'duddin, 2018) mengatakan bahwa “sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut nampak dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga Negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana”.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita dalam (Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018a) pada Perayaan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2018 mengatakan bahwa Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Melalui pijakan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi. Menuju Indonesia yang Inklusi dan Ramah Disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental; apakah yang menjadi dasar hukum bagi penyandang disabilitas mental dapat memberikan suara dalam proses demokrasi secara prosedural; dan bagaimana hak pilih bagi penyandang disabilitas mental ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para *stakeholder* terkait dalam rangka perbaikan regulasi dan perbaikan sistem demokrasi terhadap

pelaksanaan pemilihan umum (pilpres, pileg, dan pilkada) kedepan yang sesuai dengan perspektif hak asasi manusia.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris melalui studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. (Muhammad, 2004: h.134) menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Sugiyono, 2012: h.291) menambahkan bahwa studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Menurut Bogdan dan Biglen dalam (Moleong, 2009: h.248) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Oleh karenanya pada langkah ini, data yang diperoleh dari dokumentasi, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diolah menjadi sekumpulan data yang terpisah-pisah menurut kebutuhan untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Setelah dipilah maka data tersebut selanjutnya *di-check and recheck (triangulasi)* untuk ditemukan titik tengah dan akurasi pendapat dari berbagai pandangan sehingga menghasilkan suatu kesim-

pulan sementara atau hasil penelitian yang ada. Dengan kata lain analisis data penelitian menggunakan metode yang disampaikan oleh (Yin, 2011: h.177) dalam melakukan analisis data dengan menggunakan lima fase: (1) *Compiling database* (kompilasi data), (2) *Disassembling data* (pembongkaran data), (3) *reassembling and arraying data* (pemasangan dan penyusunan data kembali), (4) *interpreting* (mengartikan data) dan (5) *concluding* (menyimpulkan).

C. Memahami Penyandang Disabilitas Mental dan Hak yang dimiliki sebagai Warga Negara

Pengertian Penyandang Disabilitas Mental

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), “penyandang” diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan “disabilitas” merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

(Rahayu, Dewi, & Ahdijana, 2013: h.110) berpendapat bahwa istilah disabilitas rupanya digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Lebih lanjut penulis juga sependapat oleh (Rahayu et al., 2013: h.110) bahwa istilah disabilitas juga didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dalam *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. (Sholeh, 2015: h.297) *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomic. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang

manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.

Sementara *Convention on The Right Of Person With Disabilities* (CRPD) pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai “orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan ūsik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 1 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

(Shaleh, 2018: h.67) menjelaskan ragam penyandang disabilitas dapat diketahui melalui pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil. Kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (a) psikososial diantaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis* dan *hiperaktif*. Keempat, penyandang disabilitas sensorik,

yaitu terganggunya salah satu fungsi dari pancha indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Namun demikian dalam penelitian ini penulis membatasi pada penyandang disabilitas mental.

Secara normatif, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autis dan hiperaktif.

Sementara berdasarkan keterangan pakar psikiatri dalam (Ismail, 2018), disabilitas mental merupakan kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik.

Selanjutnya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2010) Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.

(Murni & Astuti, 2015: h.280) mengatakan bahwa penyandang cacat mental merupakan individu yang mengalami kelainan mental dan/atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain (normal), sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Namun demikian sejatinya penyandang disabilitas mental erat kaitannya dengan permasalahan gangguan jiwa atau dengan kata lain bermasalah dengan kondisi kejiwaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam (Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018) gangguan jiwa merupakan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku. Permasalahan gangguan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, dan dapat menimbulkan beban tidak saja bagi penyandangnya tetapi juga bagi keluarganya, apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat.

Sementara menurut *American Psychiatric Association* dalam (Balitbangkumham, 2015: h.70) mendefinisikan gangguan jiwa sebagai suatu sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada seseorang dan dikaitkan dengan adanya distress dan disabilitas atau disertai peningkatan resiko kematian yang menyakitkan, nyeri, disabilitas atau kehilangan kebebasan.

Selanjutnya Kaplan dan Sadock dalam (Balitbangkumham, 2015: h.70) menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan gejala yang dimanifestasikan melalui perubahan karakteristik utama dari kerusakan fungsi perilaku atau psikologis yang secara umum diukur dari beberapa konsep norma dihubungkan dengan distress atau penyakit, tidak hanya dari respon yang diharapkan pada kejadian tertentu atau keterbatasan hubungan antara individu dan lingkungan sekitarnya.

(Balitbangkumham, 2015) menjelaskan bahwa masalah gangguan jiwa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya:

1. **Faktor biologis**, seperti penyakit fisik kronis, penyakit fisik yang mempengaruhi otak dan penyalahgunaan Napza.
2. **Faktor psikologis**, seperti pola adaptasi, pola penyelesaian masalah, pola mekanisme pertahanan diri dan pola kepribadian.
3. **Faktor sosial**, spiritual seperti pola relasi, sistem dukungan, situasi khusus/krisis, tantangan/tugas-tugas dan stresor atau pemicu.

Namun demikian, dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas mental sering kali mengalami masalah yang kompleks. Bukan saja masalah yang terjadi di dalam dirinya seperti halusinasi, waham dan sebagainya, namun yang lebih memperparah permasalahan adalah yang berasal dari luar, yaitu lingkungan sosialnya. Seorang penyandang disabilitas mental akan mengalami kondisi yang lebih parah atau kekambuhan yang sering apabila lingkungan tidak memberikan dukungan dan rawatan yang dibutuhkan.

Oleh karenanya Hubertus dalam (Murni & Astuti, 2015: h.280) mengatakan bahwa penanganan orang dengan gangguan kejiwaan tidak boleh sembarang, bergantung jenis gangguan yang dialami, penanganannya bisa dengan obat-obatan, terapi atau, kombinasi keduanya. Terapi yang digunakan bisa berupa konseling, terapi perilaku, atau perilaku kognitif.

Lebih lanjut, Prof Sasanto dalam (Murni & Astuti, 2015: h.280) mengatakan bahwa salah satu titik penting untuk memulai pengobatan adalah keberanian keluarga untuk menerima kenyataan. Mereka juga harus menyadari bahwa gangguan jiwa itu memerlukan pengobatan sehingga tidak perlu dihubungkan kepercayaan yang macam-macam. Terapi bagi penderita gangguan jiwa bukan hanya pemberian obat dan rehabilitasi medik, namun diperlukan peran keluarga dan masyarakat guna resosialisasi dan pencegahan kekambuhan.

Dari pernyataan sebelumnya penulis memahami bahwa peran serta masyarakat juga menjadi penting kaitannya dalam menyembuhkan penyandang disabilitas mental dan hal yang demikian menjadi sejalan dengan mengakomodir hak pilih bagi penyandang disabilitas mental karena dengan mengakomodir hak tersebut akan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk terlibat atau kembali bersosialisasi dengan masyarakat yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyembuhan terhadap gangguan yang dialaminya akan tetapi dengan catatan bahwa masyarakat tidak lagi membuat stigma negatif kepada para pe-

nyandang disabilitas mental tetapi masyarakat diharapkan untuk menghargai hak-hak para penyandang disabilitas mental tersebut.

Dasar Hukum Penyandang Disabilitas Mental Berhak Memperoleh Hak Pilih

Hak pilih sejatinya merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Karena sifatnya hampir sama dengan hak lainnya atau bersifat umum (*universal*) maka hak pilih pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan atas bangsa, ras, ataupun jenis kelamin.

(Anam, 2011: h.194) menyatakan hak pilih sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Oleh karenanya, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar di suarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Jika melihat Undang-Undang Penyandang Disabilitas terbaru saat ini terdapat perubahan paradigma dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dimana tidak lagi dilihat dari sisi medis atau kesehatan tetapi dilihat dari sisi pemenuhan dan penghormatan hak.

Kondisi yang demikian rupanya dipengaruhi oleh perkembangan dunia internasional yang menyepakati Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD*) yang disahkan PBB pada Tahun 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011. (Nursyamsi, Arifianti, Aziz, Bilqish, & Marutama, 2015: h. 16) menyatakan bahwa Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu disabilitas. Semenjak itu, secara normatif-formil, pemenuhan hak penyandang disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan lagi sekadar belas kasih. Dalam konteks yang

demikian, disabilitas dipahami sebagai hambatan yang tercipta karena lingkungan yang tidak mendukung, baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun stigma atau pemikiran masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, berbicara mengenai perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*). Dalam beberapa instrumen internasional maupun nasional, keberadaan hak pilih pun sejatinya diakui dan dilindungi.

Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 menyatakan bahwa “kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara”.

Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada Pasal 25 menyatakan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih”.

Secara yuridis, penyandang disabilitas mental termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama sehingga wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara. Pasal 28D ayat (1) Un-

dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Norma tersebut dapat dipahami bahwa secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak pilih.

Dasar hukum lainnya juga dapat dilihat melalui Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa

- (1) Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain
- (3) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/

Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu.

Selain itu dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas secara khusus juga menyatakan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik

Lebih lanjut Pasal 75 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih
- Selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal ayat (3) menyatakan bahwa Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sehingga tidak

memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Namun demikian pasal ini dapat dipahami ketika penyandang disabilitas mental tidak sedang terganggu jiwanya maka dapat dimungkinkan untuk memenuhi haknya sebagai pemilih.

Dasar Hukum lainnya adalah Surat Edaran Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/CI/2018 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum di semua provinsi dan kabupaten/kota wajib mendata warga negara Indonesia (WNI) penyandang disabilitas grahita atau gangguan jiwa/mental dan dimasukkan dalam DPT Pemilu 2019.

Merujuk instrumen internasional maupun instrumen nasional sebelumnya, pada prinsipnya semua penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat memperoleh hak pilih dalam pemilihan umum dimana hak tersebut dijamin oleh pemerintah atau Negara melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Lebih khusus, secara yuridis, penyandang disabilitas mental pun termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, sehingga otomatis haknya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara.

Namun demikian, dalam implementasinya juga tidak serta merta penyandang disabilitas mental dapat dengan bebas menggunakan hak pilihnya. (Huzaini, 2018) mengatakan bahwa umumnya penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan episodik (kambuhan). Jika periode kambuhan terjadi di hari pemilu, khususnya pada waktu pencoblosan, tentu tidak mungkin memaksakannya datang ke TPS untuk berpartisipasi memberikan suaranya.

Adanya surat rekomendasi yang dibutuhkan dari pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah dokter yang merawat si penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk tetap dapat menjalankan proses pemilu secara LUBER sehingga penyelenggara pemilu dapat mengakomodir semua masyarakat sebagai warga negara tanpa terkecuali. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Ashari

dalam (Farisa, 2018a) yang menyatakan bahwa “dalam hal pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih, dokter menjadi pihak yang punya otoritas dalam menentukan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara sedang dalam keadaan sehat atau tidak. Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, penyandang disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas, yaitu dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih.

Pada akhirnya kewajiban negara untuk memenuhi hak politik setiap warga negaranya tanpa terkecuali merupakan sebuah keniscayaan. Karena dengan diberikannya kesempatan kepada setiap orang tanpa terkecuali akan membuat sebuah negara menuju pada tahap demokrasi secara ideal seperti yang disampaikan oleh Robert Dahl dalam yang mengatakan bahwa “dikatakan sebagai Negara demokrasi bila memenuhi unsur-unsur:

- a. *Freedom to form and join organization* (ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan);
- b. *Freedom of expression* (ada kebebasan menyatakan pendapat);
- c. *The Right to vote* (ada hak memberikan suara dalam pemungutan suara);
- d. *Eliqibility of public office* (ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara);
- e. *The Right of Political Leader to compete for support and votes* (ada hak bagi pemimpin politik berkampanye untuk memperoleh dukungan suara);
- f. *Alternative sources of information* (terdapat beberapa sumber informasi)
- g. *Free and fair election* (adanya pemilihan yang jujur dan bebas);
- h. *Institution for making government politics depend on votes and other exspression of preference* (Lembaga-lembaga yang membuat kebijaksanaan bergantung kepada pemilih).

Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam sejarah perkembangannya, HAM saat ini tidak lagi menjadi sebuah konsep ideal dalam menjalankan pemerintahan tetapi HAM telah diimplementasikan dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih ketika berbicara sebagai sebuah negara demokrasi dapat dipahami bahwa Negara sejatinya merupakan pemangku kewajiban untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang terkandung dalam hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemanfaatan (*to fulfil*) yang berlaku bagi seluruh individu atau warga masyarakat dalam negaranya tanpa adanya perbedaan ataupun diskriminasi terhadap hak-hak asasinya.

Keberadaan hak asasi manusia dalam konsepsi Negara hukum yang menganut paham demokrasi di Indonesia pada akhirnya menjadi suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, tetapi dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. (Khairazi, 2015: h.72) menyatakan bahwa dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi hak asasi manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara sehingga implementasi demokrasi dan hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.

Frans Magnis Suseno dalam (Nurtcahjo, 2006: h.74) menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berdasarkan pendapat sebelumnya, Hak politik rupanya menjadi tanggung jawab negara untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Hal yang

demikian rupanya juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan negara tanpa terkecuali.

Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini, Hak politik atau dikenal dengan *political rights* sebaiknya dapat dipahami juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu (Anam, 2011: h.194). Selain itu hak politik bisa kita anggap sebagai jelmaan dari hak konstitusi yang melekat pada diri kita yang bila dilaksanakan bisa menentukan berjalannya sistem demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Bisa juga hak tersebut dimaknai sebagai tawaran atas opsi yang diberikan negara untuk ikut serta menentukan siapa pejabat publik yang akan memimpin kita.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

Paragraf sebelumnya menjadi satu pemahaman dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Konvenan Hak Sipil dan Politik atau sering kali disebut dengan singkatan ICCPR, yang merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang meng-

atur mengenai hak-hak sipil dan politik setiap individu sebagai warga negara. Pasal 2 dan 3 menyatakan adanya Kewajiban negara demi tercapai atau terpenuhinya hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR meliputi menghormati dan menjamin semua orang tanpa diskriminasi menikmati hak-hak yang diakui dalam Konvenan, mengambil langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundang-undangan, menjamin adanya tindakan aparatur negara yang bertugas terkait pelanggaran terhadap hak-hak yang terdapat dalam konvenan, dan menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

(Halalia, 2017: h.4) mengatakan, dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apalagi dalam tataran negara demokrasi. Sehingga Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, Yeni Rosa Damayanti dalam (Farisa, 2018) menyebut, masuknya penyandang disabilitas mental ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu bukan merupakan hal yang tiba-tiba. Hak pilih penyandang disabilitas mental lahir dari perjuangan panjang para penyandang dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu disabilitas.

Namun faktanya berdasarkan laporan Komnas HAM Tahun 2018 (Hartanto & Yulianti, 2018: h.40) dapat diketahui bahwa stigma yang berkembang di masyarakat saat ini masih menganggap bahwa Penyandang Disabilitas Mental merupakan manusia yang sedang kersukuan roh jahat, tidak mampu/cakap dalam mengambil keputusan, dianggap berbahaya, perlu untuk dikonsentrasi/dikurung, dan

tidak memiliki harapan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama perlakuan diskriminatif yang dialami penyandang disabilitas mental. Oleh karenanya stigma tersebut sebaiknya mulai dihilangkan dimulai dari Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan agar penyandang disabilitas mental tetap dapat memperoleh hak-haknya secara utuh sehingga lambat laun pola pikir masyarakat secara umum akan berubah terhadap stigma negatif yang terlanjur melekat pada penyandang disabilitas mental.

Hal senada juga disampaikan oleh Titi Anggraini yang menyatakan bahwa harus diluraskan lagi perspektif dan paradigma masyarakat soal pemilih disabilitas mental. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas.

Pemilu sendiri juga dapat dipahami merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilu yang sering disebut-sebut sebagai pesta demokrasi masyarakat, harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali.

(Daming, 2011: h.22) menyatakan bahwa sangat disadari salah satu indikator penyelenggaraan pemilu yang berkualitas adalah unsur-unsur partisipasi masyarakat. Esensi dari penyelenggaraan Pemilu adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Sementara Hal senada juga disampaikan oleh (Fahmi, 2011: h.36) bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi serta sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih dan untuk dipilih.

Dalam kaitannya dengan HAM, perkembangan hak pilih saat ini rupanya mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana setiap warga negara dapat memberikan hak pilihnya maka perdebatan mengenai apakah penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak pilih atau tidak sebaiknya dapat diakhiri dengan jawaban bahwa penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak pilih yang secara teknis dapat dilakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas mental sampai dengan diberikan kesempatan untuk memilih namun dengan catatan kondisi pada saat pemungutan suara, penyandang disabilitas mental dalam kondisi yang baik dan sejawarnya.

Melibatkan penyandang disabilitas sangatlah penting bagi demokrasi. Tanpa keterlibatan semua warga negara, sebuah negara bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Tidak mungkin ada pemilu berintegritas, kalau ada satu saja warga negara yang tereliminasi haknya untuk menggunakan hak pilih. Pelibatan mereka dapat menembus dan merubah stigma sosial terhadap konsep kewarganegaraan dimana memastikan penyandang disabilitas dapat muncul bersama dengan warga negara lainnya sebagai peserta aktif dalam proses politik. Hal yang demikian dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas tanpa terkecuali sejatinya dapat juga memainkan peran yang sama dalam proses pemilihan.

Penulis juga memahami bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus.

Lebih khusus, pelibatan penyandang disabilitas melalui pemilu sejatinya membuka jalan untuk kebijakan pemerintah secara inklusif yang lebih luas. Jika penyandang disabilitas menunjukkan jumlah dan kepentingan mereka

pada kotak suara, politisi kemungkinan akan lebih cenderung mengembangkan kebijakan yang menarik bagi kelompok ini seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi dan pelayanan kesehatan yang inklusif. Dengan berpartisipasi di kehidupan politik, penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan memengaruhi kebijakan berentang luas dan membuka peluang untuk memasukkan konsep progresif legal mengenai disabilitas kedalam legislasi nasional ke tingkatan yang lebih tinggi.

Jika melihat kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU RI, sejatinya KPU RI berusaha untuk melindungi hak politik setiap warga negara tak terkecuali bagi penyandang disabilitas mental. Penulis juga sepandapat dengan KPU RI namun demikian ketika pelaksanaan pemungutan suara, penyandang disabilitas mental juga perlu mendapat perhatian terutama perlu dilihat kondisi mentalnya apakah sedang mengalami gangguan atau tidak. Penulis juga setuju untuk membuktikan hal tersebut maka perlu ada keterangan atau pernyataan dari ahli yaitu dokter yang merawatnya sehingga dapat dijadikan dasar atau rujukan untuk dapat memenuhi hak pilihnya.

Memang dalam implementasinya masih terdapat beberapa pandangan yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas mental dirasakan sulit untuk diberikan hak pilihnya, tetapi jika kita pahami bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental beragam maka tidak menutup kemungkinan hak-hak mereka dapat terpenuhi. Sebagai contoh penyandang disabilitas mental yang tidak mengalami gangguan jiwa permanen masih dapat disembuhkan sehingga mereka-mereka itulah yang masih memiliki peluang untuk diberikan hak asasi khususnya hak pilih dan hal yang demikian dirasakan menjadi satu poin tersendiri bagi para calon karena satu suara yang diberikan oleh mereka menjadi berharga.

Oleh karenanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental tidak dapat diberikan hak pilih sebaiknya segera dihilangkan. Hal yang demikian memiliki alasan bahwa

prinsip-prinsip HAM sejatinya sudah menjadi bagian dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Salah satu perwujudannya dapat dilihat dari diberikannya pengakuan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk berperan serta secara aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian penulis juga tetap memberikan perhatian khususnya dalam pemenuhan HAM oleh Negara dimana Negara tetap memberikan batasan agar HAM yang sudah dipenuhi juga tidak digunakan secara sememana. Berdasarkan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal sebelumnya jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan ada pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam undang-undang. Artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara.

Pada akhirnya, sebuah pengakuan sempurna terhadap HAM penyandang disabilitas mental yang terkait hak pilih (memilih dan dipilih) sebagai hak politik seyogyanya merupakan wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi, tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, sehingga hak asasi manusia dapat berlaku universal bagi setiap individu dan memberikan kebahagiaan bagi Negara maupun Warga Negaranya.

D. Penutup

Kesimpulan: Penyandang disabilitas mental sejatinya merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap fungsi pikir, emosi, dan perilaku namun demikian kondisi tersebut merupakan kondisi episodik atau tidak permanen. Meskipun penderita mengalami disabilitas sebagian fungsi mental, tetapi mereka tetap bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik. Namun demikian untuk menjadikan penyandang disabilitas mental menjadi normal seperti sediakala maka diperlukan dukungan dari keluarga maupun dari masyarakat sehingga stigma negatif yang sudah terlanjur diterima penyandang disabilitas mental dapat segera dihilangkan

Pengakuan, maupun pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sejatinya merupakan perkembangan penting dalam konsep hak asasi manusia. Indonesia, sebagai negara hukum yang sejak awal mengedepankan pengakuan atas hak asasi manusia, juga sudah mengadopsinya dengan ratifikasi CRPD serta diperbaruiannya UU Penyandang Disabilitas. Pengakuan Indonesia ini bukan semata karena solidaritas internasional, melainkan karena negara Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat; dan hak penyandang disabilitas adalah hak kodrat yang penting untuk diakui. Filosofi ini tertuang jelas ketika Indonesia meratifikasi CRPD pada 2011. Karena itu, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga berlaku secara mutlak untuk penyandang disabilitas.

Berkaitan dengan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, penulis menyimpulkan bahwa dari perspektif hak asasi manusia, hak pilih (hak memilih dan hak dipilih) tersebut sebaiknya perlu dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Ketiga kewajiban negara tersebut menjadi mutlak karena secara konstitusional negara sudah berkomitmen untuk menjalankan kewajibannya

terhadap warga negara. Selain itu perkembangan gagasan demokrasi saat ini juga berdampak pada meningkatnya kepentingan untuk membekali setiap orang dengan perlindungan atas hak pilihnya (*universal suffrage*). Namun demikian perlindungan dan pemenuhan hak tersebut juga diikuti dengan jaminan bahwa pada saat pemilihan, kondisi penyandang disabilitas mental benar-benar dalam kondisi terbaiknya dimana hal yang demikian dapat diperkuat dengan surat rekomendasi dari ahli atau orang yang berkompeten di bidangnya dalam hal ini adalah dokter yang merawatnya yang dapat memberikan keterangan bahwa penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi stabil dan baik.

Pada akhirnya, perlindungan akan hak pilih bagi warga negara tidak dipungkiri memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi sekaligus berjalannya sistem ketatanegaraan. Selain itu Hak pilih diharapkan menjadi salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pernyataan sebelumnya menjadi satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh Dieter Nohlen yang menyatakan bahwa *“The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy.”*

Rekomendasi: Dari sisi regulasi, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dirasakan cukup mengakomodir sehingga Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Namun demikian dalam implementasinya, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan pertama, para penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu memberikan sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat umum terkait hak pilih bagi penyandang disabilitas mental, karena masih terdapat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental. Substansi dari sosialisasi tersebut meliputi pemahaman atau pengertian tentang siapa yang dimaksud dengan

penyandang disabilitas mental, kemudian apa yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas mental dan pemahaman mengenai regulasi yang menjadi dasar penyandang disabilitas mental dapat diberikan hak politik. Hal yang demikian dilakukan agar pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental menjadi berubah ke arah yang lebih baik dalam arti dapat memberikan kesempatan hak pilih kepada penyandang disabilitas mental.

Kedua, surat rekomendasi dari ahli atau dokter yang merawat menjadi mutlak diperlukan agar mengetahui apakah penyandang disabilitas mental sedang dalam kondisi yang memungkinkan untuk memilih atau tidak sehingga hal yang demikian dapat dijadikan dasar bagi penyelenggara untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mental untuk memilih.

Ucapan Terima Kasih

Kepada editor, mitra bestari dan rekan-rekan peneliti di pusat penelitian dan pengembangan hak asasi manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI yang memberikan masukannya sehingga artikel ini dapat diselesaikan, tidak lupa pula disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini diucapkan terima kasih.

Pustaka Acuan

- Agusni, A. . (2018). Si Sakit Jiwa Bisa Memilih. Retrieved November 28, 2018, from <http://aceh.tribunnews.com/2018/11/26/si-sakit-jiwa-bisa-memilih>
- Anam, K. (2011a). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.
- Anam, K. (2011b). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.
- Balitbangkumham. (2015). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Penyandang Skizofrenia*. Jakarta.
- Bomantama, R. (2018). Pemilih yang Punya Gangguan Jiwa Hanya Boleh Mencoblos Jika Kantongi Surat Keterangan Dokter. Retrieved November 28, 2018, from <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/18/pemilih-yang-punya-gangguan-jiwa-hanya-boleh-mencoblos-jika-kantongi-surat-keterangan-dokter?fbclid=IwAR2t5hTxeBmIlWnXhHISIRvN8GYUfJdxHI91uHrx5-sq7ZmHx4vtOxrNUFI>
- Daming. (2011). *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Fahmi, K. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Farisa, F. C. (2018a). KPU: Penyandang Disabilitas Mental yang didata hanya yang di rumah atau RSJ. Retrieved November 28, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/22/23133931/kpu-penyandang-disabilitas-mental-yang-didata-hanya-yang-di-rumah-atau-rsj>
- Farisa, F. C. (2018b). Surat Dokter untuk Penyandang Disabilitas Mental di Pemilu Dinilai Tak Perlu. Retrieved January 3, 2019, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/24/18191861/surat-dokter-untuk-penyandang-disabilitas-mental-di-pemilu-dinilai-tak-perlu>
- Halalia, M. R. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Jurnal Supremasi Hukum*, 6(2), 1–24.
- Hartanto, M. F. B., & Yulianti, I. (2018). *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018a). Kemensos hadirkan beragam layanan dan program bagi penyandang disabilitas. Retrieved December 5, 2018, from <http://www.depkes.go.id/article/view/1812030003/kemensos-hadirkan-beragam-layanan-dan-program-bagi-penyandang-disabilitas.html>
- Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018b). Penyandang Disabilitas Mental. Retrieved November 29, 2018, from <http://mediadisabilitas.org/urai-an/ind/disabilitas-mental>
- Huzaini, M. D. P. (2018). Hak orang yang mengalami gangguan jiwa dalam pemilu. Retrieved November 29, 2018, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfc445ab3471/hak-orang-yang-mengalami-gangguan-jiwa-dalam-pemilu>
- Ismail, T. (2018). Penyandang Disabilitas Mental Harus Difasilitasi Memilih. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/21/perludem-penyandang-disabilitas-mental-harus-difasilitasi-memilih>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.depkes.go.id/article/print/1610070005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Inovatif*, VIII(I). Retrieved from JURNAL FAZ

- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murni, R., & Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Sosio Informa*, 1(03), 278–292.
- Nathaniel, F. (2018). Alasan Gerindra Tolak Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Hak Pilih. Retrieved November 28, 2018, from <https://tirto.id/alasan-gerindra-tolak-orang-dengan-gangguan-jiwa-dapat-hak-pilih-dakz>
- Nursyamsi, F., Arifanti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Retrieved from <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>
- Nurteahjo, H. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Perdana, P. P. (2018). Dedi Mulyadi: Jangan Bebani Penyandang Disabilitas Mental Untuk Memilih. Retrieved November 29, 2018, from <https://regional.kompas.com/read/2018/11/26/13382371/dedi-mulyadi-jangan-bebani-penyandang-disabilitas-mental-untuk-memilih>
- Pinterpolitik. (2018). Indonesia Darurat Kesehatan Mental? Retrieved November 28, 2018, from <https://pinterpolitik.com/indonesia-darurat-kesehatan-mental/>
- Pratama, I. R. (2018). Organisasi ini Sampaikan 5 Alasan Penyandang Disabilitas Mental Perlu Gunakan Hak Pilih. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/24/organisasi-ini-sampaikan-5-alasan-penyandang-disabilitas-mental-perlu-gunakan-hak-pilih>
- Rahayu, S., Dewi, U., & Ahdiyana, M. (2013). Pelayanan publik bidang transportasi bagi difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Socia*, 10(2), 108–119.
- Sa'duddin. (2018). Pengaturan Hak Politik Warga Negara. Retrieved November 28, 2018, from <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Sholeh, A. (2015). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *PALASTREN*, 8(2), 293–320.
- Siallagan, F. (2018). 43 Ribu Disabilitas Mental di DPT. Retrieved December 8, 2018, from <https://www.indopos.co.id/read/2018/12/05/157716/43-ribu-disabilitas-mental-di-dpt>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Effectiveness of the Implementation of Rehabilitation of Narcotics & Illegal Drugs Abuse Victims

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta, Email soetjiandari@gmail.com, 082227728790
diterima tanggal 14 Agustus 2019 direvisi tanggal 28 Agustus 2019 disetujui tanggal 19 Desember 2019

Abstract

This research was conducted at the foundation concerned with narcotics and illegal drugs, namely Laras Compulsory Reporting Recipient Institution (IPWL) and Sekata IPWL in Samarinda City, East Kalimantan. Data collection was carried out by interviewing 30 respondents who were residents of the two IPWLs. Data was obtained by observing, interviewing, studying documents, filling out questionnaires and Focus Group Discussion. From the results of the study, the implementation of social rehabilitation for narcotics and drug abuse victims, seen from the input component which consisted of handling procedures had a good category (97%), which in this case was supported by human resources who had adequate skills in implementing rehabilitation. This social rehabilitation services according to the understanding of residents in terms of context, namely the residents' understanding of the existence of IPWL had a good category of 87.00%. This social rehabilitation service according to the residents' understanding in terms of the input aspects related to the availability of facilities and infrastructure, human resources, and funds at IPWL was in the very good category that was equal to 97.00%. This social rehabilitation service according to residents' understanding in terms of the aspect of the social rehabilitation process was categorized as effective at 80.00%. It is recommended to the Social Service and Narcotics National Agency of Samarinda City to prevent residents from using narcotics and illegal drugs again after rehabilitation, so that families, communities and government need to grow the resident's entrepreneurial potential, in order to be able to be independent.

Keywords: *effectiveness; prevention; rehabilitation; narcotics and illegal drugs*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di yayasan peduli zat terlarang yaitu Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Laras dan IPWL Sekata di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara 30 responden yang merupakan residen dari kedua IPWL tersebut. Data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, pengisian kuesioner dan *Focus Group Discussion*. Dari hasil penelitian, pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, dilihat dari komponen input terdiri dari prosedur penanganan memiliki kategori baik (97%), yang dalam hal ini karena didukung sumber daya manusia yang memiliki keterampilan memadai dalam pelaksanaan rehabilitasi. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek *context* yaitu pemahaman residen terhadap keberadaan IPWL memiliki kategori baik sebesar 87.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial ini menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek input terkait ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, dan dana di IPWL berada pada kategori sangat baik yaitu sebesar 97.00%. Pelayanan rehabilitasi sosial menurut pemahaman residen ditinjau dari aspek proses rehabilitasi sosialnya dikategorikan efektif yaitu sebesar 80.00%. Direkomendasikan kepada Dinas Sosial dan Badan Nasional Narkotika Kota Samarinda untuk mencegah agar residen tidak menggunakan narkotika dan obat terlarang kembali pasca rehabilitasi, maka keluarga, masyarakat dan pemerintah perlu menumbuhkan potensi kewirausahaan residen, agar mampu mandiri.

Kata kunci: *efektifitas; pencegahan; rehabilitasi; narkotika dan obat terlarang*

A. Pendahuluan

Permasalahan penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi permasalahan global disemua kalangan. Generasi muda menjadi sasaran dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kian meningkat. Peredaran gelap narkoba sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan sangat membahayakan bagi bangsa. Dampak buruk penggunaan narkoba sudah menyentuh ke seluruh masyarakat di semua golongan. Penyebaran narkobasaat ini perkembangannya merambah ke segala tempat bahkan telah sampai di sekolah baik tingkat SD,SLTP, SLTA dan perguruan tinggi. Hal tersebut berakibat menurun kualitas generasi muda yang akan mengurangi asset bangsa. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Generasi muda terutama remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf tidak dapat berpikir jernih. Dampaknya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba pada di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2012 relatif belum berubah sekitar 5%. Angka prevalensi menurut usia angka penyalahguna menurut kelompok usia dibawah 30 tahun lebih tinggi dibandingkan usia di atas 30 tahun. Prevalensi tertinggi ada pada kelompok berpendidikan tamat SD dan tamat SMP. Hal ini patut menjadi perhatian, dimana sasaran narkoba menyasar pada kelompok berpendidikan dasar (tamat SD dan tamat SMP) (BNN, 2017). Tahun 2016, diperkirakan terdapat 275 juta orang di seluruh dunia (sekitar 5,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun) yang pernah menyalahgunakan narkoba setidaknya satu kali. Terdiri dari 192 juta pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amfetamin dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna ekstasi, 19 juta pengguna opiat, dan 18 juta kokain. Problem

penyalahgunaan narkotika tidak dipandang sebagai simptom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kebiasaan. Teori ini lebih menekankan peran belajar dan pemeliharaan perilaku bermasalah yaitu penyalahgunaan narkotika. Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap zat terlarang. Istilah narkotika umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial (Dharana Lastarya, 2006).

Merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun (Kompas, 2019).

Menurut data WHO, setidaknya terdapat 450 ribu orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba di tahun 2015. Opioid merupakan penyebab utama yang paling merusak, menyebabkan sekitar 76% kematian dari penderita gangguan penyalahgunaan narkoba. Terdapat sebanyak 11 juta orang penyalahguna suntik (penasun) di dunia; dimana 1,3 juta orang mengidap HIV, 5,5 juta orang di mengidap hepatitis C dan 1 juta orang mengidap HIV dan hepatitis C. (Jurnal Data Puslitdatin BNN, 2018)

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hingga hilangnya rasa sakit yang menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat alamiah maupun sintetis (bukan narkotika), yang memengaruhi syaraf pusat

menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis maupun semi sintetis) yang menyebabkan ketergantungan dan menurunkan susunan syaraf pusat. Jenis narkotika diantaranya yaitu opioid (opiad), kokain, anabis/ganja/hemp/chasra/cimenk, heroin/putow, metadon, morfin, barbiturat, dsb. Psikotropika biasanya berjenis; Sabu-sabu, sedatif/hipnotik, ekstasi, nipam, speed, demoral, angel dust, dll. Selain itu Zat Adiktif lainnya yang berjenis antara lain; alkohol, nikotin, kafein, zat desainer (*speed ball, pace pill, cristal, angel dust rocket fuel*), Narkotika (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan. Menurut data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan Narkotika kasus Narkotika meningkat 28,9% pertahun. (Wulandari, Retnowati, Handoko, & Rosida, 2015). Disamping masih terdapat zat-zat sejenis lainnya yang sangat membahayakan, dan dapat menimbulkan kecanduan/ketergantungan. Saat ini jenis serta bentuk narkoba sudah berkembang dan bervariasi dengan berbagai kemasan yang sangat menarik dan menyesatkan.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, remaja, pemuda bahkan orang dewasa menjadi tanggung jawab seluruh komponen pemerintah dan masyarakat bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, residen dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap keluarga. Upaya penanganan penanggulangan narkotika yang lebih kongkret dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Salah satu upaya pencegahan narkotika dilakukan melalui kegiatan penyuluhan narkoba yang dilaksanakan oleh berbagai ins-

tansi. Selain itu mengadakan razia mendadak secara rutin terhadap sekolah dan anak pelajar dan pendampingan dari orang tua remaja dan pemuda dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pada penelitian ini menganalisa upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan peduli Narkotika di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dilihat implementasi kebijakan dan dukungan daerah serta pihak terkait, SDM, sarana-prasarana, pendanaan dan prosedur dan pencapaian merehabilitasi bagi pengguna narkotika .

Peredaran narkotika di Indonesia semakin mudah dan murah untuk mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu yang singkat di balik bisnis haram ini. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko tersebut untuk mendapat keuntungan dari bisnis ini, sehingga pasokan barang tersebut tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai daerah terpencil. Pendistribusian narkotika melalui jalur darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional. Penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh 2 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terhadap korban penyalahgunaan ini sangat penting dilakukan karena jumlah pengguna narkotika semakin meningkat di Kota Samarinda.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian tentang upaya pencegahan pere-daran narkotika dilakukan di Yayasan Peduli Narkotika Laras dan Sekata di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan riset evaluasi yang dilaksanakan dengan memadukan metode kuantitatif (utama) dengan kualitatif (penunjang). Teknik yang digunakan dalam kegiatan evaluasi adalah observasi, kuesioner, wawan-

cara, studi dokumen dan teknik *Focussed Group Discussion*. Pengumpulan data dilakukan terhadap 30 responden residen (pengguna yang sedang direhabilitasi) sedang melaksanakan rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika. Data deskriptif diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang tinggal di sekitar yayasan rehabilitasi narkotika .

Teknik observasi menggunakan *check-list* terkait *context* dan *process* penyalahguna Narkotika dengan pedum dan juknis. Dengan demikian metode yang digunakan dalam riset evaluasi ini adalah *mixed methods*. Model evaluasi yang digunakan adalah *Context, Input, Process and Product* (CIPP). Konsep evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan pada tahun 1965 oleh D. Stufflebeam (1985). Evaluasi model yang diformulasikan Stufflebeam terdiri dari empat dimensi, yaitu: *context, input, process, dan product*. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu komponen dan proses sebuah program kegiatan. Dalam konteks penelitian ini, proses yang dievaluasi adalah pengetahuan residen tentang mekanisme pelaksanaan Penanganan Korban Pengguna oleh Yayasan Peduli Narkotika di Kota Samarinda yaitu IPWL “Laras” dan IPWL “Sekata”. Evaluasi proses juga menggali hambatan atau kendala yang ditemukan oleh residen dalam melaksanakan program pencegahan peredaran narkotika. Data yang dihasilkan akan sangat berguna bagi mengetahui pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan zat terlarang agar dapat pengambil keputusan dalam menentukan dalam upaya pencegahan penyalanggunaan zat terlarang.

C. Hasil dan Pembahasan

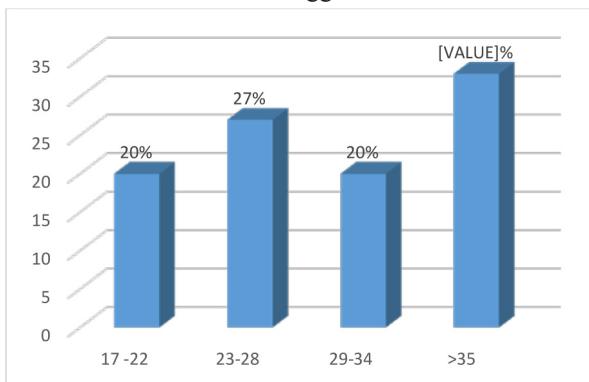
Seseorang penyalah guna narkotika pola perilaku menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang

tidak sesuai fungsinya. Pengguna narkotika pada awal menggunakan zat terlarang tidak satupun yang merencanakan untuk menggunakankannya. Kebanyakan mereka mengikuti teman yang sudah menyalahgunakan narkotika lebih dahulu. Mereka tahu akibatnya, tahu nilai-nilai yang melarang, serta mengetahui sanksi berat apabila tertangkap. Namun ranah yang melingkupi dan modal sosial berupa jaringan yang bagi mereka sangat berharga membuat mereka abai dengan modal budaya yang selama ini melekat pada mereka. Keinginan tetap diakui sebagai bagian dari kelompok dan daya tarik sensasi keikmatan membuat mereka akhirnya mencoba menyalah gunakan Narkotika .

Pemakai Narkotika laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Habitus, modal dan ranah membentuk praktik berupa sikap dan perilaku pemakai Narkotika. Gaya hidup hedonis membuat pemakai menjadi adiktif dalam mengonsumsi Narkotika, sehingga pemakai yang sedang menjalani rehabilitasi, memiliki kekhawatiran akan menemui kesulitan untuk lepas dari Narkotika. Mereka juga menyadari akan sulitnya menghindari godaan merupakan ranahnya (Sigit Pranawa, 2017).

Identitas responden pada penelitian tentang upaya pencegahan peredaran narkotika melalui Yayasan Peduli Narkotika (YPN), berdasarkan jenis kelamin dan usia diperoleh bahwa jenis kelamin residen di YPK yaitu: Yayasan Laras dan Yayasan Peduli Narkotika Sekata 77.00% berjenis kelamin laki-laki dan 23.00% berjenis kelamin perempuan. Usia residen yayasan peduli beragam karena yayasan menerima responden tidak membedakan usia, dan responden yang masuk selain daftar sendiri, bersama keluarga dan residen, selain itu berdasarkan hasil garukan yang diserahkan oleh aparat keamanan.

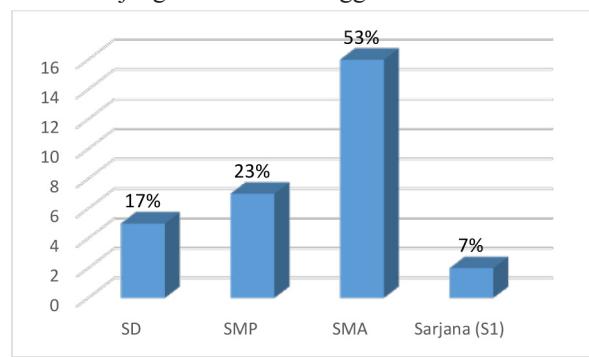
Grafik 1.
Usia Residen Pengguna Narkotika



Sumber: Data primer, 2019

Berdasarkan data Grafik 1 diatas diinformasikan bahwa usia responden penghuni balai 20.00% usia dari 17-22 tahun, 27.00% pada rentang usia 23-28 tahun, 20.00% pada rentang usia 29-34 tahun dan 33.00% pada usia diatas 35 tahun. Responden terbanyak berusia di atas 35 tahun sebanyak 33 %, kemudian usia kedua tertinggi antara 23-28 tahun 27% merupakan usia produktif manusia banyak melakukan aktifitas yang produktif untuk memajukan mobilitas. Namun dengan rusaknya SDM karena terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, kualitas yang harusnya bisa jadi unggulan malah menjadi rendah, jika tidak cepat ditangani permasalahan ini akan meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Samarinda.

Grafik 2.
Jenjang Pendidikan Pengguna Narkotika



Sumber: Data primer, 2019

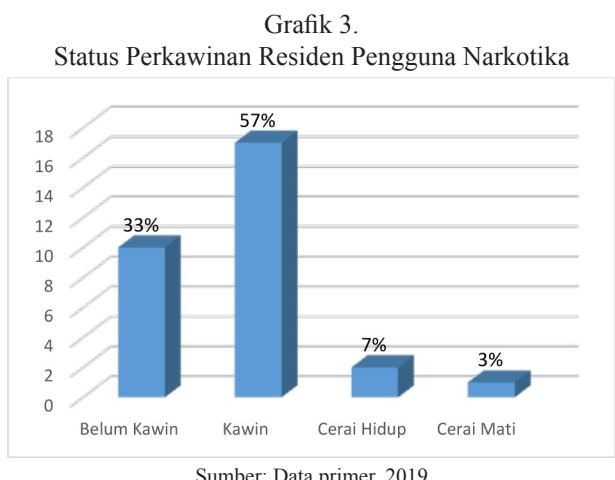
Pengguna narkotika berdasarkan tingkat pendidikan, Pendidikan responden yang paling

banyak berpendidikan jenjang SMA sedera-jat sebanyak 53.00%, jenjang SMP sebanyak 23.00%, jenjang SD sebanyak 17.00%, dan jen-jang Sarjana sebanyak 7.00%. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat pengguna narkotika sepanjang 2018, kebanyakan adalah anak muda. Fakta ini membuktikan bahwa dampak buruk dari kemajuan teknologi, dirasakan di Samarinda membuat anak muda terutama anak sekolah mudah melakukan interaksi pemesanan narkotika secara daring (*online*).

Faktor penyebab pengguna narkotika meningkat akibat maraknya peredaran narkotika, faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan narkotika dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, berperan dalam penggunaan narkotika adalah faktor kepribadian anti sosial dan psikopatik, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, kelompok residen, dan narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Faktor pendorong pengguna narkotika faktor internal atau dari dalam diri sendiri seperti kepribadian, fisik, dan faktor dari luar seperti faktor residen, faktor sosial dengan lingkungan atau pergaulan dan terakhir dengan sedikit penalaran penelitian faktor kemudahan memperoleh narkotika, lingkungan (residen, sekolah, keluarga dan masyarakat), faktor individu itu sendiri. Masalah penyalahgunaan narkotika tidak dipandang sebagai simtom dari penyakit, tetapi lebih dilihat sebagai masalah kebiasaan. Perspektif teori belajar dinyatakan bahwa perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika adalah perilaku yang dipelajari. Narkotika sering disebut zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Status perkawinan responden dapat dilihat berikut ini: responden status kawin paling banyak.



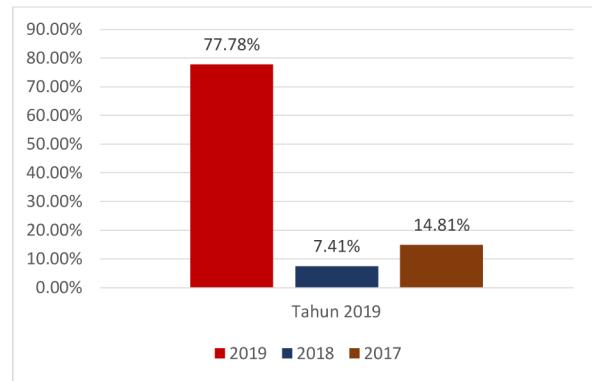
Status perkawinan residen sebanyak 57.00% berstatus kawin dan merupakan yang paling banyak, belum kawin sebanyak 33.00%, cerai hidup sebanyak 7.00% dan cerai mati sebanyak 3.00%. artinya responden yang berstatus kawin paling banyak. Pengguna yang sudah menikah lebih memiliki masalah yang berhubungan dengan keluarga, kemampuan sosial yang terbatas, tak punya pekerjaan, pendidikan rendah hingga penyakit jiwa atau infeksi penyakit menular. Jika terakumulasi, hal ini dapat menyebabkan stres dan mendorong mantan pecandu untuk mencari jalan pintas keluar dari masalahnya. Seringkali mereka relapse kembali menggunakan narkotika, kendati mantan penyalahgunaan sudah lepas dari ketergantungan narkoba, namun sugesti atau kecenderungan untuk menggunakan masih akan terasa. Residen memiliki sugesti dipicu secara mendadak dan tak terkenalikan oleh permasalahan keluarga, bila situasi batin orang mulai kacau mengakibatkan *relapse* atau kambuh lagi.

Pengguna narkoba dan lingkungan dekatnya, merupakan masalah besar yang menjadikan semua upaya menjadi tak punya arti sama sekali. Setelah berbulan-bulan bertahun menjalani terapi, rehabilitasi, dan rehabilitasi dengan biaya yang begitu besar, tiba sirna begitu saja. Untuk kembali ke posisi semula harus merangkak dari awal lagi. Sebab *relapse* bagi keluarga korban, berarti menghilangkan harapan. Berdasarkan hal tersebut, banyak ahli ber-

pendapat bahwa sugesti untuk kambuh adalah bagian dari penyakit ketergantungan hasil penelitian terdapat hubungan bermakna dukungan residen dengan kejadian relapse, untuk mencegah hal tersebut agar meningkatkan komunikasi dengan orangtua dalam penatalaksanaan pengobatan, baik melalui pendidikan kesehatan bagi kesembuhan klien (Yulia, 2017).

Berdasarkan proses pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan Narkotika diinformasikan pada kategori efektif yaitu sebesar 80.00%, cukup efektif pada kategori 7.00% dan 13.00% menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial di yayasan sangat efektif. Ini menjelaskan bahwa perlu peningkatan dalam hal layanan pada residen di balai. Agar residen yang mengharapkan pemulihan dari mengikuti rehabilitasi dapat merasakan manfaat layanan. Hasil wawancara yang menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial hanya berlangsung 4-6 bulan, menyebabkan residen merasa kurang lama dalam pelayanan yang diberikan yayasan. Waktu yang cukup singkat menurut residen kurang untuk pemulihan residen hingga residen tidak kambuh/relapse.

Grafik. 4
Pertama Kali Residen Masuk Yayasan



Sumber data: Primer, 2019

Berdasarkan gambar diatas diinformasikan bahwa tahun awal residen masuk ke balai dan mendapat layanan rehabilitasi yaitu pada tahun 2019 sebanyak 77.78% merupakan residen terbanyak yang direhabilitasi dibandingkan tahun 2018 maupun tahun 2017, hal tersebut karena

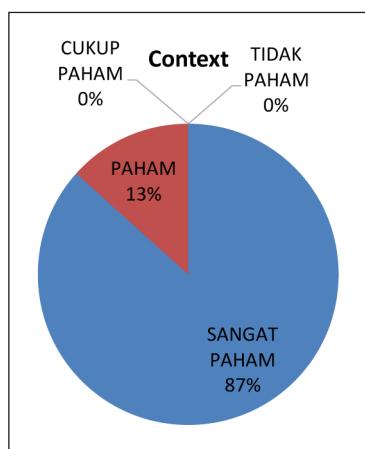
responden terbanyak yang sedang menjalani rehabilitasi. Sedangkan responden lain sebagian besar sudah pulang telah selesai mengikuti rehabilitasi rehabilitasi diberikan selama 4 bulan. Residen baru mulai masuk pada tahun 2018 sebanyak 7.41% dan pada tahun 2017 sebanyak 14.81%.

a. Upaya Pencegahan bagi Korban Penyalahgunaan Zat Terlarang oleh Yayasan Peduli Narkotika Ditinjau dari Aspek Context

Evaluasi konteks (*context evaluation*) pemahaman residen dalam mencegah penyalahguna Narkotika merupakan evaluasi yang berhubungan dengan lingkungan dimana program dilaksanakan, yang secara khusus berpengaruh terhadap konteks masalah yang menjadi komponen dalam program. Evaluasi *context* menggambarkan secara jelas tentang tujuan upaya penanganan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini, evaluasi *context* diukur dari tiga indikator, yaitu: 1) dukungan perangkat perundungan (legalitas) dari program pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika; 2) tujuan yang akan dicapai; dan 3) dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait terhadap layanan rehabilitasi korban penyalahguna Narkotika .

Grafik 5.

Aspek *Context* Pemahaman Residenterhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika



Sumber data: Primer, 2019

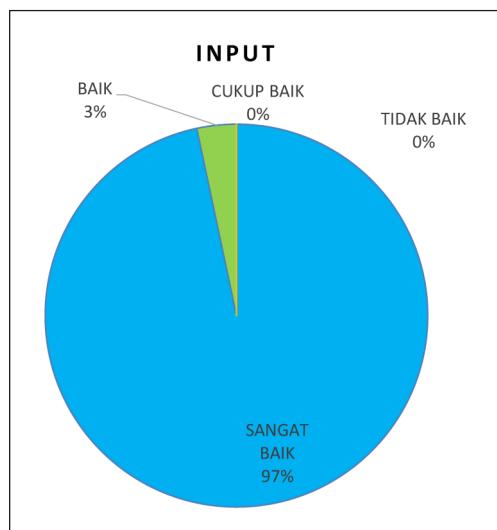
Dari gambar diatas dinformasikan bahwa masyarakat memahami tentang pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna Narkotika di balai Laras dan Sekta Samarinda yang ditinjau dari aspek konteks, menyebutkan 87.00% residen sangat memahami tujuan, manfaat dan sasaran lembaga rehsos Narkotika, dan sebanyak 13.00% residen di IPWL Laras dan IPWL Sekta menyebutkan memahami keberadaan yayasan. Ini menjelaskan bahwa keberadaan IPWL Laras dan IPWL Sekta yang ditinjau dari aspek konteks berupa tujuan IPWL, manfaat IPWL, dan sasaran lembaga rehsos telah dipahami residen.

b. Pemahaman Residen terhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Aspek Input

Input salah satu sasaran evaluasi dalam model CIPP yang diformulasikan Stufflebeam (1985), merupakan evaluasi komponen dan proses sebuah program kegiatan. Orientasi utama evaluasi *input* adalah menentukan cara bagaimana tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, prosedur kerja untuk mencapainya. Berdasarkan hal tersebut maka komponen masukan (*input evaluation*) meliputi sumber daya manusia yaitu berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika seperti pengelola, residen, eks residen, keluarga eks residen, masyarakat dan residen; prosedur dan aturan yang diperlukan, sarana dan prasarana, dana atau anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 6.

Efektivitas Komponen pada Aspek *Input* Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika



Sumber data: Primer, 2019

Bagan di atas menunjukkan komponen *input* dilihat dari prosedur untuk dalam kategori tinggi atau pada kategori sangat baik (97.00%). Hasil tersebut didukung adanya SDM yang cukup kompeten dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika, dan pelaksanaan sudah mengacu pada pedoman umum dan juknis. Komponen *input* per wilayah dilihat dari sarana dan prasarana pada kategori baik. Temuan di lapangan terlihat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika telah didukung SDM yang kompeten, ada sinergitas antara Kementerian/Lembaga, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan. Namun kelengkapan psikiater dan dokter yang tinggal di lokasi tidak ada.

Komponen *input* yang dilihat dari pendanaan nilainya pada kategori memadai. Data temuan lapangan, pendanaan dalam pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika baik di IPWL Laras dan IPWL Sekata alokasi dari APBN dan

mandiri. Residen ada sebagian tidak dipungut biaya selama menjalani rehabilitasi sosial di yayasan. Semua biaya selama menjalani rehabilitasi gratis khusus residen di IPWL Laras, di IPWL Sekata masih dipungut biaya untuk menuhi biaya hidup kebutuhan residen selama melakukan layanan rehabilitasi.

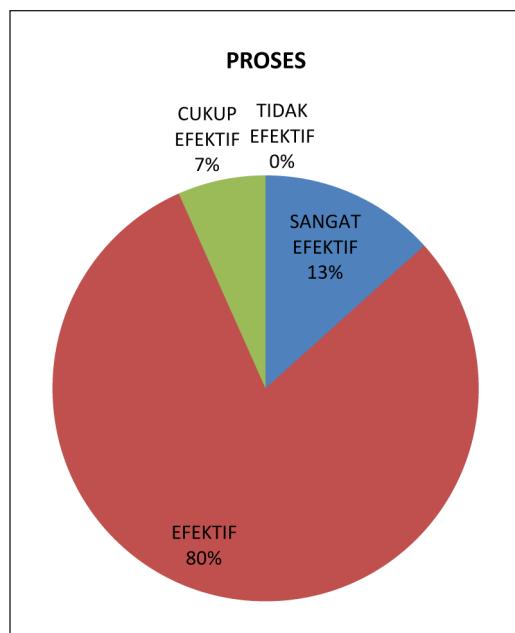
Jika melihat dari tiga komponen pembentuk aspek input, hal yang perlu diperbaiki adalah pada komponen SDM perlu ditingkatkan, komponen sarana prasarana, pada temuan di lapangan menjelaskan bahwa sarana dan prasarana di balai perlu perawatan dan perlu perbaikan.

c. Pemahaman Residen terhadap Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahguna Narkotika Ditinjau dari Aspek Proses

Evaluasi proses (*process evaluation*) menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985), adalah mengecek pelaksanaan suatu rencana atau program untuk memberikan *feedback* bagi manager dan staf tentang seberapa aktivitas program yang berjalan sesuai dengan jadwal, dan menggunakan sumber yang tersedia secara efisien, memberikan bimbingan untuk memodifikasi rencana agar sesuai dengan yang dibutuhkan, mengevaluasi secara berkala seberapa besar yang terlibat dalam aktivitas program dapat menerima dan melaksanakan peran atau tugasnya. Adapun proses yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah mekanisme dalam pelaksanaan program pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika. Ada sembilan komponen yang digunakan untuk mengukur dan menilai evaluasi proses pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna Narkotika, yaitu: 1) sasaran; 2) asessmen awal; 3) layanan medis; 4) layanan rehsos; 5) rujukan. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan pada gambar berikut:

Grafik 7.

Pemahaman Residen pada Aspek *Proses* Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika



Sumber data: Primer, 2019

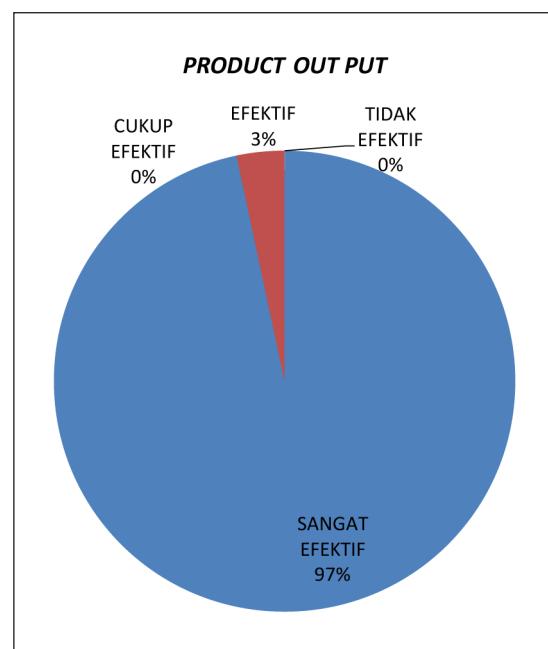
Berdasarkan gambar diatas residen pengguna narkotika di Yayasan diinformasikan bahwa proses pelayanan rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan narkotika diinformasikan pada kategor efektif yaitu sebesar 80.00%, cukup efektif pada kategori 7.00% dan 13.00% menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial di yayasan sangat efektif. Hal ini menjelaskan bahwa perlu peningkatan dalam hal layanan kepada residen di balai, residen dapat secara cepat mendapatkan pemulihan dari mengikuti rehabilitasi dapat merasakan manfaat layanan. Dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa layanan rehsos hanya berlangsung 4-6 bulan, menyebabkan residen merasa kurang dalam pelayanan yang diberikan yayasan. Waktu yang cukup singkat menurut residen kurang untuk pemulihan residen hingga residen tidak kambuh/relapse.

d. Pemahaman Residen pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Produk

Evaluasi Hasil (*product evaluation*) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan. Menurut Stufflebeam & Shinkfield (1985) tujuan dari *Product Evaluation* adalah untuk mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok sasaran. Hasil produk layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika dapat digambarkan seperti gambar berikut.

Gambar 8.

Efektivitas Komponen pada Aspek *Product Output* Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika



Sumber data: Primer, 2019

Aspek *product* berupa *output* hasil pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika: 97.00% menjelaskan sangat efektif, 3.00 % menyebutkan layanan rehabilitasi efektif. Dilihat dari perolehan pendapat keluarga residen terhadap layanan rehabilitasi sosial masih dianggap kurang efektif. Perlu ada perbaikan

dalam proses penerimaan awal, aspek konteks, aspek input, aspek proses dan aspek product. Dari sumber hasil wawancara dengan pengelola yayasan rehabilitasi menyebutkan bahwa IPWL Laras dan IPWL Sekata menggunakan metode *therapeutic community* (TC) yaitu terapi dengan metode menggunakan komunitas sebagai sarana perubahan dan melibatkan profesional dengan latar belakang pendidikan berbeda terutama yang mengerti akan perilaku dan kejiwaan residen. Pendekatan keluarga ini dilakukan mengingat bahwa residen terdiri dari atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.

E. Penutup Kesimpulan

Pemahaman residen dalam pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda dilihat dari komponen *input* dilihat dari prosedur untuk dalam kategori tinggi atau pada kategori sangat baik (97.00%). Hasil tersebut didukung adanya SDM yang cukup kompeten dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna Narkotika , dan pelaksanaan sudah mengacu pada pedoman umum dan juknis.

Pemahaman residen tentang layanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna ditinjau dari aspek *contex* yaitu pemahaman terhadap keberadaan IPWL Laras dan IPWL Sekata di Kota Samarinda Kalimantan Timur pada taraf sangat memahami yaitu sebesar 87.00%.

Pemahaman residen tentang layanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika ditinjau dari aspek *input* yaitu terkait keterse- diaan sarana dan prasarana, SDM, dan dana di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda Kalimantan Timur menurut residen pada kategori sangat baik yaitu sebesar 97.00%.

Rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda Kalimantan Timur ditinjau dari aspek

proses yaitu proses pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahguna Narkotika di IPWL Laras dan IPWL Sekata Samarinda Kalimantan Timur pada taraf efektif yaitu sebesar 80.00%.

Rekomendasi

1. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna Narkotika perlu dilaksanakan secara bersama-sama oleh Dinas Sosial, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), LSM peduli Keluarga pengguna Narkotika dan seluruh masyarakat Kota Samarinda.
2. Perlu meningkatkan kualitas/mutu SDM melalui pendidikan dan latihan tentang narkotika dan kuantitas SDM pengelola, peningkatan perawatan sarana dan prasarana yayasan.
3. Perlu kerjasama antarlembaga peduli narkotika untuk memperkuat pencegahan, mempercepat penanggulangan dan pembe-rantasan penyalahgunaan narkotika dalam meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi dimulai dari penerimaan awal, pelayanan medis dan pemenuhan tenaga medis dan psikiater, peningkatan layanan rehabilitasi dengan pendekatan yang telah diterapkan (TC) dimodifikasi se-suai dengan kebutuhan residen.
4. Perlu dukungan residen, keluarga, pemerintah dan masyarakat dalam memodifikasi kurikulum vokasional dalam peningkatan potensi kewirausahaan residen, agar mam-pu mandiri selepas rehabilitasi.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan kepada Dinas Sosial Kota Samarinda yang telah membantu, mendampingi hingga pelaksanaan FGD dalam penelitian tentang narkotika. Kami mengucapkan terimakasih kepada IPWL "Laras" dan IPWL "Sekata" Kota Samarinda, telah menerima kami untuk melaku-kan penelitian dan ngumpulan data kepada residen, residenda keluarga serta membantu segala keperluan kami selama, sehingga kami

dapat menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian tentang narkotika di Samarinda.

Pustaka Acuan

- Afiatin, T. (2008). Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amriel, R. I. (2008). Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba . Jakarta: Salemba Humanika.
- Anja, C., dkk.. 2010. Tobacoo, Cannabis and ther Illicit Drug Use among Finish
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2016, Desember). Statistik Kriminal 2016. Jakarta: BadanPusat Statistik.
- BNN, 2017, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017, Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Dharana Lastarya (2006), Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Pakarkarya. Jakarta.2006.hlm.15.
- Depkes RI. (2009). Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Hawari, D. (2006). Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Aditif) Edisi Kedua. Jakarta: FK-UI Pres.
- Hidayati, Putri E. dan Indarwati. (2012). Gambaran Pengetahuan dan UpayaPencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di SMKNegeri 2 Sragen Kabupaten Sragen. GASTER, Vol. 9, No. 1 Februari2012.
- Humas BNN. (2015, Desember 23). Press Release Akhir Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional. Executive Summary Press Release Akhir Tahun2015.
- Hurlock, E. B. (2006). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan SepanjangRentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Kompas, 2019, "BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat", <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat>.
- La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. Implementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia. Hasanuddin Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sigit Pranawa dan Rahesli Humsona, 2017, Fenomena Merebaknya Narkotika Dan Gaya Hidup, Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Antropologi Volume I No. 01 Tahun 2017 ISSN : 2597-9264
- Pamaska, R. (2015). Hubungan Pemakaian Narkoba dengan Timbulnya Halusinasi pada Pasien di BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatra Utara:<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/47104>.
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2009). Human Development, Edisi10 Perkembangan Manusia Buku 2. Jakarta: Salemba Humanika.
- Siregar, M. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotik Pada Remaja. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 100-105.
- Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A.J. (1985). Systematic evaluation:aself-instructional guide to theory and practice. Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi lengkapi dengan metode
- Wulandari, C. M., Retnowati, D. A., Handojo, K. J., & Rosida, R. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan NARKOTIKA pada Masyarakat di Kabupaten Jember. *Jurnal Farmasi Komunitas*.
- Yulia, A. (2017). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Kejadian Relapse Pada Klien Ketergantungan Narkotika. *UNES Journal of Social And Economics Research*. <https://doi.org/10.31933/ujser.2.1.085-096.2017>

Kemiskinan dan Karakteristik Perumahan Penduduk di Kabupaten Mamasa Tahun 2018

Poverty and Characteristics of Population Housing in Mamasa Regency 2018

Julian Emba Mangosa*

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Jalan R. E. Martadinata No. 10 Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat

email: julian.emba@bps.go.id, No Telpon. 0726-22103

diterima tanggal 07 November 2019 direvisi tanggal 22 November 2019 disetujui tanggal 31 Desember 2019

Abstract

Trends in the poverty index in Mamasa District in the past few years showed a low decline and even tended to be stagnant. Housing condition was one of the poverty indicators. The interesting thing was that the poverty rate in Mamasa Regency was lower than the surrounding districts that had better quality housing. The purpose of this study was to get a picture of the characteristics of community housing and to get an idea whether there was a significant influence between housing conditions and the status of household poverty. The characteristics of the housing referred to in this study were the status of home ownership, floor area per capita, type of roof, walls and widest floor, access to clean water, toilet facilities, type of fuel used in households, and lighting sources. The method used was descriptive and inferential binary logistic regression. The descriptive analysis results showed that the characteristics of community housing in Mamasa Regency were at a low value. This was explained by the percentage of home ownership and its own Toilet and Washing facilities, the use of clean water for drinking, and the use of State Company Electricity as a lighting source which was at the lowest index in West Sulawesi. The results of the binary logistic regression inferential analysis showed that there was a significant influence between the status of home ownership and the type of fuel used in households with the status of poverty. The government needs to work to improve the quality of life of the community, especially the fulfillment of access to clean water (through the expansion of Community-Based Drinking Water and Sanitation Programs or Pamsimas), lighting (electricity entering villages), and increasing community purchasing power (through targeted empowerment and social assistance programs). In addition, further analysis is needed regarding the characteristics of housing and poverty.

Keywords: poverty, housing, welfare

Abstrak

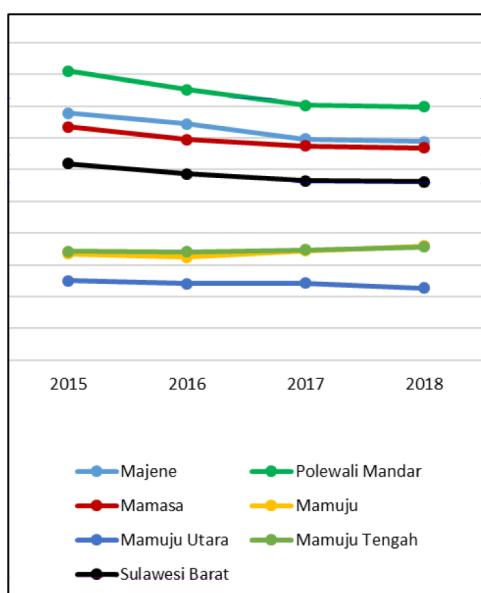
Tren angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan yang rendah bahkan cenderung stagnan. Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator kemiskinan. Hal yang menarik adalah angka kemiskinan Kabupaten Mamasa lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya yang memiliki kualitas perumahan yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran karakteristik perumahan penduduk serta mendapatkan gambaran apakah ada pengaruh yang signifikan antara kondisi tempat tinggal dan status kemiskinan rumah tangga. Unsur karakteristik perumahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah status kepemilikan rumah, luas lantai per kapita, jenis atap, dinding, dan lantai terluas, akses air bersih, fasilitas MCK, jenis bahan bakar yang digunakan dalam rumah tangga, serta sumber penerangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan inferensia regresi logistik biner. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa karakteristik perumahan penduduk di Kabupaten Mamasa berada pada nilai yang rendah. Hal ini dijelaskan dengan persentase kepemilikan rumah dan fasilitas MCK sendiri, penggunaan air bersih untuk minum, serta penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan yang berada pada nilai terendah di Sulawesi Barat. Hasil analisis inferensia regresi logistik biner menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara status kepemilikan rumah dan jenis bahan bakar yang digunakan dalam rumah tangga dengan status kemiskinan rumah tangga. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama pemenuhan akses air bersih (melalui perluasan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau Pamsimas), penerangan (listrik masuk desa), serta peningkatan daya beli masyarakat (melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial). Selain itu diperlukan analisis lebih lanjut terkait karakteristik perumahan dan kemiskinan.

Kata Kunci: kemiskinan, perumahan, kesejahteraan

A. Pendahuluan

Angka kemiskinan di Indonesia yang telah menyentuh satu digit merupakan *hot issue* dan menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini di media nasional. Akan tetapi, di wilayah timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua), kemiskinan secara relatif masih menjadi perhatian utama dari pemerintah. Kemiskinan merupakan penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi (Nasir dkk, 2008).

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga dianggap sebagai prioritas pembangunan (Nasir dkk, 2008). Bahkan program sosial yang telah digalakkan oleh pemerintah beberapa tahun belakangan ini yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan tidak memberi kontribusi yang signifikan. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat yang cenderung stagnan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Bahkan tren penurunan penduduk miskin di Kabupaten Mamasa tergolong kecil dan belum mampu mendekati tren kemiskinan provinsi. Tren kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1.
Tren Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat,
Tahun 2015-2018
Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Mamasa selalu di atas kemiskinan provinsi, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya.

Hal yang menarik di lapangan adalah kualitas perumahan penduduk di Kabupaten Mamasa justru lebih rendah daripada kabupaten di sekitarnya. Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (2018) kemiskinan rumah tangga berkaitan dengan kondisi fisik rumah serta fasilitas perumahan di dalamnya.

Salah satu aspek yang menjadi penentu kemiskinan adalah kualitas perumahan yang dimiliki oleh rumah tangga. Mulai dari akses air bersih, kondisi atap, lantai, dan dinding, luas lantai perkapita, dan lain-lain. Oleh karena itu, karakteristik perumahan diduga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga (Madina dkk, 2014).

Di Indonesia, penelitian terkait pengaruh dari karakteristik perumahan terhadap kemiskinan masih sangat jarang. Kalaupun ada, biasanya dikaitkan dengan variabel-variabel yang lebih umum digunakan, misalnya luas lantai, fasilitas BAB, sumber penerangan, dan sebagainya langsung tergabung menjadi variabel kualitas rumah (Pramita dkk, 2015). Penelitian lain terkait kemiskinan lebih banyak membahas tentang pengaruh pendidikan, demografi anggota rumah tangga (gender, usia jumlah ART), serta karakteristik ketenagakerjaan.

Untuk perumahan, penelitian yang selama ini dilakukan hanya seputar kepemilikan aset. Rendahnya tingkat kepemilikan aset merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, penelitian bermanfaat untuk memperkaya referensi ilmiah terkait kualitas perumahan dan kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu kelompok tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Suhariyanto: 2011). Pemahaman terhadap definisi tersebut

dapat menjadi sangat luas. Misalnya dalam hal pemenuhan hak-hak dasar yang tidak semua bisa diukur secara seragam. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi (Nasir dkk, 2008). Di Indonesia, kemiskinan diukur oleh BPS melalui konsep *basic needs approach*, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran karakteristik perumahan penduduk di Kabupaten Mamasa tahun 2018
2. Mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel karakteristik perumahan dengan status kemiskinan rumah tangga.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik perumahan sebagai variabel predictor dan status kemiskinan sebagai variabel tak bebas. Selengkapnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Variabel Prediktor dan Variabel Tak Bebas

Variabel (1)	Kategori (2)
Variabel Tidak Bebas:	
Status Kemiskinan	1. Miskin 2. Tidak Miskin
Variabel Bebas:	
1. Status Kepemilikan Rumah	1. Milik Sendiri 2. Lainnya (Kontrak/Sewa/Bebas Sewa)
2. Luas lantai Perkapita	1. < 9m ² 2. > 9m ²
3. Jenis Atap Terluas	1. Beton/seng/genteng 2. Bambu/jerami/ijuk/lainnya
4. Jenis Dinding Terluas	1. Bukan tembok 2. Tembok
5. Jenis Lantai Terluas	1. Kayu/papan/bambu/tanah 2. Keramik/tegel/semen/bata merah
6. Fasilitas MCK	1. Bersama/umum/tidak ada 2. Milik sendiri
7. Sumber Air Minum Utama	1. Air bersih 2. Lainnya
8. Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak	1. Kayu Bakar 2. Lainnya (listrik/LPG/tidak memasak)
9. Sumber Penerangan	1. Non PLN 2. PLN

B. Penggunaan Metode Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Mamasa tahun 2018 dari Badan Pusat Statistik. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 472

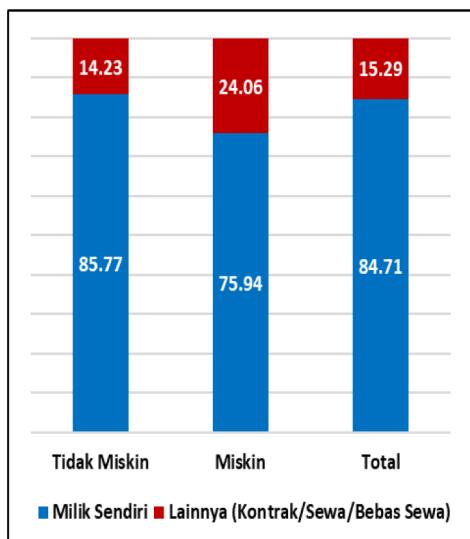
rumah tangga sampel yang tersebar di wilayah kabupaten Mamasa. Secara metodologi BPS, sampel ini dapat digunakan untuk memberikan estimasi hingga level kabupaten.

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Dalam hal ini adalah untuk memberikan gambaran karakteristik perumahan penduduk. Sementara itu, teknik analisis inferensia yang digunakan adalah regresi logistik biner yang diolah dalam aplikasi SPSS 22 untuk menjawab tujuan penelitian ini terkait pengaruh dari karakteristik perumahan penduduk terhadap status kemiskinan rumah tangga. Regresi logistik biner merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel tak bebas yang bersifat biner dengan variabel prediktornya (Hosmer dan Lemeshow, 2000).

C. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Perumahan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap status kepemilikan rumah, terdapat 84,96% rumah tangga yang memiliki rumah milik sendiri merupakan angka paling rendah di Sulawesi Barat pada tahun 2018 (Gambar 1).



Gambar 1.
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Mamasa,
Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Pada gambar 1, terlihat bahwa pada rumah tangga miskin, 75,94 persen rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri. Sementara itu, 24,06 persen masih belum menempati rumah milik sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan membangun rumah milik sendiri sehingga memilih untuk menempati rumah bebas sewa yang dimiliki oleh sanak keluarga.

Menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2002), kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas tersebut meliputi tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Keleluasaan aktivitas di dalam rumah dapat tercermin dari luas lantai perkapita (m^2).

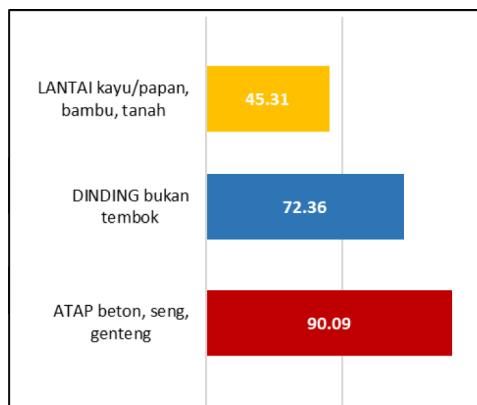


Gambar 2.
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Luas Lantai Perkapita di Kabupaten Mamasa, Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Berdasarkan kajian pemerintah, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 orang) adalah 36 m atau $9 m^2$ per jiwa (Badan Standar Nasional Indonesia 2004). Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita $< 9 m^2$ yaitu sebesar 52,53 persen. Sementara itu, rumah tangga tidak mis-

kin yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita < 9 m² sebesar 29,87 persen

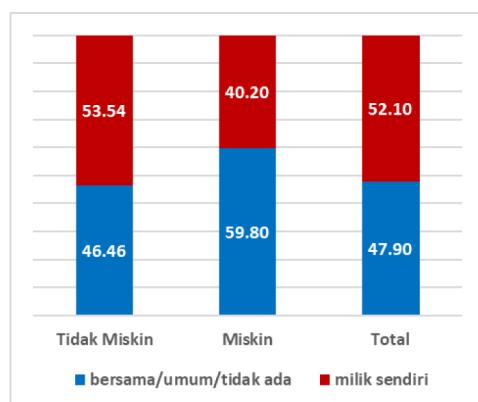
Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap, dinding, dan lantai terluas (Kurnianingrum, 2015). Pada tahun 2018, 90 persen rumah tangga menggunakan atap beton, seng, atau genteng). Penggunaan kayu sebagai dinding rumah di Kabupaten Mamasa juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh akses masyarakat untuk mendapatkan kayu bakar lebih mudah dan murah. Sementara itu, penggunaan kayu, bambu, maupun tanah sebagai lantai rumah masih tergolong tinggi.



Gambar 3.

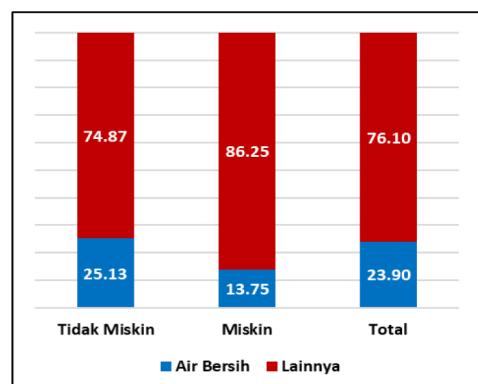
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap, Dinding, dan Lantai Terluas di Kabupaten Mamasa, Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Sanitasi yang baik tentu akan berdampak pada kondisi kesehatan rumah tangga. Salah satu kondisi yang mencerminkan kondisi sanitasi adalah fasilitas MCK (Imroatus dkk, 2014). Di Kabupaten Mamasa, perbandingan fasilitas MCK milik sendiri dan bersama/umum/tidak ada cukup berimbang. Meskipun demikian, angka ini adalah yang terendah di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan sanitasi masih ketinggalan dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Mayoritas penduduk miskin di Kabupaten Mamasa memiliki fasilitas MCK berupa fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, terutama pada wilayah perdesaan.



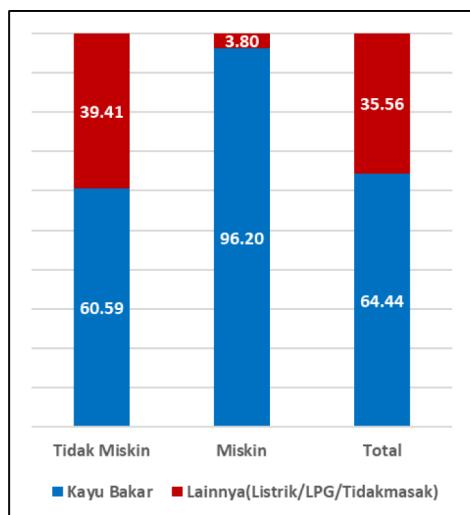
Gambar 4.
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas MCK
di Kabupaten Mamasa, Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencerminkan sehat tidaknya rumah tangga tersebut. Ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih di Kabupaten Mamasa hanya sebesar 23,90 persen, paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan pengelolaan air yang belum optimal. Air bersih yang dimaksud adalah air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter.



Gambar 5.
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Jenis
Sumber Air Minum di Kabupaten Mamasa, Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

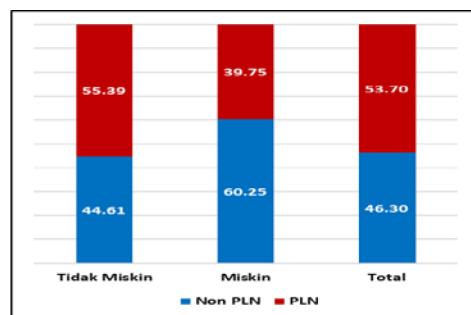
Untuk jenis bahan bakar, sebagian besar rumah tangga masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak (64,44 persen). Sebagian besar masyarakat Kabupaten Mamasa menggunakan bahan bakar tradisional untuk memasak. Untuk mendapatkan kayu bakar juga tergolong mudah, serta akses kepada penggunaan bahan bakar modern seperti gas LPG juga masih rendah untuk wilayah perdesaan.



Gambar 6.

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar di Kabupaten Mamasa, Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Hal menarik adalah penggunaan bahan bakar utama di kalangan rumah tangga miskin. Penggunaan kayu bakar sangat mendominasi pada rumah tangga miskin. Hal ini berkaitan dengan besar biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan bakar selain kayu bakar, sehingga masyarakat memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak yang bisa dikatakan sangat mudah didapatkan dan tidak memerlukan biaya (Dwiprabowo, 2010).



Gambar 7.
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Mamasa, Tahun 2018
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Pembangunan jaringan listrik negara juga belum optimal menjangkau masyarakat di daerah pelosok. Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN masih sekitar 53,70 persen pada tahun 2018, terendah di Sulawesi Barat. Pada rumah tangga miskin, persentase penggunaan listrik Non PLN sebagai sumber penerangan lebih tinggi daripada listrik PLN. Listrik Non PLN yang dimaksud adalah listrik yang berasal dari mesin turbin dan dikelola oleh desa.

Hubungan Karakteristik Perumahan Penduduk terhadap Kemiskinan

Studi ini menggunakan regresi logistik biner untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel karakteristik perumahan penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten Mamasa pada tahun 2018. Langkah pertama adalah menguji secara serentak terhadap variabel bebas yang digunakan.

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	34.260	9	.000
	Block	34.260	9	.000
	Model	34.260	9	.000

Gambar 8.
Uji independensi variabel X dan Y
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Berdasarkan gambar 8, diperoleh nilai Sig. Model kurang dari nilai alpha maka kita menolak H_0 pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil

ini dapat memberikan kesimpulan bahwa variabel bebas yang digunakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga. Hal ini juga bisa berarti bahwa minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga.

Observed			Predicted			Percentag e Correct	
			Status Kemiskinan		Percentag e Correct		
			Tidak Miskin	Miskin			
Step 1	Status Kemiskinan	Tidak Miskin	421	0	100.0	89.2	
		Miskin	51	0	0.0		
	Overall Percentage						

a. The cut value is .500

Gambar 9.

Tabel klasifikasi

Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Tabel 9 menggambarkan persentase ketepatan model dalam mengklasifikasikan observasi. Persentase ketepatan klasifikasi sebesar 89,2 persen, artinya dari 472 obeservasi, terdapat 421 observasi yang pengklasifikasianya tepat oleh model regresi logistik.

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	11.850	8	.158

Gambar 10.
Tabel hasil uji chi-square
Sumber (Diolah dari Susenas Maret 2018)

Tabel tersebut merupakan uji chi-square dimana nilai p-value sebesar $0,158 > 0,05$. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model telah cukup menjelaskan data.

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	90% C.I. for EXP(B)		Ket.	
							Lower	Upper		
Step 1 ^a	Status_Rumah	.975	.408	5.707	1	.017	2.652	1.355	5.190	Signifikan
	LKap	-.367	.322	1.302	1	.254	.693	.408	1.176	Tidak Signifikan
	ATAP	-.187	.473	.157	1	.692	.829	.381	1.804	Tidak Signifikan
	DINDING	.014	.527	.001	1	.978	1.014	.426	2.415	Tidak Signifikan
	LANTAI	.028	.427	.004	1	.948	1.028	.510	2.074	Tidak Signifikan
	FAS_BAB	-.187	.322	.336	1	.562	.830	.489	1.409	Tidak Signifikan
	Penerangan	.351	.333	1.112	1	.292	1.421	.821	2.459	Tidak Signifikan
	Bahan_Bakar	-2.571	.715	12.915	1	.000	.076	.024	.248	Signifikan
	air_bersih	-.090	.514	.031	1	.861	.914	.392	2.129	Tidak Signifikan
	Constant	.583	2.274	.066	1	.798	1.791			

a. Variable(s) entered on step 1: Status_Rumah, LKap, ATAP, DINDING, LANTAI, FAS_BAB, Penerangan, Bahan_Bakar, air_bersih.

Gambar 11.
Tabel hasil uji parsial dan pembentukan model
Sumber (Diolah Penulis dari Susenas Maret 2018)

Tabel 11 merupakan tabel hasil uji parsial dan pembentukan model. Berdasarkan tabel tersebut, tolak hipotesis nol (H_0) jika nilai p-value $< 0,05$. Nilai p-value signifikansi variabel status kepemilikan rumah sebesar $0,017 < 0,05$ maka tolak H_0 . Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan status kepemilikan rumah terhadap status kemiskinan. Nilai koefisien B sebesar 0.975 menunjukkan terda-

pat hubungan yang positif antara status kepemilikan rumah dengan status kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sa'diyah dan Arianti (2012), bahwa ada pengaruh status kepemilikan rumah melalui variabel asset terhadap kemiskinan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor (2005), bahwa kepemilikan modal (aset) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Jika Status kepemilikan

rumah bukan milik sendiri (kontrak/sewa/bebas sewa) maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah.

Variabel jenis bahan bakar utama untuk memasak juga berpengaruh secara signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Baniadi & Mustofa (2018) bahwa bahan bakar untuk memasak memiliki kontribusi dalam kemiskinan multi-dimensional. Namun, variabel ini berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Di mana semakin tinggi kualitas bahan bakar, maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah.

Kualitas fisik perumahan melalui variabel jenis atap, dinding, dan lantai ternyata tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan suatu rumah tangga miskin atau tidak. Penentuan jenis atap, dinding, dan lantai tidak bisa menggambarkan status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Mamasa. Luas lantai per kapita juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Sementara itu, untuk fasilitas buang air besar, kepemilikan fasilitas BAB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mamasa pada tahun 2018.

Akses terhadap air bersih memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Mamasa. Hal ini bertentangan dengan kajian Larson dkk (2007) bahwa kemiskinan berkaitan dengan akses terhadap air bersih. Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Putra & Rianto (2016) bahwa akses terhadap air bersih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks, dimana ketersediaan air bersih tidak signifikan menanggulangi kemiskinan. Meskipun infrastruktur air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat, tetapi jika tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan tidak akan mampu berdampak signifikan terhadap kemiskinan.

Sumber penerangan utama juga tidak signifikan berpengaruh terhadap kemiskinan di

kabupaten Mamasa. Akses masyarakat yang minim terhadap listrik PLN bisa dikatakan bahwa memang karena jaringan yang belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat yang mampu secara ekonomi belum tentu mendapatkan akses terhadap listrik PLN.

D. Penutup

Kesimpulan:

Secara umum, kualitas perumahan penduduk Kabupaten Mamasa masih tergolong rendah. Mayoritas karakteristik perumahan penduduk di Kabupaten Mamasa masih yang terendah dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Misalnya akses terhadap air bersih yang masih sangat rendah. Artinya, pengelolaan air bersih untuk minum di wilayah yang berkelimpahan air ini masih sangat rendah. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa pemerintah belum mampu memberikan pelayanan dasar yang optimal terhadap masyarakat mengingat air bersih adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan air bersih juga dapat berpengaruh langsung terhadap kondisi kesehatan rumah tangga.

Hasil pengujian dengan regresi logistik biner menunjukkan bahwa status kepemilikan bangunan rumah berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan di Kabupaten Mamasa pada tahun 2018. Rumah tangga yang tinggal di bangunan bukan milik sendiri (kontrak/sewa/bebas sewa) cenderung tidak miskin. Hal ini menjelaskan bahwa rumah tangga tidak miskin mampu mengeluarkan uang untuk membayar sewa/kontrak rumah. Kesimpulan lain adalah rumah tangga miskin rata-rata memiliki rumah milik sendiri, dengan catatan bahwa rumah yang ditempati perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan rumah yang belum bisa menjelaskan kualitas rumah yang ditempati oleh rumah tangga miskin.

Variabel jenis bahan bakar juga berpengaruh secara statistik terhadap kemiskinan. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa kualitas dari jenis bahan bakar akan menjadi penentu kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Nazer

dan Handra (2016), bahwa kecenderungan mengkonsumsi kayu bakar berkaitan dengan alasan ekonomis. Rumah tangga yang miskin cenderung tidak mampu membeli gas LPG untuk digunakan memasak. Sehingga lebih memilih kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak.

Rekomendasi

Pemerintah perlu berupaya meningkatkan lagi kualitas hidup masyarakat terutama pemenuhan hak-hak dasar seperti akses air bersih, penerangan, serta peningkatan daya beli agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas hunian rumah. Dari segi air bersih, pemerintah perlu memperluas cakupan program pamsimas. Program ini penting untuk meningkatkan kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat. pemerintah juga perlu memperluas jaringan listrik hingga ke desa-desa yang belum dijangkau oleh listrik PLN. Untuk memberantas kemiskinan, tentunya pemerintah perlu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama para petani. Langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain penyediaan lapangan pekerjaan serta pemberdayaan petani. Lapangan kerja yang memadai tentu dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat hidup. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran juga dapat membantu masyarakat miskin. Meskipun tidak signifikan, tetapi setidaknya bantuan sosial dapat menjadi stimulus daya beli masyarakat.

Perlu juga mengadakan analisis lebih lanjut terkait topik ini dengan menambahkan variabel-variabel selain karakteristik perumahan yang diduga mempunyai hubungan yang signifikan terhadap status kemiskinan. Bisa juga dengan memperluas *locus* penelitian ini hingga ke level provinsi atau membandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Tuhan atas hikmat yang telah diberikan kepada penulis se-

hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Endan Suwanda Ph.D serta Euis Mulyaningsih, ST., MT atas bimbingan, saran serta masukannya dalam penyelesaian tulisan ini.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018, Jakarta: Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial.
- Badan Standardisasi Nasional Indonesia. (2004). SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dan Perkotaan, Jakarta: Kementerian PU RI.
- Dwiprabowo. (2010). Kajian Kebijakan Kayu Bakar Sebagai Sumber Energi Di Pedesaan Pulau Jawa. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol 7, No. 1, April 2010. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.
- Hosmer, D., & Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression Second Edition. USA: John Wiley & Sons.
- Sa'diyah,YH & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Ekonomi Vol 1 No. 1. 2012. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Noor, M. Thamrin. (2005). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah. Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol 3, No. 2, Agustus 2005. Sampit: STIE.
- Baniadi, P & Mustofa (2018). Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol 1, No. 15, 2018. Yogyakarta:UNY.
- Imroatus, S., Mulyadi., & Maryam, L. (2014). Gambaran Sarana Sanitasi Masyarakat Kawasan Pesisir Pantai Dusun Talaga Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol 1, No. 2, Mei-Agustus 2015. Makassar: UIN Alauddin.
- Keputusan Menteri Kimprasiwil. 2002. Keputusan Menteri Kimprasiwil Nomor 403/KPTS/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat. 2002. Jakarta: Kementerian Perumkiman dan Prasarana Wilayah RI
- Kecuk, Suharyanto.(2011). Jumlah Si Miskin, Kompas 21 Januari 2011.
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Kurnianingrum, R. (2015). Kualitas Perumahan Di Desa Mranggen Kecamatan Srumbung Kabupaten Magetan. Jurnal Geografi, Vol 13, No. 1. Januari 2016. Yogyakarta: Universitas Negeri Semarang.

- Larson, B., Bart, M., Ramy, R. (2007). Unravelling The Linkages Between The Millenium Development Goals For Poverty, Education, Access To Water and Household Water Use in Developing Countries: Evidence From Madagascar. *The Journal of Development Studies* Vol 42, Januari-2007. DOI: 10.1080/00220380500356258
- Madina, RF, dkk. (2014). Pengaruh Status Kepemilikan Rumah Tinggal terhadap Persepsi Kepuasan Berhuni Keluarga Muda. *Temu Ilmiah IPLBI* 2014. Bandung: ITB.
- Nasir, Muhammad., Saichudin, Muh., & Maulizar. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*, Vol 5, No. 2, Agustus 2008. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Nazer, M. & Handra Hefrizal. (2016). Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Perkotaan di Indonesia: Periode Tahun 2008 dan 2011. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol 16, No. 2, Januari 2016. Padang: Universitas Andalas.
- Putra, HS & Rianto, N (2016). Pengaruh Akses Air Bersih Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Pengujian Data Rumah Tangga. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum*, Vol 9, No. 1, 2017. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Pencapaian *Triple Bottom Line* pada Berdaya *Charity Store* sebagai Upaya *Sociopreneurship*

Triple Bottom Line Achievement at Berdaya Charity Store as A Sociopreneurship Endeavour

Raidah Intizar Yusuf¹, dan Ernawati²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Makassar

Jl Perintis Kemerdekaan KM 9 No. 29, Makassar

¹email: raidahintizar.dty@uim-makassar.ac.id, ²email: ernawati.dty@uim-makassar.ac.id

diterima tanggal 18 November 2019 direvisi tanggal 22 November 2019 disetujui tanggal 31 Desember 2019

Abstract

This research departed from the phenomenon of the rise of philanthropic activities that had a humanitarian social goal based on fundraising and the presence of sociopreneurship namely entrepreneurial activities that emphasized the resulted social impact. Berdaya Charity Store is unique because it emphasizes on three basic lines (Triple Bottom Line), namely financial, social, and environmental. This paper aimed to explore the Triple Bottom Line of Berdaya Charity Store. This research was conducted with a qualitative approach and data collecting techniques were participatory observation, interviews, documentations study and library research. During collecting data, efforts to reach the triple bottom line were carried out well. Berdaya Charity Store invited people to donate used goods to be sold in Berdaya store and most of the funds were used for social activities in the form of visits to orphanages and for training hard and soft skills for them. The researcher observed that even though the social mission was integrated with the revenue model, the overall and diversity of Income Charity Store income was still low, namely donations and sales. Some of forwarded recommendations are campaigning for social and environmental principles to the right targets, bringing in other financial resources, doing more event-based selling so that sales are not limited in the store, socializing more broadly the tagline “Used goods become a blessing for others” so that in the long run it could become a branding for the foundation, as well as developing individual competencies of Empowered Charity Store personnel involved in social empowerment.

Keywords: *sociopreneurship; used goods stores; social empowerment*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya kegiatan filantropi yang memiliki tujuan sosial kemanusiaan berbasis penggalangan dana dan hadirnya *sociopreneurship* yakni kegiatan kewirausahaan yang menekankan pada *social impact*. Berdaya *Charity Store* menjadi unik karena penekanannya pada tiga lini dasar (*Triple Bottom Line*), yakni *financial*, *social*, dan *environmental*. Tulisan ini bertujuan untuk menggali mengenai *Triple Bottom Line* dari Berdaya *Charity Store*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatoris, wawancara, dokumentasi dan penelitian pustaka. Selama pengumpulan data, upaya untuk mencapai *triple bottom line* telah dijalankan dengan baik. Berdaya *Charity Store* mengajak masyarakat untuk mendonasikan barang bekas yang akan dijual di toko, dan sebagian besar dana digunakan untuk kegiatan sosial berupa kunjungan ke panti asuhan dan pelatihan *hard* dan *soft skill*. Peneliti mengamati bahwa sekalipun misi sosial terintegrasi dengan model pendapatan, keseluruhan dan keragaman pendapatan Berdaya *Charity Store* masih rendah, yakni donasi dan penjualan. Beberapa rekomendasi yang diajukan adalah mengampanyekan asas sosial dan lingkungan kepada target yang tepat; mendatangkan sumber-sumber *financial* yang lain; melakukan lebih banyak *event-based selling* sehingga penjualan tidak terbatas di toko; mensosialisasikan lebih luas *tagline* “Bekas jadi Berkah” sehingga dalam jangka panjang dapat menjadi *branding* yayasan; serta mengembangkan kompetensi individu dari Berdaya *Charity Store* yang terlibat dalam pemberdayaan sosial.

Kata kunci: *sociopreneurship; toko barang bekas; pemberdayaan sosial*

A. Pendahuluan

Penggalangan dana adalah hal yang sangat krusial dalam organisasi filantropis, atau organisasi yang bertujuan sosial kemanusiaan. Penggalangan dana menjadi penting karena kegiatan sosial kemanusiaan sering merupakan kejadian darurat yang harus ditanggapi secepat mungkin untuk mengobati kerusakan pada jiwa maupun materil. Sebutlah pada kondisi kebencanaan di mana korban jiwa membutuhkan pengobatan, dan kerusakan materiil seperti rubuhnya tempat tinggal, maka perlu disediakan hunian sementara, kedua hal ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Berbagai cara organisasi filantropi untuk menggalang dana bermunculan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Beberapa kemudahan yang diberikan dari perkembangan TIK adalah sosialisasi kegiatan yang pada akhirnya akan melancarkan penggalangan dana. Jika dahulu seseorang mensosialisasikan dirinya melalui jalur darat seperti penyebaran profil organisasi, proposal, dan pamphlet, dengan TIK, utamanya dengan media *online*, sosialisasi kegiatan sosial dan kemanusiaan menjadi semakin mudah. Sebuah organisasi filantropi dapat membuat website atau halaman media sosial, menggunakan fitur periklanan (*advertising*) dari media *online*, baik dengan menggunakan social media marketing, maupun *Search Engine Optimizing* (SEO), maka khalayak luas yang berselancar di dunia maya dengan mudah mendapatkan terpaan dari iklan tersebut, bisa mempelajari gerakan organisasi filantropi, sebelum kemudian menyumbang atau menjadi relawan.

Kemudahan yang diberikan untuk akses sosialisasi sebuah organisasi filantropi membuat pengguna media online kini mendapatkan begitu banyak profil organisasi filantropi, beberapa diantaranya adalah Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Peduli Sehat, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Baitul Maal Hidayatullah, dan lain-lain. Setiap organisasi ini memiliki karakter yang berbeda-beda sesuai dengan visi misi

masing-masing. Menariknya, organisasi filantropi kini banyak menggunakan platform penggalangan dana seperti kitabisa.com, di mana organisasi maupun individu dapat mendaftar untuk mendapatkan akun, dan akun kita dapat membuat sebuah kampanye kegiatan sosial setelah diverifikasi oleh kitabisa.com. Kegiatan sosial yang dimaksudkan adalah seperti bantuan untuk biaya operasi penyakit yang sulit, bantuan untuk pembangunan sekolah yang tidak layak, bantuan untuk krisis kemanusiaan di skala local maupun internasional, dan masih banyak lagi.

Platform kitabisa.com merupakan terobosan baru dalam strategi penggalangan dana, yakni *crowdfunding*, di mana dana didapatkan dari 'kerumunan' orang yang tak begitu dikenali identitasnya. Hal ini kemudian dapat menunjang independensi sebuah organisasi filantropi dan tidak perlu berafiliasi dengan donurnya, seperti yang beresiko terjadi dalam penggalangan dana tradisional. Di waktu yang sama, penggalangan dana melalui *crowdfunding* di platform menjadi semakin banyak hingga membuat persaingan organisasi filantropi menjadi semakin ketat, serta tidak dapat menjamin kesinambungan financial bagi organisasi terkait untuk terus memberi bahan bakar bagi kegiatan sosialnya. Dari sini kemudian bermunculan organisasi-organisasi yang menerapkan *sustainable fundraising* melalui kegiatan *sociopreneurship*, di mana kegiatan kewirausahaan dilakukan untuk menggalang dana demi sebuah *social-impact*.

Sociopreneurship berasal dari penggabungan kata *social* dan *entrepreneurship*. *Social entrepreneurship* diartikan sebagai cara untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kemaslahatan masyarakat luas, dan *social entrepreneur* atau *sociopreneur* adalah seseorang yang berupaya menguntungkan masyarakat dengan inovasi dan pengambilan resiko (Anand & Baweja, 2016).

Penelitian literatur oleh Dian Arlupi Utami, Noviyanti, Gading Gama Putra, dan Agus Prasetyawan (2017) menelaah mengenai ba-

gaimana aspek sustainability dari sebuah *sociopreneurship* dapat menawarkan solusi taktis dan efektif terhadap masalah perekonomian di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan studi terhadap tiga *sociopreneursip* yang ditelaah yakni Saung Angklung Ujo, Eko Wisata Mangrove, dan PT Arminareka Perdana. Usaha-usaha ini berperan untuk sebuah *impact* sosial dan dilihat telah membawa perubahan yang berarti di masyarakat.

Salah satu *sociopreneur* yang berhasil membawa perubahan sosial langsung di masyarakat, dalam hal ini yakni upaya untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja juga ditunjukkan di penelitian Bayu Aulia dan Astri Ghina (2017) terhadap yayasan Kainis yang merupakan sekolah kegiatan alam dengan fokus utama yaitu arung jeram dan navigasi darat. Terlihat perubahan di tataran masyarakat, mulai dari pemuda yang bergabung di Yayasan Kainis, menjadi lebih disiplin dalam pergaulan dan membuat lingkungan yang positif bagi remaja lainnya. Hingga pada masyarakat umum dengan meningkatnya interaksi sosial dan tumbuhnya kesadaran lingkungan. Di samping itu, dampak positif lainnya adalah adanya pembangunan fasilitas umum oleh Yayasan Kainis.

Di samping Yayasan Kainis, Agfa sebagai sebuah usaha makanan di Sidoarjo juga dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip *sociopreneurship* dalam praktiknya (Prayogo, 2017) yang meliputi (a) *social value*, di mana usaha Agfa yang didirikan oleh Ibu Maria bertujuan untuk melayani dan membantu masyarakat menengah ke bawah di sekitarnya dengan lapangan kerja, penjualan dan distribusi kepada orang yang membutuhkan, (b) *civil society*, ditunjukkan dengan pemilik Agfa yang menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholders serta memberikan kepercayaan kepada para karyawannya, (c) *innovation*, yakni usaha Agfa ini merupakan inovasi yang baru dengan memadukan aspek sosial dan ekonomi (d) *economic activity*, di mana pemilik senantiasa menyeimbangkan antara aktivitas bisnis dan aktivitas sosial.

Hasil penelitian Yuli Kurnia F dan Bisma Ariyanto (2017) mengenai hubungan antara pendidikan karakter dan *sociopreneurship* menunjukkan adanya pengaruh positif antara kedua variabel ini menjadi landasan ilmiah *social line*. Melalui uji regresi ditemukan bahwa variable pendidikan karakter memiliki pengaruh positif terhadap *sociopreneurship*, ($R = .469$, $p = .001$). Hal ini dapat diterjemahkan bahwa pendidikan karakter menjelaskan 46.9 persen *sociopreneurship*, menunjukkan sebuah hubungan yang moderate. Peningkatan pada nilai pendidikan karakter akan meningkatkan juga nilai *sociopreneurship*, demikian juga sebaliknya.

Penelitian Yuli Kurnia F dan Bisma Ariyanto (2017) membuktikan bahwa secara kuantitatif, pendidikan karakter yang juga merupakan salah satu metode dalam pemberdayaan sosial, dapat memberikan efek positif terhadap *sociopreneurship*.

Berdaya *Charity Store* merupakan sebuah *sociopreneurship* yang menyadari pentingnya kesinambungan finansial dan tidak bergantung pada donasi uang. Di bawah Yayasan Sedekah Yatim Berdaya, Berdaya *Charity Store* merupakan sebuah toko barang bekas berbasis di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebagai toko barang bekas atau *thrift store*, maka operasi di di toko ini meliputi jual barang donasi yang layak guna di mana keuntungannya digunakan untuk kegiatan sosial (Parsons, 2002 dalam Montgomery & Mitchell, 2014). Hal ini menjadikan toko barang bekas ini memiliki *triple bottom line*, yakni *financial bottom line* untuk menghasilkan keuntungan (*profit*), *social bottom line* untuk berkontribusi bagi masyarakat (*people*), dan *environmental bottom line* untuk mengurangi hingga memperbaiki lingkungan (*planet*) (Wiese, et.al, 2012). Ide di balik paradigma *triple bottom line* atau 3BL ini adalah kesuksesan dan sehatnya sebuah korporasi dapat dan seharusnya diukur bukan hanya dari asas finansial, namun juga dari asas sosial dan lingkungan (Norman & MacDonald, 2007).

Cara kerja dari *thrift stores* berbeda dengan *retail* tradisional, khususnya dalam persaingan

dalam tiga pasar yang berbeda, yakni: kompetisi donasi atau sumberdaya, kompetisi pelanggan yang mencari *merchandise*, serta interaksi dengan sektor limbah. Jika sebuah organisasi baik dalam mengelola aspek komersialnya, maka usaha mereka akan semakin besar untuk melayani kebutuhan sosial dan menjaga lingkungan (Montgomery & Mitchell, 2014). Untuk membedakan retail barang bekas biasa dan toko barang bekas dengan misi sosial Brozek (2009) mensyaratkan untuk misi sosial terintegrasi ke dalam sebuah model yang terukur, memberikan keuntungan, *fee-based* dengan kesinambungan finansial. Hal inilah yang menjadi upaya Berdaya *Charity Store* dalam upaya finansial berupa pengelolaan barang bekas (pemasukan dan penjualan) yang berguna untuk membuka lapangan kerja serta menghasilkan dana untuk membiayai asas sosialnya. Asas finansial Berdaya *Charity Store* sangat bertautan dengan asas lingkungan hidup di mana kampanyenya berputar pada penggunaan kembali barang bekas untuk mengurangi dampak lingkungan hidup. Asas finansial dan lingkungan hidup dipadukan untuk menggalang dana demi asas sosial yakni pemberdayaan sosial di panti asuhan. Hasil penelitian Eny Hikmawati dan Catharina Rusmiyati (2018) pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan sosial sebagai salah satu upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat membutuhkan peran masyarakat baik organisasi maupun perorangan. Hal inilah yang membuat Berdaya *Charity Store* di bawah Yayasan Sedekah Yatim turut andil.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali menganalisis *Triple Bottom Line* Berdaya *Charity Store*, sehingga bisa merumuskan saran-saran yang berguna untuk Berdaya *Charity Store* khususnya, juga kepada *sociopreneurship* lain yang memiliki cita-cita menjadi filantropi profesional yang memiliki dampak sosial yang nyata dengan mengimplementasikan *Triple Bottom Line*.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang observasi partisipatoris, wawancara, dan penelitian pustaka. Observasi partisipatoris menjadi relevan dilakukan dikarenakan kegiatan Berdaya *Charity Store* merupakan kegiatan sosial yang mengundang relawan secara luas. Dalam menjalankan pengumpulan data observasi pada kurun waktu April-Agustus 2019, peneliti mewawancara berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan ini, antara lain:

1. Pendiri kegiatan: yakni orang yang memiliki ide mengenai kegiatan filantropi dengan memadukan lini finansial, sosial, dan lingkungan hidup di Berdaya *Charity Store*
2. Relawan toko: yakni relawan yang ditugaskan untuk melakukan penjualan barang bekas di toko maupun lapak Berdaya *Charity Store*
3. Relawan sosial: yakni relawan yang ditugaskan melakukan kegiatan-kegiatan sosial di panti-panti asuhan
4. Donatur barang bekas: yakni pihak-pihak yang telah menyumbangkan barang bekas ke toko Berdaya *Charity Store*
5. Panti Asuhan: yakni perwakilan panti asuhan yang mendapatkan bantuan Berdaya *Charity Store*.

Setelah melakukan wawancara, data akan penulis analisis secara deskriptif, melakukan perbandingan dengan teori *triple bottom line*, sehingga penulis dapat menyimpulkan sejauh mana tiga tujuan dasar (*people, planet, profit*) dari subjek penelitian telah dicapai.

C. Berdaya *Charity Store* sebagai Upaya *Sociopreneurship*

Kegiatan sosial kemanusiaan telah menjadi sebuah arus utama pada kalangan anak muda dewasa ini, beberapa bentuk kegiatan sosial kemanusiaan dibuktikan dengan pendirian-pendirian komunitas yang bertujuan sosial dengan *target market* yang beragam. Salah satu bentuk upaya membuat perubahan di masyarakat atau

social-impact adalah melalui *sociopreneurship*. Ketertarikan pemuda Indonesia terhadap konsep dan praktik *sociopreneurship* karena masalah sosial dapat terurai secara perlahan dengan menerapkan nilai-nilai *sociopreneurship* dan terciptanya *Sociopreneur* berangkat dari adanya kondisi wilayah dan masyarakat yang terjepit dalam pemenuhan kebutuhan dan meningkatnya tantangan global. (Hempri Suyatna dan Yanti Nurhasanah, 2017).

Berdaya *Charity Store* merupakan sebuah *sociopreneurship* yang berupaya melakukan pemberdayaan sosial di panti-panti asuhan. Kegiatan *sociopreneurship* ini berawal dari komunitas Sedekah Berdaya yang memiliki tujuan sosial untuk menyalurkan bantuan di panti asuhan yang dirangkaikan dengan pemberian motivasi kepada anak-anak di panti asuhan, maka lahirlah ide untuk strategi *fundraising* yang sinambung, dengan memanfaatkan donasi barang bekas yang dijual di toko dikelola secara professional. Akhirnya tujuan *social-impact* berubah menjadi sebuah visi untuk membantu anak-anak di panti asuhan meraih kehidupan yang lebih baik melalui kewirausahaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk terwujudnya visi itu adalah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang *hard skill* dan *soft skill* anak-anak di panti asuhan.

Semangat religiusitas menjadi penggerak munculnya *sociopreneurship* ini, dan pengembangan model usaha utamanya sangat terinspirasi oleh Goodwill Industries di Amerika Serikat. Kegiatan utama di toko barang bekas Berdaya meliputi pemasokan barang, penjualan barang, serta komunikasi pemasaran terpadu.

Berdaya *Charity Store*. Setelah komunitas Sedekah Berdaya memperoleh legalitas sebagai sebuah yayasan, Berdaya *Charity Store* (disingkat BCS) adalah bagian dari program *fundraising* dari Yayasan Sedekah Yatim Berdaya, di mana BCS merupakan toko barang bekas di kota Maros yang dikelola secara professional, dan mengalokasikan 100% profit penjualan untuk kegiatan sosial, khususnya kegiatan sosial di panti-panti asuhan yang ada di kota Makassar dan Maros.

Pada awalnya, toko barang bekas ini digagas oleh Muhammad Ikhsan Sandira terinspirasi oleh aktivitas *social enterprise* di bidang penjualan barang bekas (*thrift store*) di Amerika Serikat, yaitu Goodwill Industries. Kegiatan utama dari BCS sendiri terdiri dari dua aktivitas, pertama pemasokan berbagai jenis barang bekas dari para donatur, dan kedua adalah menjual barang bekas tersebut. Pengelolaan dua aktivitas BCS tersebut dilakukan secara professional agar tetap terjaga keberlanjutannya. Sehingga orang-orang yang mengurus kegiatan ini bisa fokus mengelola BCS ini. Kegiatan pemasokan dilakukan dengan cara membuka penjemputan barang bekas terjadwal, *drop* barang bekas di toko, serta yang ditargetkan dalam waktu dekat ini ialah pemasangan *drop box* barang bekas di bangunan ibadah dalam perumahan. Kegiatan penjualan dilakukan di toko secara *offline*, barang bekas dipilah, diberi harga dan dijual di toko. Beberapa barang terpilih juga dijual di bazar *car free day* dengan harga murah. Selain penjualan, pakaian-pakaian yang tergolong baju pesta dikumpulkan dan akan disewakan di bawah program Berdaya Wardrobe (sewa baju pesta murah untuk kalangan menengah ke bawah). Salah satu strategi penjualan BCS lainnya adalah membuka peluang *reseller* barang bekas. Tujuannya agar penjualan ke daerah pemukiman warga bisa lebih mudah dan hemat biaya.

Aktivitas BCS meliputi daerah Maros dan Makassar untuk penjualan *offline*, penjualan terpusat di Kabupaten Maros dan telah memiliki beberapa *reseller* di Kota Makassar dan Maros. Sedangkan pengelolaan profit BCS dalam bentuk program yang dikelola oleh Yayasan Sedekah Yatim Berdaya sejauh ini telah mencakup Kota Maros, Makassar, dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Asumsi biaya operasional dan gaji pegawai adalah sekitar 18% dari total penjualan. Sisanya pengelola hitung sebagai profit dan dimasukkan ke kas Yayasan Sedekah Yatim Berdaya untuk kemudian dikelola dalam bentuk berbagai macam pemberdayaan sosial yang ditujukan bagi anak yatim.

Ide Awal Program. Kegiatan ini bermula dari rutinitas pengelola mengantarkan donasi keluarga pengelola kepada anak yatim di Makassar sejak awal 2017. Dari rutinitas itu pengelola terpikir untuk memberikan bantuan dengan nilai lebih berupa pembekalan *mind-set* kemandirian dan skill berwirausaha kepada anak yatim, agar bantuan tersebut tidak habis seketika dan bisa terus dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan.

Berdasarkan pengamatan pengelola terhadap keberadaan Goodwill Industries di Amerika Serikat, yang selama lebih dari ratusan tahun berhasil mengelola penjualan barang bekas menjadi dana untuk peningkatan *skill* kerja, penempatan tenaga kerja dan perubahan yang positif lainnya, pengelola berpikir untuk menggunakan model tersebut untuk pemberdayaan anak yatim. Pengelola kemudian berinisiatif untuk mulai mengumpulkan barang bekas layak pakai dari orang-orang terdekat yang kemudian pengelola jual agar bisa memperoleh dana untuk melakukan *training* motivasi dan peningkatan *skill* untuk anak yatim. Ternyata sambutan masyarakat sekitar cukup antusias untuk terlibat di kegiatan ini. Bahkan dari penjualan barang bekas tersebut pengelola dapat memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan *skill*.

Pengelola berinisiatif mengelola usaha dengan profesional agar kegiatan ini bisa berkelanjutan,. Pada awal Juni 2018, bermodalkan ruko keluarga di Kabupaten Maros dan stok barang bekas yang sudah banyak, pengelola merekrut beberapa pegawai untuk mengelola penjualan dan membuat pencatatan keuangan layaknya usaha toko lainnya. Di mana profit dari penjualan barang bekas ini seluruhnya digunakan untuk pemberdayaan anak yatim.

Keunggulan Program. Program BCS pada dasarnya sebuah kegiatan *fundraising* dari komunitas yang memberdayakan anak yatim untuk menjadi mandiri. Biasanya kegiatan sebuah komunitas selalu mengalami kendala dalam persoalan pendanaan. Sedangkan gagasan program BCS adalah sebuah ide tentang model *fundraising* yang bisa dikelola secara berkelan-

jutan tanpa bergantung pada sumbangan-sumbangan dana dari donatur.

BCS meskipun dikelola secara profesional, tapi dari sisi manfaat sifatnya sosial, dalam artian selain bagian dari kegiatan *fundraising* Yayasan Sedekah Yatim Berdaya, secara operasional BCS mampu memberikan efek sosial yang cukup konkret yaitu:

1. Adanya edukasi tentang konsep penggunaan kembali barang, sehingga masyarakat tidak lagi menyia-nyiakan barang pribadinya yang masih layak pakai.
2. Kedua, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, pegawai yang pengelola rekrut berasal dari lingkungan sekitar yang tidak memerlukan *commuting* dengan kendaraan bermotor. Selain lapangan kerja baru bagi pegawai toko, manfaat dirasakan *reseller* yang dapat mendapatkan keuntungan ekonomis serta secara tidak langsung berdampak pada kegiatan sosial pengelola.
3. Pengelola juga melakukan edukasi daur ulang barang bekas yang mempunyai dampak yang berdampak positif pada lingkungan.

Motivasi. Program BCS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *fundraising* dari aktivitas Yayasan Sedekah Yatim Berdaya. Ketika membahas tentang motivasi pendirian BCS tidak terlepas dari semangat awal Yayasan Sedekah Yatim Berdaya. Semangat awal Yayasan Sedekah Yatim Berdaya adalah anjuran agama untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap masa depan anak yatim. Pengelola menyadari keutamaan mengurus anak yatim dan berupaya mengajak orang lain untuk ikut peduli pada anak yatim, dan tidak harus dengan dana, cukup menyumbangkan barang yang tidak dipakai ke toko barang bekas, profitnya akan pengelola kelola seluruhnya untuk anak yatim.

Pengelola peduli pada masa depan anak yatim piatu, sehingga pengelolaan profit bukan hanya berupa sembako, namun juga pembekalan motivasi serta pendampingan keterampilan dan kewirausahaan. Alasan dipilihnya kewirausahaan adalah karena pengelola juga peduli

pada tingkat kewirausahaan di Indonesia yang masih rendah, pengelola memiliki hipotesis bahwa dari anak yatim piatu, karena berada dalam kondisi yang penuh tekanan, akan lahir jiwa-jiwa wirausaha.

Selain kewirausahaan, tentunya pengelola peduli pada pendidikan, dan cita-cita jangka panjang pengelola adalah akan mendirikan sekolah berbasis kewirausahaan yang digratisikan untuk anak-anak yatim piatu.

Manfaat Program. Secara langsung, manfaat BCS dapat dirasakan oleh tiga pihak, pertama ialah pihak penerima profit yaitu panti-panti asuhan di Kota Makassar dan Maros melalui Yayasan Sedekah Yatim Berdaya. Secara rutin pengelola mengantarkan bantuan sembako, makanan jadi, serta pembekalan motivasi ke panti-panti asuhan. Dari kunjungan ini pengelola menilai secara kualitatif, panti yang mendapatkan pendampingan keterampilan kewirausahaan. Manfaat langsung juga diperoleh oleh pembeli barang bekas yang sangat terbantu dengan disediakannya barang bekas murah dan berkualitas. Selain itu, penerima manfaat langsung terakhir ialah pegawai toko barang bekas yang memperoleh honor atas pekerjaannya yang mengelola barang bekas secara professional yang memberarti membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Di samping manfaat langsung, manfaat tidak langsung juga dirasakan oleh para donatur yang kini menemukan penyaluran barang-barang yang tidak lagi mereka gunakan. Sehingga kebutuhan spiritual mereka berupa semangat berbagi dengan sesama dapat pengelola penuhi.

Dalam proses penyaluran profit dari BCS yang dijalankan oleh Yayasan Sedekah Yatim Berdaya, pengelola membagi programnya menjadi 3, yaitu Program Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Berikut detail programnya:

1. Jangka Pendek, adalah program yang dilenggarakan tiap bulannya yaitu Anjangsana ke Panti Asuhan untuk mengantarkan sembako, makanan jadi, dan training motivasi dengan tema kemandirian kepada adik-adik

yatim. Agenda ini berlangsung sebanyak satu hingga dua kali dalam sebulan

2. Jangka Menengah, yaitu program yang dilakukan dalam periode beberapa bulan seperti pelatihan bercocok tanam, pelatihan speaking bahasa Inggris, dan pelatihan komputer.
3. Jangka Panjang, yaitu program yang dilaksanakan untuk beberapa tahun ke depan, yaitu pendirian Sekolah Berdaya dengan kurikulum berbasis kewirausahaan yang digratisikan untuk anak yatim piatu.

Program yang telah dan sementara berjalan adalah Anjangsana ke Panti Asuhan yang sudah rutin sejak tahun lalu, serta pelatihan bercocok tanam di Panti Asuhan Amal Islami Kariango dan peningkatan kapasitas berbahasa Inggris di Panti Asuhan Rahmatullah di BTN Hamzy Makassar. Dilanjutkan dengan pelatihan basic Microsoft dilaksanakan di Panti Asuhan Rabbani BTN Asabri Antang pada Juni-Agustus 2019. Untuk program jangka panjang, pengelola sedang menyiapkan dana untuk pengadaan lahan. Rencana pengelola, pembangunan Sekolah Berdaya akan dilakukan di daerah Kariango, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Dalam prosesnya, program BCS sejauh melibatkan lima orang pengelola. Sedangkan dalam menjalankan program pemberdayaan, sejauh ini pengelola memiliki sekitar 20 orang relawan.

Kendala. Sejauh ini hambatan yang pengelola alami adalah sumber pendapatan yang terbatas. Sebuah nonprofit biasanya mendapatkan dana dari *fees for service and goods, private contributions, government income, investment income*, dan *other income* (Brozek, 2009), -sedangkan BCS hanya dapat memanfaatkan dua sumber pemasukan yakni penjualan (*fees for services and goods*) dan donasi (*personal contribution*).

Kendala berikutnya adalah masih banyaknya daerah potensial penjualan barang bekas yang belum mampu pengelola garap, dikarenakan hasil penjualan barang bekas tidak serta merta dapat teralokasikan untuk ekspansi

di mana mayoritas dana tersebut digunakan untuk membiayai program Yayasan Sedekah Yatim Berdaya serta tabungan untuk pendirian sekolah. Untuk mengatasi keterbatasan dalam melakukan ekspansi, pengelola mulai membuka cabang penjualan dengan konsep *reseller* barang bekas. Per September 2019 pengelola telah memiliki beberapa *reseller* lepas di kota Makassar dan Maros. Pengelola memasok barang kepada *reseller*, *reseller* dapat mengambil profit dari penjualan dalam ambang <50% harga, dan barang yang tidak laku dapat di-retur. Hal ini semakin memudahkan orang-orang memperoleh manfaat barang bekas, serta memperlancar perputaran dana yang dapat pengelola kelola untuk anak yatim piatu.

Kendala lainnya adalah kegiatan *sociopreneurship* ini meminimalisir investasi untuk manusia, karena profit disalurkan sebesar-besarnya untuk kepentingan sosial. Hasil penelitian (Hikmawati & Rusmiyati, 2018) menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Beberapa organisasi filantropi yang murni menjalankan kegiatan sosial justru memberi investasi yang cukup untuk mengembangkan skill dari anggota-anggotanya, seperti *skill digital marketing*. *Skill* ini khususnya akan sangat berguna untuk mengampanyekan misi sosial dari BCS.

Kendala terakhir yang biasa pengelola hadapi adalah donatur barang bekas yang terbatas, dikarenakan barang bekas yang diterima oleh took diharapkan bisa dijual, derajat kelayakannya tentu berbeda dengan sekedar barang bekas layak pakai. Pengelola menarget donasi barang bekas dari kelas menengah atas. Awalnya, hal ini didapatkan dari kolega serta keluarga pengelola yang jumlahnya dapat habis seiring waktu, berbeda dengan donasi berupa uang yang bisa rutin dilakukan, barang bekas tidak bisa setiap bulan pengelola dapatkan dari donatur yang sama. Strategi untuk mengatasinya adalah dengan menyiapkan kotak drop barang bekas di beberapa titik agar jangkauan donasi barang bekas bisa semakin luas.

Harapan. Awal pendirian BCS adalah semangat kesinambungan dan kemandirian. Pengelola mendedikasikan purna waktu pengelola (Pukul 08.00-17.00, sepanjang pekan) untuk kegiatan ini. Pengelola bertekad mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, sehingga pengelola dapat terus menjalankan program-program terkait anak yatim piatu. Dan meskipun ini hal yang baru di daerah pengelola khususnya, pengelola ingin terus menyuarakan tentang semangat menyantuni anak yatim dan meningkatkan skill kerja serta menumbuhkan semangat kewirausahaan mereka, hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Pengelola ingin terus mengampanyekan bahwa donasi barang bekas adalah donasi yang berdaya. Pengelola ingin bekerja sama dengan lebih banyak *reseller*, membuka *store* yang lebih besar, sehingga memperoleh profit yang lebih besar untuk pemberdayaan anak yatim piatu.

Pengelola ingin menularkan cita-cita ini kepada banyak pihak dan generasi muda agar mau terlibat ke dalam komunitas ini hingga program yang telah dicanangkan dapat terus berjalan ke depannya. Secara luas, pengelola juga ingin banyak yang menduplikasi cita-cita luhur ini untuk terus memberikan manfaat secara berkesinambungan kepada anak-anak yatim.

D. Pencapaian *Triple Bottom Line* Berdaya *Charity Store*

Dalam praktiknya, BCS adalah sebuah *sociopreneurship* yang memiliki *triple bottom line* atau tiga lini dasar (Wiese et.al., 2012) yang terus dikembangkan yakni *social* atau *people bottom line* untuk berkontribusi secara sosial, *financial* atau *profit bottom line* untuk menghasilkan keuntungan, dan *environmental* atau *planet bottom line* untuk mengurangi dampak lingkungan. Penguraian mengenai masing-masing lini dijelaskan sebagaimana berikut:

People Bottom Line. Untuk menyongsong bonus demografi di Indonesia pada tahun 2030-2040, di mana rasio penduduk Indonesia berusia produktif (14-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tidak produktif (Bappenas

2013), potensi-potensi ekonomi harus terus di stimulasi, karena sepanjang bonus demografi berlangsung, kelompok usia produktif tersebut akan menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia.

Pemerintah telah mengupayakan beragam hal untuk menstimulasi potensi ekonomi demi menghadapi bonus demografi ini. Beberapa strategi utama adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan, sesuai keterangan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri Dalam hal kuantitas, pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan dua juta lapangan kerja baru per tahun atau 10 juta lapangan kerja pada periode pemerintahan 2019. Sementara dalam hal kualitas, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi atau keterampilan pekerja oleh karena 60% kompetensi tenaga kerja nasional merupakan lulusan SD dan SMP, sehingga tenaga kerja ini berkonsekuensi banyak terserap di industri padat karya. Maka pencapaian visi tersebut dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK). BLK dilakukan di perusahaan milik pemerintah maupun swasta, maupun melalui program pemagangan kerja (Detikfinance, 2017).

Selain menciptakan lapangan kerja, pemerintah juga mendorong munculnya wirausahawan baru dengan memberikan program pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan sarana. Tingkat kewirausahaan yang memadai akan menuju semakin majunya sebuah negara, terlebih dalam rangka menghadapi bonus demografi.

Kewirausahaan menjadi hal yang sangat penting karena dari wirausaha lahirlah bisnis atau sebuah usaha, dan usaha itu tentu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat persaingan pasar dan meningkatkan produktivitas (Sappin, 2016). Untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, tingkat kewirausahaan harus mencapai 10 persen dari populasi, namun dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Ke-

cil Menengah Republik Indonesia, pada tahun 2017 hanya terdapat 3,1 persen warga negara Indonesia yang berwirausaha, jauh tertinggal dari Amerika Serikat yakni sebesar 12 persen, bahkan Singapura sebanyak tujuh persen.

Dikarenakan lambannya pertumbuhan kewirausahaan, pemerintah dan masyarakat harus terlibat untuk memantik semangat kewirausahaan, mencari potensi-potensi kewirausahaan di masyarakat sehingga dapat memicu kesejahteraan Indonesia. Potensi-potensi kewirausahaan dapat digali bukan hanya pada masyarakat produktif di masa ini, melainkan juga masyarakat nonproduktif, yang ketika Indonesia menghadapi bonus demografi, masyarakat tersebutlah yang akan menjadi mesin perekonomian Indonesia. Salah satu golongan masyarakat yang nonproduktif secara ekonomi, namun memiliki potensi besar untuk dikembangkan jiwa kewirausahaannya adalah anak-anak panti asuhan. anak-anak panti asuhan yang tidak memiliki wali untuk mandiri lebih dini, sebelum dikembalikan ke masyarakat setelah lulus dari panti asuhan.

Latar belakang lahirnya Berdaya *Charity Store* adalah untuk untuk membentuk jiwa wirausaha anak-anak di panti asuhan agar dapat meraih masa depan yang lebih baik. Kegiatan ini mengikuti model *social enterprise multinasional* yakni Goodwill Industries, di Amerika Serikat, yang telah berdiri sejak tahun 1902 dan mengelola sumbangan barang bekas untuk mendanai pelatihan kerja dan penempatan kerja bagi golongan yang beresiko tinggi tak terserap di lapangan kerja.

Pemberdayaan sosial bagi anak yatim dipilih sebagai jalan untuk meningkatkan angka kewirausahaan, khususnya pada anak panti asuhan yang tidak lagi memiliki penanggung. Anak yatim dan anak-anak di panti asuhan menjadi subjek utama penyaluran profit didasari semangat religiusitas yang tergambar dalam logo yayasan Sedekah Yatim Berdaya:



Figure 2.
Logo Yayasan Sedekah Yatim Berdaya:

Lambang yang dikenal luas sebagai lambang kemenangan atau lambang damai ini juga menggambarkan hal lain dalam agama Islam, yakni tanda yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad untuk menggambarkan kedekatan dirinya dengan orang yang mengurus anak yatim di surga. Dana donatur atau *personal contribution* dan penjualan barang bekas yang telah dia lokasikan untuk kegiatan sosial di panti asuhan yakni sebesar 61 persen.

Profit Bottom Line. Lini profit Berdaya *Charity Store* bermuara pada kegiatan toko barang bekas untuk menghasilkan keuntungan. Umumnya pemasukan sebuah nonprofit berasal dari *fees for service and goods, private contributions, government income, investment income*, dan *other income* (Brozek, 2009). Terhitung Juni 2018 hingga Agustus 2019, pemasukan Berdaya *Charity Store* baru meliputi penjualan (*fees for goods*) dan *personal contribution*.

Untuk *personal contribution*, Berdaya *Charity Store* membuka penerimaan donasi baik donasi tetap maupun donasi tidak tetap. Sedangkan untuk penjualan, kegiatan pengelolaan barang bekas terus dilakukan di Berdaya *Charity Store* yang meliputi pemasukan barang dan penjualan, di mana kedua hal ini memanfaatkan komunikasi pemasaran terpadu. Pemasukan barang bekas dilakukan dengan penyebaran informasi di akun media sosial Berdaya *Charity Store*, penyebaran informasi dengan leaflet di kegiatan event mingguan Berdaya *Chari-*

ty Store, dan keberadaan toko sendiri menjadi sebuah sosialisasi untuk penerimaan barang bekas. Di samping itu, Berdaya *Charity Store* juga menyediakan *drop box* barang bekas di tempat ibadah pemukiman.

Penjualan barang bekas utamanya dilakukan di toko Berdaya *Charity Store*, namun untuk mengundang target pasar, komunikasi pemasaran terpadu juga digunakan. Salah satunya dengan memanfaatkan Facebook Ads, di mana pegawai Berdaya *Charity Store* memasukkan *target market* dan lokasi dan memicu interaksi di Facebook Fanpage dan akun Instagram, sehingga keberadaan toko dapat disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Selain penjualan barang bekas di toko, Berdaya *Charity Store* mengadakan penjualan berbasis *event*, yang sering dilakukan di *car free day* di kota Makassar.

Planet Bottom Line. Seperti toko barang bekas pada umumnya, salah satu aspek penting dalam pengelolaannya adalah pemanfaatan kembali barang-barang layak guna yang tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya. Hal ini berguna untuk menunjang pengurangan dampak lingkungan.

Budaya penggunaan kembali barang telah diperkenalkan secara komersil oleh toko-toko barang bekas yang menekankan keuntungan finansial, akan tetapi toko barang bekas yang berada di Makassar mengimpor barang bekas dari luar negeri, sehingga penyaluran barang bekas lokal tidak memiliki wadah tersendiri, dan dampak terhadap lingkungan tidak maksimal. Berdaya *Charity Store* menjadi salah satu yang pertama untuk mengelola barang bekas secara profesional dengan mengampanyekan donasi barang bekas serta penggunaan kembali barang bekas yang berarti turut membantu pemberdayaan sosial di panti asuhan. “Bekas Jadi Berkah” adalah *tagline* yang dipopulerkan Berdaya *Charity Store*.

Sementara untuk menggambarkan bagaimana “Bekas Jadi Berkah”, dibuatlah siklus manajemen donasi sebagai berikut.



Gambar 2.
Siklus Manajemen Donasi

Masyarakat mendonasikan barang bekas seperti pakaian, furniture, buku, mainan, dan alat elektronik di toko. Barang bekas tersebut lalu dijual dengan harga terjangkau karena menargetkan kelas menengah bawah. Barang yang tidak laku jual akan didaur ulang dan profit penjualan digunakan untuk pemberdayaan sosial, selanjutnya hasil pemberdayaan sosial dirasakan oleh masyarakat.

E. Penutup

Kesimpulan: Sebagai toko barang bekas, Berdaya *Charity Store* memadukan tiga asas dinamakan *Triple Bottom Line* (Wiese et.al., 2012). Hal ini meliputi lini sosial, *financial*, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini telah dijalankan dengan baik, dan dapat lebih maksimal. Integrasi misi sosial dengan model pemasukan (Brozek, 2009) tergambar pada salah satu misi pengurangan dampak lingkungan Berdaya *Charity Store* yang digambarkan dengan tagline “Bekas Jadi Berkah”. Berdaya *Charity Store* mengajak masyarakat untuk mendonasikan barang bekas yang akan dijual di toko, dan profit yang terkumpul digunakan untuk kegiatan sosial berupa kunjungan ke panti asuhan dan pelatihan hard dan soft skill.

Kekurangan dari kegiatan toko ini adalah keragaman pendapatan yang rendah, hanya ber-

gantung pada penjualan dan donasi personal. Hal ini membuat penggunaan sebagian besar dana dialokasikan untuk kegiatan sosial, sehingga hal-hal seperti investasi dan pengembangan kompetensi individu menjadi terhambat.

Rekomendasi:

1. Mengampanyekan asas sosial dan lingkungan kepada target yang tepat. Seperti Berdaya *Charity Store* yang memiliki visi untuk membantu anak-anak di panti asuhan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan kewirausahaan. Pasar yang dapat ditarget ialah orang-orang yang peduli terhadap anak-anak di panti asuhan, serta orang-orang yang peduli terhadap tingkat kewirausahaan di Indonesia.
2. Mendatangkan sumber-sumber *financial* yang lain seperti hibah pemerintah dan hibah umum untuk yayasan, sehingga wajib bagi yayasan untuk memiliki legalitas.
3. Melakukan lebih banyak *event-based selling* sehingga penjualan tidak terbatas di toko
4. Mensosialisasikan lebih luas *tagline* “Bekas jadi Berkah” sehingga dalam jangka panjang dapat menjadi *branding* yayasan.
5. Mengembangkan kompetensi individu yang terlibat dalam pemberdayaan sosial.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kemristekdikti yang membiayai penelitian ini di bawah skema hibah Penelitian Dosen Pemula tahun anggaran 2018, tahun pelaksanaan 2019. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segenap relawan Yayasan Sedekah Yatim Berdaya atas kerjasama yang baik, serta dukungan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Makassar.

Pustaka Acuan

Bayu Aulia, Astri Ghina. (2017). *Program Kewirausahaan Sosial dalam Mengantisipasi Kriminalitas*

- Remaja. e-Proceeding of Management : Vol.4, No.1 April 2017
- Brozek, K. (2009). *Exploring the Continuum of Social and Financial Returns: When Does a Nonprofit Become a Social Enterprise?*. Community Development Investment Review: Federal Reserve Bank Of San Francisco
- Dian Arlupi Utami, Noviyanti, Gading Gama Putra, Agus Prasetyawan. (2017). *Sociopreneurship Sebagai Alternatif Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara – ASIAN Volume 5 Nomor 2, Oktober 2017
- Hikmawati, E., & Rusmiyati, C. (2018). Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Daerah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 4 (2018)*
- Montgomery, R. D. & Mitchell, M. (2014). *Examining the Demographic Profiles of Thrift Store Donors and Thrift Store Shoppers*. Atlantic Marketing Journal Volume 3 No 1
- Norman, W., & MacDonald, C. (2007). Getting to the Bottom of “Triple Bottom Line”. *Business Ethics Quarterly*, 1-19.
- Sappin, E. (20 Oktober 2016). *7 Ways Entrepreneurs Drive Economic Development: Entrepreneurs create businesses, businesses create jobs and people with jobs make good customers*. Diakses dari: <https://www.entrepreneur.com/article/283616>
- Wiese, et al (2012) *Sustainability in Retailing – A Summative Content Analysis*. *International Journal of Retail & Distribution Management*, Vol. 40, No. 4, pp. 318-335, 2012. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2127166>
- Yuli Kurnia F & Bisma Ariyanto (2017). *Effect of Character Education Values on Sociopreneurship on Alumni Faculty of Economy University PGRI Adi Buana Surabaya*. International Journal of Research Studies (IJRS) An Open Access Publication Journal Vol-1, Issue-3, 2017

**Peran dan Strategi Lembaga Swadaya Masyarakat
dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat
(Studi Kasus di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)**

***The Role and Strategy of Non-Governmental Organizations
in Social Economic Empowerment of the Community
(A Case Study in Manggarai Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia)***

Rudolof Ngalu¹, Yohannes M. Jamun², dan Heronimus E. Wejang³

¹²³Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Nusa Tenggara Timur

Jl. Ahmad Yani, No. 10 Ruteng, 86508

e-mail: ngalurudolf@gmail.com, HP. 087762652161

tanggal di terima 01 Juli 2019, tanggal di perbaiki 29 November 2019, tanggal di setujui 31 Desember 2019

Abstract

This research was motivated by concerns about poverty which had become an acute problem in Manggarai Regency. Although various types of government social assistance programs continued to be rolled out and the development paradigm had shifted from a centralized to a decentralized system, poverty rates remained relatively high. In the midst of this condition, the presence of NGOs was an alternative option and hope. The main problem examined in this paper was how the role and strategy of NGOs in empowering the socio-economic community in Manggarai Regency. This paper was the result of research with a qualitative approach and case study method. Data collection was done through interviews and document studies. Data analysis used the Miles and Huberman model which consisted of data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that NGOs working in Manggarai Regency had carried out the role of community empowerment in the socio-economic field. Strategies developed by NGOs included: (1) group-based approaches, (2) changes in ways of thinking, (3) participation and capacity building, (4) institutional strengthening for long-term independence. The challenges faced by NGOs in carrying out their roles were: (1) NGO personnel capacity was minimal, (2) NGO capacity was still lacking in determining target villages, (3) people's thinking was wrong and (4) partnerships with government, which were too bureaucratic.

Keywords: *NGO; empowerment; community; Manggarai District*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan tentang kemiskinan yang telah menjadi masalah akut di Kabupaten Manggarai. Walaupun berbagai jenis program bantuan sosial pemerintah terus digulirkan dan paradigma pembangunan sudah bergeser dari sistem sentralistik ke desentralistik, angka kemiskinan relatif tetap tinggi. Di tengah kondisi ini, kehadiran LSM menjadi opsi dan harapan alternatif. Permasalahan utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana peran dan strategi LSM dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai. Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM yang berkarya di Kabupaten Manggarai telah menjalankan peran pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi. Strategi yang dikembangkan oleh LSM meliputi (1) pendekatan berbasis kelompok, (2) pengubahan cara berpikir, (3) partisipasi dan peningkatan kapasitas, (4) penguatan kelembagaan demi kemandirian jangka panjang. Tantangan yang dihadapi LSM dalam menjalankan perannya adalah: (1) kapasitas personalia LSM yang minim, (2) kapasitas LSM masih kurang dalam menentukan desa sasaran, (3) cara berpikir masyarakat yang keliru, dan (4) kemitraan dengan pemerintah yang terlalu birokratistik.

Kata Kunci: *LSM; pemberdayaan; masyarakat; Kabupaten Manggarai*

A. Pendahuluan

Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah cukup lama menyandang predikat sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu pemicu sekaligus ekses negatif persoalan kemiskinan. Menurut data BPS nasional tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTT pada tahun 2017 berada pada angka 63,73. Dengan angka ini, NTT menempati urutan ke-31 dari 34 provinsi. Itu berarti ia berada dalam kelompok tiga terbawah bersama Papua Barat dan Papua (BPS, 2018: 2). Jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2018 mencapai 1.142,17 ribu orang atau 21,35 persen dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah ini naik sekitar 7.430 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2017 yang berjumlah 1.134,74 ribu orang (21,38 persen) (BPS, 2018: 4).

IPM Provinsi NTT ini merupakan representasi dari keadaan semua kabupaten di wilayah NTT, termasuk Kabupaten Manggarai yang menjadi lokus penelitian/tulisan ini. Masyarakat NTT yang miskin adalah potret kemiskinan masyarakat manggarai juga. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh data tentang tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai. Data BPS pada tahun 2015 menyebutkan bahwa 42.845 rumah tangga yang ada di Kabupaten Manggarai berada pada zona miskin dengan perincian sekitar, 5.702 di antaranya termasuk kategori sangat miskin, 8.211 miskin, 5.894 hampir miskin, dan 23.038 rentan miskin (BPS, 2016: 56). Data ini tidak banyak berubah di tahun 2016 dan 2017. Dengan mengacu pada pengumpulan basis data terpadu tahun 2015, BPS mencatat dari 179.612 jumlah penduduk Kabupaten Manggarai, 58.667 di antaranya sangat miskin, 63.856 miskin, 44.723 hampir miskin, dan 12.366 rentan miskin (BPS, 2017: 61; BPS, 2018: 58).

Pemerintah Republik Indonesia sangat gencar menggalakkan upaya pengentasan kemiskinan sejak era reformasi bergulir. Berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat mis-

kin sudah dan sedang digulirkan pemerintah. Pemerintah sesungguhnya telah menyalurkan sekurang-kurangnya ada 25 (dua puluh lima) jenis program bantuan sosial-ekonomi melalui sejumlah kementerian dengan total dana mencapai Rp 204 triliyun sampai tahun 2017. (TNP2K, 2018: 4-5). Beberapa di antaranya yang cukup populer adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Sejahtera (Rastra), dan lain sebagainya.

Hasil evaluasi menunjukkan program bansos ini belum secara efektif dan optimal mengatasi masalah kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa salah satu penyebab tidak efektif dan tidak optimalnya bantuan pemerintah adalah “penargetan penerima bantuan serta manajemen distribusi bantuan yang belum tepat dan memadai” (TNP2K, 2018: 2). Selain itu, menurut Gemiharto dan Rosfiantika (2017: 107) kebijakan dan tata kelola pengentasan kemiskinan tidak akan efektif kalau hanya menyentuh aspek peningkatan pendapatan dan tidak berorientasi pada peningkatan kemampuan kaum miskin dan peningkatan peluang ekonomi, politik, dan sosial mereka. Bansos dari pemerintah selama ini lebih banyak bersifat karitatif dengan kemanfaatan jangka pendek. Artinya bantuan pemerintah tersebut diberikan secara cuma-cuma dan langsung berorientasi pada penyelesaian masalah sosial-ekonomi masyarakat secara instan. Pemerintah belum berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kemandirian sosial ekonomi secara jangka panjang melalui berbagai jenis bantuan ini. Masyarakat memang langsung merasakan manfaat dan terlihat bisa segera menyelesaikan masalah dengan adanya bantuan-bantuan berpola serupa ini. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat menjadi terlena, dimanjakan dan tidak memiliki keberdayaan secara jangka panjang dengan pola pemberian bantuan seperti ini.

Pemerintah juga telah mengubah paradigma pembangunan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Paradigma ini secara instusional dan yuridis diwujudnyatakan dengan kebijakan otonomi daerah yang mulanya menyasar daerah provinsi dan kabupaten kemudian dalam kebijakan beberapa tahun terakhir menaruh perhatian besar pada pembangunan desa. Kebijakan desentralisasi seperti ini berimplikasi pada perubahan pola dan strategi pelibatan masyarakat dalam pembangunan dari pola *top down* menjadi *bottom up*, dari *growth strategy* ke *people centered strategy* (Purwowibowo, 2018: 290). Itu berarti pembangunan hendak diubah, tidak lagi berbasis kepentingan elit, tetapi berdasar pada kebutuhan masyarakat. Pergeseran pradigma dan pola pembangunan ini sejatinya memberi ruang yang lebih luas bagi inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat dituntut untuk proaktif dan kreatif dalam mengambil prakarsa dalam pembangunan. Perubahan ini sesungguhnya memberi harapan bagi perbaikan kondisi kemiskinan di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi NTT atau Kabupaten Manggarai pada khususnya.

Ruang dan peluang partisipasi ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya kualitas sumber daya manusia pada sebagian besar masyarakat. Tata kelola pemerintahan daerah pun masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan daya beli untuk pemenuhan kebutuhan secara *hic et nunc*. Dimensi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi jangka panjang belum sungguh menjadi fokus pemerintah daerah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa menjadi harapan di tengah kesulitan ini. Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memberi definisi tentang LSM dalam kerangka pengertian tentang Ormas pada umumnya, yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tu-

juan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Senada dengan itu, Gafar (2006: 200-201) menyebut LSM sebagai organisasi mandiri yang tidak menggantungkan diri pada pemerintah atau pada negara, baik dalam bentuk dukungan finansial maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana. LSM dapat berdiri jika terdapat komitmen, visi, dan misi dari sekelompok orang terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Hagul (1992: 52), sekurang-kurangnya ada lima ciri yang memberi identitas bagi setiap LSM, yaitu: (1) menjangkau yang paling miskin; (2) partisipasi atau *bottom-up*; (3) tidak birokratis; (4) bisa bereksperimen; dan (5) biaya murah. Dari uraian ini, terlihat bahwa salah satu misi dan peran utama adalah memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi kemiskinan dan SDM masyarakat yang rendah bisa menjadi fokus dan locus program kerja LSM.

Pemberdayaan itu sendiri dipahami dalam dua dimensi arti, yaitu sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan menujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Kedua dimensi arti ini memiliki kaitan yang amat erat. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses (Suharto, 2009: 60)

Ukuran keberhasilan pemberdayaan menurut Kiefer (1981) dalam Suharto (2009: 63) sekurang-kurangnya ditunjukkan oleh 4 (empat) dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Kekuasaan di da-

lam berkaitan dengan kesadaran dan keinginan internal dalam diri masyarakat untuk berubah; *Kekuasaan untuk* berhubungan dengan kemampuan individu untuk berubah dan memeroleh akses; *Kekuasaan atas* bertalian dengan kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan; dan *kekuasaan dengan* bertautan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama orang lain untuk mengatasi hambatan-hambatan. Pelaksanaan proses, pencapaian tujuan dan indikator pemberdayaan di atas tercapai melalui penerapan pendekatan atau pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, yaitu: Pemungkinan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

Penelitian dan artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran dan strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM-LSM yang ada di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokusnya adalah pada LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Secara kualitatif juga akan dikaji hambatan dan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan peran LSM. Kajian ini dirasakan sangat urgen untuk memberi informasi yang bisa menjadi catatan evaluatif bagi perbaikan peran dan strategi pemberdayaan yang dilakukan LSM. Dengan itu, LSM bisa berusaha meningkatkan kapasitas dan kualitas perannya agar menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dianggap cocok untuk meneliti masalah seputar peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM. Masalah ini diyakini bersifat amat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Penulis akan mencoba menelusuri setiap fenomena sambil mengurai makna yang terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas (1) Aktivis LSM di Kabupaten Manggarai, (2) Kepala Desa/Kelurahan Mitra

LSM, (3) Unsur Pemerintah Daerah/Pimpinan Dinas di Pemda yang berkaitan dengan LSM dan pemberdayaan masyarakat, dan (4) Wakil masyarakat mitra LSM. Selain wawancara, penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen. Penulis melakukan pembacaan secara intensif terhadap dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis, terutama berupa arsip-arsip program kerja LSM dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hasil riset, dalil/hukum-hukum, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, dan lain-lain yang berhubungan dengan LSM dan pemberdayaan masyarakat.

Subjek penelitian ini adalah LSM yang memiliki program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai. Secara purposif, penulis/peneliti memilih tiga LSM yang dianggap secara konsisten menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam tiga tahun terakhir. LSM itu adalah Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Tunas Jaya/Yayasan Maria Moe Peduli (YTJ/YMP) dan Komisi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Keuskupan Ruteng (PSE Keuskupan Ruteng).

Analisis data menggunakan teknik analisis data berdasarkan model B. Mathew Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: *reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi* (Miles dan Huberman, 1992: 16).

C. Hasil dan Pembahasan

Program LSM dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Manggarai

Peran LSM dalam pemberdayaan sosial ekonomi di Kabupaten Manggarai di antaranya dijalankan melalui tiga program *livelihood, Strategic Planning and Action to Strengthen Rural Communities* (SPARC), dan *pembentukan serta penguatan koperasi kredit*. Ketiga program ini masing-masing dijalankan oleh tiga LSM, yaitu WVI, YTJ/YMP, dan PSE Keuskupan Ruteng. Tiga lembaga ini merupakan LSM yang dike-

nal aktif dan konsisten melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai dalam tiga tahun terakhir.

Livelihood yang dijalankan WVI adalah program peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan sumber-sumber ekonomi lokal. Ada 3 (tiga) bagian utama dalam *Livelihood*, yaitu pemberdayaan petani melalui budidaya tanaman hortikultura, pemberdayaan ibu rumah tangga pengrajin lokal melalui pendampingan kerajinan tenun lokal, dan pemberdayaan petani melalui pendampingan petani kopi dengan komoditas lokal. Dari ketiga bagian kegiatan *livelihood*, budidaya tanaman hortikultura dianggap sebagai yang paling efektif berjalan. Menurut *Semi-Annual Report Progress Summary* WVI tahun 2019, jumlah masyarakat di Kabupaten Manggarai yang didampingi WVI dalam program *Livelihood* berjumlah 532 orang yang tergabung dalam 40 kelompok tani di 23 desa di 3 kecamatan, yaitu Cibal, Rahong Utara, dan Ruteng. Program ini dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari 2018 sampai dengan 2020. (WVI, 2019:7; Wawancara Manajer WVI Manggarai, DP, 29/4/2019).

SPARC yang dilaksanakan oleh YTJ/YMP adalah proyek adaptasi iklim dalam rangka mengurangi risiko perubahan iklim pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan mata pencaharian. SPARC memiliki implikasi pada pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat karena ketiga sektor utama yang menjadi fokus program ini memiliki korelasi erat dengan keberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Perubahan iklim yang terjadi kian ekstrim menciptakan kerentanan sosial-ekonomi pada masyarakat. Program ini sejatinya merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi NTT dengan dukungan dana dari *Special Climate Change Fund of Global Environment Facility (GEF)* dan *United Nations Development Programme (UNDP)*. YTJ/YMP dipilih sebagai LSM lokal karena dianggap memiliki tenaga

fasilitator lapangan yang terlatih untuk melakukan pendampingan langsung kepada kelompok masyarakat sasaran. (Wawancara JJ, Anggota LSM YTJ/YMP, 25/5/2019). Kegiatan yang dijalankan sejak 2013 hingga 2018 ini, berlokasi di 7 desa di 5 kecamatan (Cibal, Wae Ri'i, Satar Mese, Rahong Utara, dan Ruteng) dalam wilayah Kabupaten Manggarai. Masyarakat yang didampingi dalam program ini berjumlah 1884 orang yang tergabung dalam 82 kelompok kegiatan (KLKH, 2016).

PSE Keuskupan Ruteng menjalankan program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui pembentukan dan penguatan koperasi kredit (kopdit). Kopdit merupakan lembaga keuangan yang bergerak pada kegiatan simpan pinjam dengan pengelolaan oleh masyarakat secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kopdit memungkinkan akses yang mudah pada penyediaan modal usaha bagi masyarakat atau pemenuhan kebutuhan sekarang nanti melalui fasilitas simpan dan kredit. Ada dua bagian dalam program pemberdayaan PSE Keuskupan Ruteng ini, yaitu pertama pembentukan kopdit, dan kedua penguatan kopdit. Pada bagian pertama, PSE Keuskupan Ruteng sudah berhasil membentuk 31 kopdit sejak tahun 1999. Dari ke-31 kopdit yang ada, baru 6 di antaranya yang sudah masuk dalam Puskopdit dan Inkopdit. Keenam koperasi ini sudah beranggotakan ribuan orang dengan aset menembus angka milyaran rupiah. Pada bagian kedua, PSE Keuskupan Ruteng memfokuskan diri pada proses penguatan kopdit yang sudah ada (Wawancara RP, Ketua PSE Keskupan Ruteng, 30/5/2019)

Strategi Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat oleh LSM di Kabupaten Manggarai

LSM menjalankan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai melalui 4 (empat) strategi, yaitu: *pendekatan berbasis kelompok, pengubahan cara berpikir, partisipasi dan peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan demi kemandirian jang-*

ka panjang. Keempat strategi ini dijalankan secara integratif dan bersifat komplementer. Artinya, keempatnya dilaksanakan sebagai satu kesatuan strategi dengan karakter satu melengkapi yang lain.

Pertama, pendekatan berbasis kelompok. Ketiga program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang diuraikan di atas semuanya menerapkan pendekatan kolektif berbasis kelompok. Dalam menjalankan program *livelihood*, WVI menggunakan pendekatan atau strategi berbasis kelompok. Ada dua kategori kelompok yang dimaksudkan di sini, yaitu dalam cakupan lebih besar, yakni desa dan dalam cakupan yang lebih kecil dan spesifik, yakni kelompok tani. Proses pendekatan WVI pertama-tama dilakukan ke desa sasaran. Desa umumnya diminta kesediaan untuk menjalankan fungsi kordinasi. Namun, WVI juga secara khusus menjajaki kemungkinan adanya kerja sama lain dalam bentuk “tukar budget” atau pendanaan bersama. Kepala desa selanjutnya memfasilitasi WVI untuk bertemu poktan. WVI menjelaskan rencana program, seluruh proses, tujuan, serta manfaat yang akan diperoleh kepada poktan. WVI menegaskan bahwa, pendampingan tidak akan diberikan secara individual, tetapi secara kolektif dalam poktan. (Wawancara YH, kordinator lapangan Program WVI, 20/4/2019 dan SP, Kepala Desa dan Anggota Poktan, 27/4/2019)

Dalam program SPARC, pendekatan berbasis kelompok juga dilakukan terhadap desa. Desa kemudian membentuk Kelompok Masyarakat Program Kampung Iklim (Kemas ProKlim) dan kelompok primer atau kelompok kegiatan. Desa juga mengembangkan fungsi kordinasi. Sementara Kemas ProKlim adalah kelompok penerima dana dan pendampingan yang kemudian bisa merancang dan membentuk kelompok-kelompok primer dengan aneka kegiatan sesuai kebutuhan. Kegiatan-kegiatan itu meliputi 3 aspek, yaitu menciptakan ketahanan air bersih, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi.

Sementara dalam program pembentukan dan penguatan koperasi kredit oleh PSE Keuskupan Ruteng, pendekatannya juga berbasis kelompok melalui jalur paroki. Paroki adalah sebuahan bagi wilayah pelayanan umat dalam Gereja Katolik Lokal. Wilayah paroki biasanya mencakup satu atau lebih desa. Dalam paroki ini program ini akan didukung oleh komisi PSE tingkat paroki yang kemudian akan menjaring umat atau masyarakat untuk menjadi pengurus dan pengelola kopdit primer di tingkat paroki. Komisi PSE tingkat paroki bersama pengurus dan pengelola kopdit akan mengikuti pelatihan pengelolaan koperasi baik dari sisi administratif, maupun dari sisi organisasional.

Kedua, pengubahan cara berpikir. Proses pengubahan cara berpikir dalam program *livelihood* misalnya dimulai saat WVI mendatangi desa dan poktan untuk mensosialisasikan program. Saat itu ada penjelasan tentang rencana, pelaksanaan, hasil serta manfaat yang diperoleh dari program. Selanjutnya pengubahan cara berpikir dilakukan melalui studi banding ke wilayah tertentu yang telah berhasil mengembangkan kegiatan yang sama. WVI dalam program *livelihood* bidang budidaya hortikultura pernah membawa beberapa poktan untuk melakukan studi banding di Merbabu, Jawa Tengah.

Ketiga, partisipasi dan peningkatan kapasitas. Dalam program *livelihood* WVI, partisipasi dan peningkatan kapasitas dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi saat perencanaan diwujudkan dengan adanya kewajiban dari poktan dampingan untuk membuat proposal rencana kerja secara tertulis. Dalam proposal yang dibuat oleh poktan itu, diuraikan uraian kebutuhan, jadwal pelaksanaan, dan estimasi target yang akan dihasilkan. Dokumen perencanaan ini adalah syarat mutlak untuk menerima dana dan proses pendampingan. Pada saat pelaksanaan, semua anggota poktan akan berpartisipasi dalam aneka pelatihan dan pelaksanaan kerja di poktannya. Sementara dalam evaluasi, partisipasi ditunjukkan dengan membuat laporan hasil kegiatan yang berisi

sejauh mana pelaksanaan kerja telah mencapai target yang direncanakan. Partisipasi itu terjadi dalam dinamika dan kolaborasi dalam kelompok atau antarkelompok.

Partisipasi dan peningkatan kapasitas juga menjadi strategi utama dalam SPARC. Hal itu tampak dalam alur pembentukan Kemas ProKlim yang sangat partisipatif. Proses itu dimulai dengan *focussed group discussion* untuk menggali pendapat tentang pembentukan kelompok dan pilihan kegiatan-kegiatan yang sesuai, serta dalam perumusan visi msi kelompok. Selanjutnya, ada kerja pemilihan kepengurusan Kemas ProKlim, penyusunan AD/ART kelompok dan proses legalisasi kelompok. Kerja partisipatif kemudian terwujud dalam penyusunan rencana kerja dan proposal.

Keempat, penguatan kelembagaan demi kemandirian jangka panjang. Semua program pemberdayaan sosial ekonomi dari ketiga LSM ini menggunakan strategi penguatan kelembagaan. Dalam *livelihood*, penguatan kelembagaan dilakukan di dalam kelompok tani. Kelompok tani diperkenalkan dan dilatih dengan berbagai pengetahuan, teknik dan keterampilan baru. Poktan juga dibantu untuk mendapatkan status legal dari instansi pemerintahan terkait. Lebih jauh penguatan kelembagaan dalam program *livelihood* secara monumental tercapai dengan terbentuknya Asosiasi Petani Hortikultura (APH) Kecamatan Cibal. APH menjadi wadah kerja sama antarpoktan sekaligus menjadi lembaga yang melindungi petani dari persaingan pasar yang tak sehat.

Sementara itu, dalam program SPARC, penguatan kelembagaannya diwujudkan dengan pembentukan Kemas ProKlim yang berbadan hukum. Kelompok ini menjadi jaminan keberlanjutan program di masa yang akan datang dan garansi terciptanya kemandirian secara jangka panjang.

Tantangan

Sekurang-kurangnya ada empat tantangan yang dihadapi LSM dalam menjalankan peran pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di

Kabupaten Manggarai, yaitu: (1) kapasitas personalia LSM yang minim, (2) kapasitas kelembagaan dalam analisis situasi yang kurang, (3) cara berpikir masyarakat yang keliru dan (4) kemitraan dengan pemerintah yang terlampaui birokratistik.

Pertama, kapasitas personalia LSM yang minim. Tantangan ini dialami oleh WVI dalam pelaksanaan program *livelihood*. Dalam sebuah wawancara dengan salah seorang kordinator lapangan kegiatan pemberdayaan WVI, diperoleh informasi bahwa semua pendamping lapangan WVI tidak memiliki kapasitas dan keahlian teknis khusus berkaitan dengan kegiatan yang dijalankan di tengah masyarakat. Informan mencontohkan dirinya sendiri sebagai kordinator lapangan kegiatan budidaya tanaman hortikultura. Latar belakang pendidikannya sangat berbeda dengan hal teknis yang ada dalam pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan permasalahan teknis mendesak yang dialami masyarakat tidak bisa langsung teratasi

Dalam menghadapi ketiadaan tenaga teknis ini, WVI menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah daerah dan bermitra dengan pihak swasta. Dengan pemerintah, WVI menggandeng Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian dalam kordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai. PPL membantu petani dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait proses budidaya hortikultura secara umum. Sementara dengan pihak swasta, WVI membangun kerja sama dengan PT Panah Merah. PT Panah Merah ini secara khusus memberikan layanan konsultasi teknis bagi masalah-masalah di bidang pertanian, khususnya dalam proses produksi atau budidaya tanaman hortikultura

Kedua, kapasitas kelembagaan dalam analisis situasi yang kurang. Hal ini dialami oleh YTJ/YMP dalam perencanaan program SPARC. Salah satu anggota LSM ini mengakui bahwa penentuan desa yang menjadi sasaran program ini tidak atas analisis situasi yang akurat. Menurut pengalaman YTJ/YMP, sebenarnya ada desa lain yang lebih urgen membu-

tuhkan SPARC daripada desa yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Analisis situasi yang keliru ini menyebabkan program tidak benar-benar berdampak optimal.

Ketiga, cara berpikir masyarakat yang keli-ru. Tantangan ini dialami oleh semua LSM. Ketika menawarkan program kepada masyarakat, sebagian masyarakat mengharapkan program ini seperti program bantuan sosial dari pemerintah yang berwujud uang atau barang penuhan kebutuhan konsumsi. Ketika, program mensyaratkan ada kerja mandiri dan partisipasi, banyak masyarakat yang enggan menerima

Keempat, kemitraan dengan pemerintah yang terlambau birokratis. Tantangan ini dialami oleh YTC/YMP. Karena SPARC adalah proyek pemerintah, setiap pengambilan keputusan harus selalu dalam kordinasi dengan tim teknis di pemerintah, dalam hal ini Bappelitbang. Seringkali kebutuhan mendesak dari desa atau Kemas ProKlim tidak bisa langsung dipenuhi karena harus menunggu proses kordinasi yang terlambau panjang dan birokratis.

Pembahasan

Karakteristik umum masyarakat Kabupaten Manggarai yang menjadi mitra ketiga LSM ini adalah masyarakat tradisional. Sebagian besar mereka bekerja sebagai petani tradisional yang bersifat subsisten. Artinya, mereka bertani dengan teknik dan pola lama dengan hasil bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari secara seadanya. Tingkat pengetahuan mereka akan profesi yang mereka geluti juga amat minim. Hal ini karena tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah.

LSM telah cukup membantu masyarakat dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai di tengah kondisi dan karakteristik yang tersebut di atas. Ada beberapa manfaat konkret yang dirasakan masyarakat mitra dari program pemberdayaan LSM di Kabupaten Manggarai. *Pertama*, perubahan cara pandang dan pola kerja dalam mengeluti mata pencaharian. Hampir semua masyarakat mitra LSM adalah petani yang masih menganut dan

mewarisi pola lama/tradisional dalam mengeluti profesi. Pendampingan, pelatihan teknis, dan kegiatan studi banding yang dijalankan oleh LSM telah perlakuan mengubah pola berpikir dan teknik kerja mereka.

Kedua, peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan. Program pemberdayaan dari ketiga LSM yang diteliti membawa manfaat dalam bentuk bertambahnya pendapatan dan membaiknya tingkat kesejahteraan.

Ketiga, ada prospek keberdayaan dan kemandirian secara jangka panjang. Salah satu strategi pemberdayaan yang dikembangkan LSM di Kabupaten Manggarai adalah pembentukan dan penguatan kelembagaan di tengah masyarakat. Kehadiran lembaga ini menjadi salah satu jaminan terciptanya kemandirian secara jangka panjang. Selain itu, partisipasi dan peningkatan kapasitas individu juga secara prospektif menjanjikan keberlanjutan proses pemberdayaan masyarakat.

Efektivitas kerja LSM di Kabupaten Manggarai ditunjang oleh pilihan pendekatan dan strategi yang dikembangkan. Apabila mencermati strategi yang diterapkan oleh ketiga LSM di atas, ada dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio ekonomis dan pendekatan sosio reformis. Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 17), pendekatan sosio ekonomis adalah pendekatan yang didasarkan pada anggapan bahwa orang miskin mempunyai potensi untuk mengatasi masalah sosial ekonomi mereka sendiri. Kalau potensi itu diperkuat maka mereka akan menjadi mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini sering disebut pemberdayaan. Sementara pendekatan sosio-transformis didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan perubahan sikap, tingkah laku, pandangan, dan budaya masyarakat. Upaya yang dilakukan dengan cara memerjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan partisipatif.

Selain itu, bila ditinjau dari indikator-indikator keberdayaan, LSM telah cukup membantu masyarakat untuk memiliki keberdayaan

(Suharto, 2009: 63). Melalui program LSM, masyarakat di Kabupaten Manggarai telah memiliki *power within*, yaitu keinginan dari dalam diri sendiri untuk berubah. Hal itu terjadi karena LSM berhasil mengubah pola pikir masyarakat melalui agitasi, sosialisasi atau studi banding yang menampilkan hal-hal positif yang bisa dipetik dari program yang dibuat. LSM juga telah memungkinkan peningkatan kapasitas dalam diri masyarakat yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai hal yang dibutuhkan secara sosial-ekonomi (*power to*). Dengan pendekatan LSM yang berbasis kelompok, masyarakat juga mempunyai *power with*, yaitu adanya soliditas dan solidaritas dengan orang lain dalam mengatasi aneka hambatan sosial-ekonomi.

Dengan formulasi dan perspektif berbeda, dilihat dari teori ACTORS yang dikembangkan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, masyarakat Manggarai yang bermitra dengan LSM telah mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk bisa berdaya secara sosial ekonomi. LSM telah memberi *Authority*, kekuasaan dan kewenangan dengan kepercayaan untuk mengikuti program. LSM juga telah menumbuhkan rasa percaya diri dan kompetensi (*Confidence and Competence*), melalui aneka pelatihan dan pembelajaran yang diberikan. Masyarakat juga semakin memiliki keyakinan (*trust*) bahwa mereka bisa mengubah dan menentukan nasib mereka sendiri. LSM juga telah menyediakan banyak kesempatan (*Opportunity*), tanggung jawab (*Responsibilities*) dan dukungan (*Support*) untuk menjadi berdaya dan maju secara sosial ekonomi.

D. Penutup Kesimpulan

LSM telah cukup menunjukkan diri sebagai alternatif yang bisa membantu masyarakat untuk menjadi berdaya secara sosial-ekonomi di Kabupaten Manggarai. LSM menawarkan pendekatan yang berbeda dengan arus utama pembangunan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Bila pemerintah berfokus pada per-

tumbuhan ekonomi secara makro, LSM memilih memusatkan perhatian pada kemandirian sosial ekonomi secara mikro. Bila pemerintah belum bisa lepas dari pola *top down*, LSM selalu mengedepankan pola *bottom up*.

Alih-alih bersifat substitutif, peran pemerintah dan LSM harusnya bersifat komplementer. Keduanya harus menjalin kemitraan yang strategis dan konstruktif. Bahkan, jika memungkinkan, pemerintah bisa mereplikasi pendekatan dan strategi LSM dalam menjalankan roda pembangunan. Dengan demikian masalah kemiskinan bisa diatasi dan kemandirian serta keberdayaan masyarakat akan tercapai.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk LSM yang berkiprah di bidang pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. LSM diharapkan tetap konsisten dengan esensi keberadaan dan misi pemberdayaannya sambil terus melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk menjawabi tantangan perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Kedua, untuk pemerintah daerah Manggarai. Pemerintah diharapkan tetap menjalin kemitraan yang suportif-konstruktif dengan LSM dalam semangat saling belajar dan melengkapi. Dengan itu, proses pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan secara lebih efektif dan akeleratif

Ketiga, untuk masyarakat Kabupaten Manggarai. Masyarakat diharapkan menyambut setiap peluang dan program pemberdayaan yang ditawarkan pemerintah dan LSM. Peluang dan program pemberdayaan dari pihak luar (LSM dan Pemerintah) perlu ditunjang oleh kesadaran dan komitmen dari dalam diri sendiri untuk berubah.

Pustaka Acuan

<https://ntt.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/699/indeks-pembangunan-manusia-2017-mencapai-63-73.html> diakses tanggal 1 November 2018

- <https://manggarai.kab.bps.go.id/pressrelease/2018/07/18/91/profil-kemiskinan-provinsi-ntt-maret-2018.html> diakses tanggal 1 November 2018
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Manggarai dalam Angka 2015*. Manggarai: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Kabupaten Manggarai dalam Angka 2016*. Manggarai: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, 2017. *Kabupaten Manggarai dalam Angka 2017*. Manggarai: Badan Pusat Statistik
- Cook, Sarah dan Steve Macaulay. 1997. *Perfect Empowerment*. Jakarta: Media Komputindo
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gemiharto, Ilham & Rosfiantika, Evi. "Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)" dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Vol 7 No 1 (2017). Jakarta: Universitas Komputer Indonesia
- Hagul, Peter. 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali
- Miles, B. Mathew, A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Penterj. Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. *Analisis Data Qua-litatif*. Jakarta: UI-Press.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic an International Studies
- Purwowibowo, Hendrijanto K., dan Soelistijono P.A. 2018. "Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari *People Centered Development*" *Jurnal Aristo (Sosial, Politik, Humaniora)*, Vol. 6. No. 2. Ponorogo: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antithesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. *Program Bantuan Pemerintah untuk Individu, Keluarga, dan Kelompok Tidak Mampu – Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Wahana Visi Indonesia. 2019. Area Programme Semi-Annual Progress Summary Manggarai Area Programme. Manggarai: WVI

Pengaruh Terapi Bermain terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita SLB Negeri Selong

The Effect of Play Therapy on the Level of Socialization of Children with Little Mental Retardation in SLB Negeri Selong

Muhammad Satriadi Muratama¹ dan Farida Agus Setiawati²

¹Pascasarjana Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
email: Adisatriadi92@gmail.com, HP. 087738131792

²Fakultas dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
email: faridaagus@uny.ac.id, HP. 081215536324

tanggal di terima 29 April 2019, tanggal di perbaiki 11 Agustus 2019, tanggal di setujui 31 Desember 2019

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of play therapy on the level of socialization of children with little mental retardation. It was known that the level of socialization of children with Little Mental Retardation prior to being given play therapy, children found it difficult to carry out the process of socialization with friends and teachers at school, but after being given play therapy, children with Little Mental Retardation could do the socialization process in their learning environment at school. Normal birth and life are the desires of every individual and parent. This desire was only a dream for people with disabilities, because most of them were excluded from the learning environment. This research method was an experimental research through pre-experimental design which was formed a group of children with Little Mental Retardation to undergo pre-test-post-test procedures (one group of chosen children to undergo the pre-test-post-test procedures). The number of samples in this study were 40 students. The sampling technique was carried out randomly with a total sampling technique. Data collection techniques used in this study were conducted through two data sources, namely primary data and secondary data. Primary data was obtained through the results of filling out the questionnaires (check list) conducted by researchers, while secondary data was obtained through the SLB Negeri Selong Timur Lombok Timur institution, which was in the form of a classification of children with Mental Retardation, the number, and a list of SLB Negeri Selong Negeri East Lombok SLB students. The results of Wilcoxon Signed Rank Test with an error level (α) = 0.05 obtained p = 0,000 ($p < \alpha$) so that it could be concluded that there was an effect of play therapy on the level of socialization of children with Little Mental Retardation in SLB Negeri Selong. The results of this study were recommended to the head of BLHP (Body of Life Environment and Research) who then the head of BLHP conveyed the copy of the recommendation to the headmaster of the Selong State SLB school in East Lombok Regency.

Keywords: *play therapy; level of socialization; children with little mental retardation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan. Diketahui bahwa tingkat sosialisasi anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan sebelum diberikan terapi bermain, anak sulit dalam menjalankan proses sosialisasi bersama teman dan guru di sekolah, tetapi setelah diberikan terapi bermain, maka anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan dapat melakukan proses sosialisasi di lingkungan belajarnya di sekolah. Lahir dan hidup normal adalah keinginan setiap individu dan orangtua. Keinginan itu hanya merupakan impian bagi para penyandang cacat, sebab kebanyakan dari mereka dikucilkan dari lingkungan belajarnya. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperiment melalui desain pre-eksperimental yaitu dibentuk satu kelompok anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan untuk menjalani pre-test-post-test prosedur (one group of chosen children to undergo the pre-test-post-test procedures). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil pengisian kuesioner (*check list*) yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh melalui institusi SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur, yaitu berupa klasifikasi anak dengan Keterbelakangan Mental, jumlah, dan daftar nama siswa SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur. Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test dengan taraf kesalahan (α) = 0,05 diperoleh nilai p = 0,000 ($p < \alpha$) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terapi

bermain terhadap tingkat sosialisasi anak dengan Keterbelakangan Mental Ringan di SLB Negeri Selong. Hasil penelitian ini direkomendasikan kepada kepala BLHP (Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian) yang kemudian menyampaikan tembusan rekomendasi tersebut kepada kepala sekolah SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur.

Kata Kunci: terapi bermain; tingkat sosialisasi; anak tuna grahita ringan

A. Pendahuluan

Kelahiran dalam kehidupan normal merupakan suatu keinginan semua orang terhadap kehidupan. Keinginan tersebut merupakan sebuah impian bagi para penyandang cacat, disebabkan dari kebanyakan mereka cenderung dikucilkan di lingkungan tempat tinggalnya. Orang cacat cenderung tidak punya teman dan merasa terkucilkan dalam pergaulan sosial. Hal tersebut sangatlah tidak menyenangkan dan dapat mengganggu pola perkembangan anak yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyimpangan kepribadian untuk melakukan instraksi di lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa penyandang cacat di dunia mencapai 7-10% atau berjumlah sekitar 82.840.600 jiwa. Kementerian Sosial RI pada tahun 2011 mencatat bahwa jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 6,7%, atau sebesar 6,7 juta jiwa, sedangkan data terbaru tahun 2012 jumlah penyandang cacat di Indonesia mencapai 4,7% atau berjumlah 4.783.267 orang jiwa. Sebagiannya itu adalah penyandang Tuna Grahita dengan jumlah 777.761 jiwa (Mujaddid, 2014).

Tuna Grahita merupakan sebuah kekurangan atau keterbatasan yang dihadapi oleh seseorang dilihat dari segi mental intelektualnya di bawah rata-rata normal, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya, menjalin komunikasi, serta berhubungan dengan sosialnya (Putranto, 2015). Terkait dengan itu Somantri (2007) menjelaskan bahwa ada beberapa klasifikasi pada anak Tuna Grahita, yaitu anak Tuna Grahita ringan (IQ 55-69), anak Tuna Grahita sedang (IQ 40-54), dan anak Tuna Grahita berat (IQ 20-32).

Setiap kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki oleh anak Tuna Grahita baik dari segi

mental maupun intelektual yang berada di bawah rata-rata normal, maka akan menyebabkan kesulitan mereka untuk mengerjakan segala bentuk tugas, melakukan komunikasi, dan bahkan kesulitan dalam berinteraksi terhadap dunia akademiknya. Bentuk kesulitan pada anak Tuna Grahita bisa dilihat dari tingkat IQ yang dimiliki.

Oleh sebab itu kemampuan dalam bersosialisasi sangat penting bagi anak Tuna Grahita, karena mereka harus belajar demi mewujudkan kemampuan diri. Terapi bermain merupakan suatu cara yang dapat digunakan sebagai sebuah intervensi dengan memanfaatkan dari beragam alat permainan yang dijadikan sebagai salah satu media terapis bagi anak. Melalui pemanfaatan dari media terapis, anak dapat menyelesaikan dari setiap masalah yang dihadapi khususnya mampu meningkatkan sosialisasi anak di lingkungan belajarnya (Landerth, 2006). Dijelaskan pula oleh Andriana (2011) menjelaskan bahwa terapi bermain merupakan suatu terapi yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mencegah serta meningkatkan kemampuan dirinya dalam melakukan instraksi kepada sosialnya.

Melihat akan hal itu terkait pemberian terapi bermain yang dijadikan sebagai sebuah intervensi terhadap masalah rendahnya sosialisasi anak dalam melakukan instraksi dalam sosialnya, maka hal ini masalah sosialisasi anak Tuna Grahita akan diberikan intervensi melalui terapi bermain. Pada penelitian ini melihat bahwa ada atau tidaknya pengaruh dari terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak Tuna Grahita Ringan. Peneliti sendiri masih ragu dengan teknik tersebut dalam membantu meningkatkan sosialisasi anak tunagrahita ringan. Oleh karena itu peneliti mencoba dan menguji teknik tersebut adakah pengaruh yang diberikan terhadap

tingkat sosialisasi anak tunagrahita ringan di SLB Negeri Selong .

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur ditemukan bahwa cukup banyak siswa Tuna Grahita yang terlihat kurang memiliki tingkat sosialisasi di sekolah, yang di mana hal itu merupakan dipengaruhi oleh lingkungan serta bawaan dari rumah para siswa. Dari segi kurikulum, metode yang dipakai sudah menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan khusus, namun karena kurangnya tenaga pengajar, maka proses belajar mengajar di kelas melalui penyampaian materi memiliki porsi paling banyak. Meskipun begitu, metode yang lain juga tetap digunakan namun dengan porsi yang lebih sedikit. Mengenai terapi bermain, salah satu sumber menyebutkan bahwa terapi bermain sudah dilakukan namun porsinya tidak banyak dan hanya disisipkan pada beberapa penyampaian materi oleh para guru.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *"Pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak Tuna Grahita ringan di SLB Negeri Selong."*

B. Penggunaan Metode Penelitian

Desain *penelitian* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pre eksperimental* dengan menggunakan pendekatan *pre test and post test group design*. *Pre test and post test group design* merupakan suatu rancangan penelitian yang melakukan observasi pertama (*pre test*) yang memungkinkan peneliti dapat menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah eksperimen dilakukan (*post test*).

Penelitian ini menggunakan populasi anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 46 siswa. Langkah pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *total sampling*. *Total sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel di mana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2007). Alasan mengambil *total sampling* karna menurut Sugiyono (2007), jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh

populasi dijadikan sampel penelitian. Ketiga, Kriteria sampel penelitian yang akan diambil pada penelitian kali ini harus memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Adapun kriteria inklusi adalah anak tuna grahita ringan, telah memberikan persetujuan untuk dijadikan sampel, dan Pengisian lembar persetujuan diwakili oleh guru pendamping. Kriteria eksklusinya adalah anak tuna grahita ringan yang tidak masuk sekolah saat dilakukan intervensi, dan anak tuna grahita ringan yang membuat kegaduhan seperti berkelahi, dan keluar masuk kelas selama proses pembelajaran.

Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi terdapat 40 anak tuna grahita ringan yang dapat dijadikan sampel. Sebelum dilakukan penelitian terdapat 46 anak tuna grahita ringan yang dijadikan sample penelitian. Tetapi saat dilakukan penelitian dari tanggal 25 Januari s/d 15 Februari terdapat 40 anak tuna grahita ringan yang masuk sampai intervensi dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 25 Januari s/d 15 Februari 2018.

Data yang sudah terkumpul dibuat dalam bentuk tabel sehingga mempermudah melihat perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan terapi bermain. Setelah responden terapi bermain, kemudian dilakukan observasi untuk melihat perubahan pada responden tersebut. Apabila hasil telah didapat atau terkumpul kemudian dilakukan uji statistic *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji hipotesis menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* yang digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berhubungan bila datanya berbentuk ordinal (Sugiono, 2010). Uji ini dipilih karena data kemampuan sosialisasi merupakan data ordinal sehingga uji yang sesuai untuk data ordinal dengan *pre-test* dan *post-test* adalah *Wilcoxon Signed Rank Test*. Tingkat kesalahan adalah 0,05. H_0 gagal ditolak jika $p > 0,05$ dan H_0 ditolak jika $p \leq 0,05$.

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan dengan teknik nontes, baik yang menghasilkan respon tertulis, respon

lisan, maupun respon unjuk kerja. Data-data penelitian ini diperoleh dengan cara pemberian skala berupa angket sosialisasi anak tuna grahita ringan. Sejumlah instrument skala diisi oleh peneliti, kemudian dilakukan penelitian untuk mengukur tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan dalam kegiatan *pretest* dan *posttest*. Peneliti diminta memberikan penilaian mengenai pertanyaan/pernyataan yang tercantum di dalam skala sesuai dengan keadaan yang dialami oleh siswa. Data akhir yang akan diperoleh melalui cara ini adalah data tertulis berupa skor tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan.

Dalam skala ini peneliti diminta untuk memberi respon sejumlah pernyataan yang sangat sesuai dengan keadaan siswa. Peneliti menggunakan pilihan alternative jawaban pada skala Guttman yang mempunyai variabilitas respon dua alternative jawaban yang tegas, yaitu "Ya" atau "Tidak". Peneliti menggunakan data interval 0 s/d 1 Peneliti menggunakan skala guttman dikarenakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas pada setiap permasalahan. Bentuk skala guttman dalam penelitian ini adalah berupa checklist.

Pemberian skor pada skala ini di dasarkan pada dua pilihan jawaban. Dalam skala ada dua jenis pernyataan, yakni pernyataan *favorable* dan *unfavorable*. Pada item yang *favorable* untuk pilihan jawaban "Tidak" diberikan skor 0 dan "Ya" diberikan skor 1. Sedangkan pada item yang *unfavorable* pilihan jawaban "Tidak" diberikan skor 1 dan "Ya" diberikan skor 0. Data yang telah diolah akan dianalisis, sehingga hasil analisis data dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Analisis dalam penelitian ini yaitu analisis univariat, analisis bivariat dan analisa normalitas data.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini responden yang diam-bil sebanyak 46 anak tuna grahita ringan, akan tetapi pada saat plaksanaan penelitian terdapat 40 anak tuna grahita ringan. Hasil data yang disajikan berupa data umum dan data khusus. Data umum dari hasil penelitian ini adalah data yang

meliputi karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin. Data khusus dari hasil penelitian ini adalah data yang meliputi kemampuan tingkat sosialisasi pada anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong sebelum dilakukan metode terapi bermain, kemampuan sosialisasi pada anak tuna grahita di SLB Negeri Selong sesudah dilakukan metode terapi bermain, dan pengaruh kemampuan tingkat sosialisasi pada anak tuna grahita ringan SLB Negeri sebelum dan sesudah dilakukan metode bermain.

1. Karakteristik Jenis Kelamin SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur

Tabel 1.
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur tahun 2018

Jenis Kelamin	N	Frekuensi (%)
Laki-Laki	27	67,5
Perempuan	13	32,5
Total	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2018

Ditunjukkan bahwa lebih banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan, dimana responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 responden (67,5%) dan perempuan sebanyak 13 responden (32,5%). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dari beberapa responden yang lebih dominan adalah berjenis laki-laki sebanyak 27 responden dengan persentase (67,5%).

2. Kemampuan Sosialisasi Anak dengan Tuna Grahita Ringan sebelum dilakukan terapi bermain.

Tabel 2.
Distribusi Responden Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita Ringan Sebelum Diberikan Terapi Bermain di SLB Negeri Selong Tahun 2018

Tingkat Sosialisasi	Frekuensi	Persentase
Kurang	33	82,5
Cukup	7	17,5
Baik	0	0
Total	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2018

Menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi bermain 33 responden memiliki kemampuan kurang (82,5%), 7 responden memiliki kemampuan cukup (17,5%) dan tidak ada responden yang mempunyai tingkat sosialisasi baik.

3. Kemampuan Sosialisasi Anak dengan Tuna Grahita setelah Dilakukan Terapi Bermain

Tabel 3.

Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Anak Setelah Diberikan Terapi Bermain Terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita Ringan di SLB Negeri Selong Tahun 2018

Tingkat Sosialisasi	Frekuensi	Percentase
Kurang	1	2,5
Cukup	18	45,0
Baik	21	52,5
Total	40	100%

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi bermain sebanyak 21 responden memiliki tingkat sosialisasi baik (52,5%), 18 responden memiliki tingkat sosialisasi Cukup (45,5%) dan hanya 1 responden yang memiliki tingkat sosialisasi kurang (2,5%). Pada kategori ini menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan dikatakan baik.

4. Pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong.

Tabel 4.

Pengaruh Terapi Bermain Terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita Ringan di SLB Negeri Selong

Tingkat Sosialisasi	Pre Test		Post Test	
	Frekuensi	Per센	Frekuensi	Per센
Kurang	33	82,5	1	2,5
Cukup	7	17,5	18	45,0
Baik	0	0	21	52,5
Total	40	100%	40	100%

p Value = 0,000

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2018

Menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi bermain, tidak ada anak tuna grahita ringan yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori baik dan setelah diberikan terapi bermain terdapat 21 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori baik (52,5%). Tabel di atas dinunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi bermain terdapat sebanyak 33 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kurang (82,5%) dan setelah diberikan terapi bermain terdapat 1 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori kurang (2,5%). Hal ini berarti ada peningkatan tingkat sosialisasi dari anak tuna grahita dalam melakukan sosialisasi.

Sebelum diberikan terapi bermain terdapat sebanyak 7 anak yang memiliki kemampuan Sosialisasi kategori cukup (17,5%) dan setelah diberikan terapi bermain 18 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi yang cukup (45,5%). Penurunan jumlah anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori kurang menunjukkan peningkatan tingkat sosialisasi anak tuna grahita dalam melakukan sosialisasi.

Hasil penelitian dengan uji *wilcoxon sign rank test* didapatkan *p value* sebesar 0,000. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat derajat kemaknaan ($\alpha=0,05$) dan *p value* $< 0,05$ dan $0,000 \leq p < 0,000$ berarti memiliki nilai sangat bermakna. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah Ha diterima dan membuktikan bahwa terdapat pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong.

Pada penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Penjabaran pada pembahasan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang terdiri dari karakteristik responden, tingkat sosialisasi pada siswa SLB Negeri Selong sebelum dilakukan terapi bermain, tingkat sosialisasi pada siswa di SLB Negeri Selong setelah dilakukan terapi bermain dan pengaruh terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 anak yang diteliti diketahui bahwa jenis kelamin yang paling dominan adalah laki-laki, yaitu sebanyak 27 anak (67,5), sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 13 anak (32,5%). Berdasarkan hasil penelitian sebelum dilakukan intervensi terapi bermain : *cooperative play* dengan *puzzle* dapat diketahui bahwa sebagian besar responden baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok control memiliki kemampuan sosialisasi yang kurang. Hal ini dipengaruhi oleh : *Intelligence Quotient* (IQ), stimulasi yang kurang, peran aktif anak, dan pendidikan orang tua.

Anak retardasi mental memerlukan stimulasi yang lebih dibandingkan anak normal untuk mengembangkan kemampuan sosialisasinya. Meskipun anak sudah mendapatkan pendidikan di sekolah khusus, tetapi kemampuan sosialisasinya masih kurang. Hal ini dikarenakan materi disekolah lebih difokuskan untuk peningkatan inteligensi. Kegiatan yang dilakukan secara bersama / berkelompok masih jarang dilakukan, seperti bermain secara berkelompok, sehingga peran aktif anak untuk memacu dirinya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar juga kurang. Untuk itu diperlukan stimulasi berupa kegiatan / permainan yang dapat dilakukan dengan berkelompok secara rutin dan berkelanjutan demi meningkatkan peran aktif anak dalam mengembangkan kemampuan sosialisasinya.

Secara umum anak laki-laki lebih aktif bermain jika dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki cenderung lebih aktif bergerak dibanding anak perempuan (Sandra, 2010). Jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki pengaruh terhadap agresifitas anak.

2. Tingkat Sosialisasi Anak dengan Tuna Grahita Ringan Sebelum Dilakukan Terapi Bermain

Sebelum diberikan terapi bermain 33 responden memiliki tingkat sosialisasi kurang

(82,5%), 7 responden memiliki tingkat sosialisasi cukup (17,5%) dan tidak ada responden yang mempunyai kemampuan baik (0%). Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat sosialisasi pada anak tuna grahita ringan. Anak tuna grahita memiliki banyak keterbatasan baik fisik maupun mental. Keterbatasan fisik meliputi telapak tangan pendek, ditambah lagi memiliki tubuh pendek dan gemuk. Keterbatasan fisik seperti kurangnya koordinasi, gerakan motorik halus dan kasar yang tidak optimal, kurangnya sensitivitas dan kelainan fisik pada tangan (gemuk dan pendek).

Keterbatasan mental meliputi kemampuan beradaptasi, komunikasi, keterampilan sosial, akademik, kesehatan, keamanan, dan merawat diri (Schwart, 2004). Hasil observasi diperoleh peneliti bahwa di SLB Negeri Selong telah memiliki kurikulum bina diri, dimana salah satu kegiatan di dalam kurikulum tersebut adalah kegiatan terapi bermain. Kemampuan sosialisasi anak dipengaruhi oleh pendidikan anak, peran aktif anak, pendidikan orang tua, peran aktif orang tua, dan lingkungan (Gupte, & Ramaswamy, 2004: 1167). Setiap anak mampu mempunyai kemampuan sosialisasi yang optimal bila mendapat stimulasi yang tepat. Di setiap fase pertumbuhan, anak membutuhkan rangsangan untuk mengembangkan kemampuan mental dan sosialisasinya. Anak setelah diberi stimulasi mampu melakukan tahapan perkembangan yang optimal (Domínguez, Lozoya, & Simon, 2006: 207–209).

Pendidikan untuk anak tuna grahita ringan dapat berupa sekolah khusus maupun tempat terapi. Pendidikan anak juga dapat mempengaruhi kemampuan sosialisasinya, karena ditempat ini mengharuskan mereka untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Anak yang mampu belajar dengan baik akan memiliki pengetahuan dan informasi sehingga mampu beradaptasi dengan baik. Hal ini pentingnya media yang menarik agar minat anak tetap mengikuti pembelajaran dan mampu melatih tingkat sosialisasi anak tuna grahita.

3. Tingkat Sosialisasi Anak dengan Tuna Grahita Ringan Setelah Dilakukan Terapi Bermain

Setelah diberikan terapi bermain terdapat 1 anak yang memiliki tingkat sosialisasi kategori kurang (2,5%), 21 responden memiliki kemampuan baik (52,5%), 18 responden memiliki kemampuan cukup (45,5%). Peningkatan kemampuan sosialisasi kategori baik pada anak tuna grahita ringan didukung oleh terapi bermain yang dapat menarik perhatian anak untuk mengikuti pembelajaran. Terapi bermain secara tidak langsung anak akan melatih kemampuan motorik halusnya (Dench, 2009: 28-37).

Kemampuan sosialisasi merupakan suatu kesanggupan seseorang dalam menjalani kehidupan bersosialisasi terhadap masyarakat (Somantri 2007). Peningkatan kemampuan sosialisasi masing-masing responden berbeda. Peningkatan kemampuan sosialisasi responden bersifat individual, sehingga ada perbedaan peningkatan nilai masing-masing responden (Hurlock 2005). Melalui terapi bermain ini anak belajar untuk berinteraksi dengan baik, anak belajar untuk berkomunikasi, seperti ada kontak mata ketika ditanya, memberikan respon (berupa senyuman) ketika dipanggil / disapa, mau menjawab pertanyaan dari lawan bicara, anak belajar cara “bertanya dan meminta” dengan baik kepada teman.

4. Pengaruh Terapi Bermain terhadap Tingkat Sosialisasi Anak Tuna Grahita Ringan di SLB Negeri Selong

Sebelum diberikan terapi bermain, tidak ada anak tuna grahita ringan yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori baik dan setelah diberikan terapi bermain terdapat 21 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori baik (52,5%). Tabel 4 menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi bermain terdapat sebanyak 33 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kurang (82,5%) dan setelah diberikan terapi bermain terdapat 1 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori kurang (2,5%). Hal ini

berarti ada peningkatan tingkat sosialisasi dari anak tuna grahita dalam melakukan sosialisasi.

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi bermain terdapat sebanyak 7 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori cukup (17,5%) dan setelah diberikan terapi bermain 18 anak yang memiliki kemampuan sosialisasi yang cukup (45,5%). Peningkatan jumlah anak yang memiliki kemampuan sosialisasi kategori kurang menunjukkan peningkatan tingkat sosialisasi anak tuna grahita dalam melakukan sosialisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terapi bermain terhadap peningkatan kemampuan sosialisasi pada anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur. Kemampuan sosialisasi dengan baik yang dimiliki anak dikarenakan adanya pemberian inovasi terbaru tentang sosialisasi dengan menggunakan metode terapi bermain. Menggunakan terapi bermain dalam proses pembelajaran akan menstimulus anak untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Bercerita membrikan cara yang menyenangkan untuk mengembangkan *rapport* dan meningkatkan sosialisasi dalam belajar tentang anak. Ketika anak menceritakan cerita, mereka mngkomunikasikan informasi penting tentang diri mereka sendiri. Terapi bermain dapat meningkatkan daya sosialisasi anak tuna grahita salah satunya dengan menggunakan cerita dongeng, karena di terapi bermain terdapat urutan langkah-langkah sosialisasi. Menggunakan terapi bermain untuk meningkatkan minat dan aktifitas belajar siswa SLB Negeri Selong. Hasil yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat dan hasil belajar siswa SLB Negeri Selong.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh terapi bermain pada anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, sebelum diberikan terapi bermain, tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan di

SLB Negeri Selong sebagian besar berada pada kategori tingkat sosialisasi kurang sebanyak 33 responden (82,5 %). Kedua, setelah diberikan terapi bermain, tingkat sosialisasi anak tuna grahita ringan di SLB Negeri Selong berada pada kategori tingkat sosialisasi baik sebanyak 21 responden (45,0 %). Ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara terapi bermain terhadap tingkat sosialisasi anak Tuna Grahita Ringan di SLB Negeri Selong dengan p value = 0,000 (p value $< \alpha$ 0,05).

Rekomendasi: Penelitian ini direkomendasikan oleh kepala BLHP yang tembusannya disampaikan ke kepala sekolah SLB Negeri Selong Kabupaten Lombok Timur.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pembimbing yang telah memberikan segala bentuk bimbingan serta masukan pada penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Rasa terimakasih juga kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan yang baik dalam melaksanakan penelitian.

Pustaka Acuan

- Andriana, D. (2011). *Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak*. Jakarta: Salemba.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Almalia.
- Bambang, P. (2015). *Tips Menangani Siswa yang Membutuhkan Perhatian Khusus*. Yogyakarta: DIVA PRESS.
- Dench, O. (2010). Education Statistics of New Zealand: 2009. *Early Childhood Education*, 28–37. <http://www.educationcounts.govt.nz>.
- Dephlie, B. (2005). *Bimbingan Konseling untuk Perilaku Non Adaptif*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Djiwandono, S, W. (2005). *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orangtua*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fatimah, E. (2010). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Gupte, N., & Ramaswamy, R. (2004). Perspectives in nonlinear dynamics 2004. In *Current Science*, (87), 9, 1167.<https://www.mendeley.com/researchpapers/perspectives-nonlinear-dynamics>
- Hurlock, & Elizabeth, B. (1978). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Ismail, A. (2006). *Education Games*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Mohammad, E. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelaianan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mujaddid. (2014). *Kesehatan Anak Dengan Disabilitas*. Jakarta: Kementrian Kesehatan.
- Mustafa, Z. (2009). *Mengurai Variabel Hingga Instrumenasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mutiah, D. (2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Narwoko & Bagong. (2007). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nur'aeni. (2004). *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminto. (2005). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sandra.(2010). *Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kata Hati.
- Schwart, (2004P). *Pedoman Klinis pediatri*. Jakarta: EGCSetiadi, (2007). *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Somantri, T, S. (2007). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati. (2007). *Diklat Perkembangan Motorik*. Yogyakarta. FIK UNY.
- Suwarjo & Elias, E.I. (2010). *55 Permainan (Games) dalam Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Paramitra Publishing.
- Ulfah. (2010). *Mendidik Anak Lewat Dongeng*. Yogyakarta: Mandania.
- Upton, P. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- William J. Goode. (2007). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara

Ucapan Terimakasih

Dalam Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) Volume 18 Nomor 3 Desember 2019, review dan proses cetak artikel melibatkan empat mitra bestari, dewan redaktur mengucapkan terimakasih kepada mitra bestari yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, M.Si (Pembangunan Sosial, UGM)
2. Drs. Latiful Khuluq, M.A, B.Sw, Ph.D (Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga)
3. Dr. Harmona Daulay, S.Sos, M.Si (Sosiologi, USU)
4. Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag. (Teknologi Kesejahteraan Sosial, IAIN Palu)
5. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc (Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia)
6. Dr. Ahmad Sofian, S.H., MH (Hukum, Universitas Bina Nusantara)
7. Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D (Pembangunan Sosial, Universitas Gadjah Mada)
8. Takenobu Aoki, Ph.D (Antropologi Sosial, Chiba University)

Semoga kerjasama dengan mitra bestari tersebut dapat mengontrol kualitas sajian tulisan di JPKS, lebih membawa manfaat bagi pembaca, masyarakat yang memiliki kepedulian dalam permasalahan sosial pada umumnya dan masalah kesejahteraan sosial pada khususnya.

Dewan Redaktur JPKS